

**PENGELOLAAN ZAKAT *MÂL* SECARA PRODUKTIF
PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH***

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Megister Syari'ah**



OLEH :

**MUHAMMAD HUSIN
NIM : 0907 S2 902**

**KONSENTRASI FIQH PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1432 H / 2011 M**



ABSTRAK

ibadah zakat merupakan '*ibâdah mâliyah* yang mengandung makna *ta'abbudiyyah* kepada Allah swt, sekaligus ungkapan solidaritas sesama manusia dalam mewujudkan keseimbangan dan keadilan memperoleh hak pokok. Hak pokok manusia yang dimaksud, dalam teori *maqâshid al-syarî'ah* adalah terpeliharanya *al-kulliyât al-khamsah* (*hifzh al-dîn, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, hifzh al-nasl wa al-nasb wa al-'ardh* serta *hifzh al-mâl*).

Memproduksi harta zakat, dalam kajian fiqh zakat kontemporer menjadi permasalahan sangat penting dan serius untuk segera dijawab secara tuntas. Ketika Badan atau Lembaga Amil Zakat mengelola zakat yang dikumpulkan sebelum dibagikan kepada *mustahiq*nya menjadi aset produktif, setelah mendatangkan hasil, baru hasilnya diberikan kepada *mustahiq*. Atau adakalanya Badan atau Lembaga Amil Zakat secara langsung memberikan harta zakat itu namun berupa bentuk lain dari jenis harta zakat yang dikumpulkan, yaitu berupa modal produktif untuk dikembangkan sendiri oleh *mustahiq*nya.

Dalam tesis ini, penulis mengetengahkan pembahasan pada sistim Pengelolaan Zakat *Mâl* Secara Produktif Perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), bersumber pada data kualitatif dari berbagai sumber tertulis (klasik maupun kontemporer). Selanjutnya dianalisa menggunakan pendekatan analisa isi (*content analysis*). Setelah itu dideskripsikan serta dianalisa menurut konsep-konsep *nushush syar'iyyah*, teori-teori atau pendapat para *fuqahâ'* dan peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum (*tasyrî'iyah*).

Dalam bagian akhir tesis ini, penulis menyimpulkan antara lain tujuan syari'ah (*maqâshid al-syarî'ah*) adalah untuk menghilangkan kesulitan bagi manusia, mengangkat kemudharatan, mewujudkan nilai kemaslahatan di dunia dan akhirat (*dharûriyyah, hâjiyyah* dan *tahsîniyyah*) dan merealisasikan ikatan janjinya dengan Allah swt yang pernah dibuat.

Pemerintah (*imâm*) berkewajiban dan bertanggung jawab atas efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Pembagian harta zakat pada prinsipnya adalah tuntutan segera (*yaqtadhiy al-faur*) untuk mengatasi kebutuhan pokok (*al-hâjat al-dharûriyyah*) *mustahiq*, tidak boleh ada kesan menunda-nunda kewajiban.

Harta zakat dapat dibagikan kepada salah seorang kelompok *mustahiq* saja dan dapat juga diberikan secara merata kepada delapan *ashnâf* yang disebutkan oleh *nash*. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah tujuan zakat yaitu menyelamatkan dan mewujudkan kemandirian *mustahiq* supaya berkecukupan, mewujudkan pribadi yang bersih dan berdaya guna dalam menjalankan roda kehidupan serta menjaga stabilitas sosial yang berkeselimbangan dan adil.

Zakat bukan hanya sekedar berfungsi untuk membebaskan *muzakkiy* dari kewajiban (*'ibâdah mahdhah*) melainkan memiliki dimensi ekonomi, sosial dan kemanusiaan yang mendalam (*'ibâdah mahdhah*). Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan tetapi harus perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali sistim kerjanya. Maka tidak semua harta zakat itu dihabiskan, namun terlebih dahulu diformulasikannya menjadi karitas manfaat dari produktifitas aset untuk selanjutnya dikonsumsi hasilnya. Artinya ada bagian manfaat lain yang lebih besar, apabila harta zakat yang dikumpulkan itu berupa aset ekonomi, dikelola dan didistribusikan sebagai investasi yang produktif untuk diberikan nilai manfaatnya atau dijadikan modal usaha kepada para *mustahiq*, dan selanjutnya dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha, dan lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang mapan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN DAN DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PEMBatasan MASALAH	16
C. PERUMUSAN MASALAH.....	16
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	17
E. TINJAUAN PUSTAKA	18
F. JUDUL PENELITIAN DAN PENJELASAN ISTILAH	20
G. METODE PENELITIAN	21
H. SISTEMATIKA PENULISAN	25
BAB II KONSEP SYARI'AT ZAKAT	
A. PENGERTIAN ZAKAT	27
1. Pengertian Secara Bahasa	28
2. Pengertian Secara Istilah	28
B. LANDASAN SYARI'AT ZAKAT	34
1. Landasan Al-Qur'an	34
2. Landasan Sunnah	37
3. Landasan Ijma'	39

4. Landasan Historis	40
5. Landasan Logika, Filosofis dan Sosiologis	43
C. SYARAT-SYARAT DAN JENIS HARTA YANG WAJIB DIZAKATKAN.....	45
1. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakatkan	45
2. Jenis-jenis Harta yang Wajib Dizakatkan	48
D. HIKMAH DAN FUNGSI ZAKAT	62
1. Hikmah Zakat	62
2. Fungsi Zakat	65
E. PRINSIP KEPEMILIKAN PADA HARTA ZAKAT	66
F. SASARAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT	73
G. SISTIM PENGELOLAAN ZAKAT	83
BAB III	
TINJAUAN UMUM TERHADAP MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH	
A. PENGERTIAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH.....	101
1. Pengertian <i>Maqâshid</i>	101
2. Istilah Lain dari <i>Maqâshid</i>	102
3. Pengertian <i>Syarî'ah</i>	102
4. Pengertian <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>	104
B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ILMU <i>MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH</i>	111
1. <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> pada Masa Permulaan Islam	112
2. <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> pada Periode <i>Shahâbat</i> dan <i>Tâbi'in</i>	118
3. <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> Pasca <i>Shahâbat</i> dan <i>Tâbi'in</i>	121
C. LANDASAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH.....	126
D. PEMBAGIAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH.....	131
1. <i>Maqâshid Al-Syârî'</i> Ditinjau dari Sumbernya	131
2. <i>Maqâshid Al-Mukallaf</i> Ditinjau dari Skala Prioritasnya	136
3. <i>Muhâfazhah Al-Kulliyyât Al-Khamsah</i>	143
E. METODE DALAM MENGUNGKAPKAN <i>MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH</i>	152
F. STATUS MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DALAM BERHUUJAH	154

BAB IV IMPLEMENTASI *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH*

TERHADAP PENGELOLAAN HARTA ZAKAT SECARA PRODUKTIF

A. <i>MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH</i> PADA ZAKAT	157
1. Dimensi Akidah (إعتقادية)	160
2. Dimensi Spritual Personal (عبودية)	163
3. Dimensi Sosial (إجتماعية)	165
4. Dimensi Ekonomi (اقتصادية)	166
B. PRINSIP PENGELOLAAN HARTA ZAKAT	169
1. Standar <i>Nishab</i> dan Masa Panen (حد النصاب والحصاد)	169
2. Bersih dan berdayaguna (الطهارة والنماء والرِّيع)	172
3. Pelaksanaan zakat merupakan tugas pemerintah (رعاية الراعى فى التوزيع)	177
4. Memberikan kecukupan (حد الكفاية والغنى)	183
5. Mengajarkan prinsip kemandirian (حد الكفاف)	185
6. Menyelamatkan status <i>muzakkiy</i> dan <i>mustahiq</i> sekaligus	188
7. Menjaga stabilitas Sosial	190
C. PANDANGAN ULAMA TENTANG PENGELOLAAN HARTA ZAKAT SECARA PRODUKTIF	192
D. TINJAUAN <i>MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH</i> TERHADAP PENGELOLAAN HARTA ZAKAT SECARA PRODUKTIF	197
1. Tinjauan Terhadap <i>Al-Ammâl Al-Zakawiyah</i>	199
2. Tinjauan Terhadap <i>Mustahiq al-Zakat</i>	200
3. Tinjauan Terhadap Kearnilan (<i>al-Âmilîn 'Alaihâ</i>)	202

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	212
B. SARAN	216

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam adalah aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia, baik secara pribadi, keluarga, maupun masyarakat umum (berbangsa dan bernegara). Aturan Islam adalah aturan yang bersumber dari Allah swt yang kebenarannya bersifat mutlak (*absolut*).

Syari'at Islam diberlakukan oleh Allah swt mencakup seluruh penataan aspek kehidupan, yaitu meliputi penataan *'aqidah*, *'ibadah*, *mu'amalah*, *al-ahwâl al-syakhshiyah*, *al-qadhâya al-mâliyyah wa al-iqtishâdiyyah wa al-idâriyah*, *al-harb wa al-salâm*, *al-hâyat al-khâshshah li al-fard*, dan lain-lain.¹

Dalam Islam, di antara peninggalan-peninggalan ilmu yang paling besar yang dapat diwarisi oleh semua generasi dan telah dibukukan adalah ilmu fiqh. Karena ilmu ini selain merupakan suatu pedoman yang dapat menjaga amalan-amalan manusia (*mukallaf*) dan memberikan arahan yang harus ditempuh dalam ibadah dan muamalah, ilmu fiqh juga menunjukkan jalan yang akan membawa kebahagiaan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat.

Kebahagiaan yang diinginkan syari'at Islam adalah dengan menjaga eksistensi kemaslahatan kehidupan manusia agar senantiasa mendapatkan hak-haknya dan dengan mudah melaksanakan kewajibannya kepada Allah swt. Eksistensi kemaslahatan

¹ Al-Qaththân, *Târikh li Tasyrî' al-Islâmy; al-Tasyrî' wa al-Fiqh*, (Riyadh : Maktabah Al-Ma'ârif, 1417 H/1996 M.), cet. II, hal. 133. Lihat Al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmy*, (Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1986), Juz I, hal. 420.

kehidupan manusia ini terangkum dalam prinsip yang dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khamsah* (panca kepentingan utama)² yaitu :

1. Memelihara agama (*hifzh al-dīn*), dalam rangka memurnikan *‘aqidah islāmīyah* dan agama yang benar. Contohnya adalah Allah swt memerintahkan kaum muslimin agar melaksanakan shalat, puasa, haji, zakat, jihad, dakwah dan lain sebagainya.
2. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), Allah swt melarang segala apa yang akan dapat merusak jiwa seperti pembunuhan, baik membunuh orang lain maupun membunuh diri sendiri (baik secara langsung maupun secara tidak langsung).
3. Memelihara akal (*hifzh al-‘aql*), Allah swt melarang meminum minuman keras dan semua apa yang dapat merusak akal sehat atau psikologi.
4. Memelihara keturunan, keluarga dan kehormatan sekaligus (*hifzh al-nasl wa al-nasab wa al-‘ardh*), Allah swt melegalkan hukum nikah secara *‘arif* dan *‘adil*, sehingga manusia merasakan manfaat berumah tangga (*al-zawâ’*), serta melarang perilaku menyimpang, seperti berzina (*al-fawâhish*) dan memberikan sanksi bagi pelakunya.
5. Memelihara harta (*hifzh al-mâl*), Allah swt menetapkan ketentuan hak kepemilikan harta, sehingga apabila terjadi pelanggaran seperti pencurian maka diberikan sanksi

² Semua ulama sepakat bahwa susunan kelima hal pokok (*al-kulliyat al-khamsah*) yang dimaksud bersifat *ijtihady* bukan *naqly*, sehingga menyebabkan tidak adanya keseragaman di kalangan ulama. Artinya ia disusun berdasarkan *istiqrâ’iy* (induktif). Dalam merangkai kelima *al-kulliyat al-khamsah* ini ada juga yang menyebutnya dengan istilah *al-dharuriyyat al-khamsah*. Kebanyakan ulama membatasi pada lima hal, yaitu *hifzh al-dīn*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-‘aql*, *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-mâl*, tanpa menyebutkan *hifzh al-nasab* dan *hifzh al-‘ardh*. Pembatasan ini di antaranya adalah menurut Imam Al-Ghazaliy, Al-Amidiy dan Al-Syathibiyy, dan yang sependapat dengan mereka,

Sementara ulama mutaakhirin, semisal Nuruddin Mukhtar Al-Khadimiyy, mengklasifikasikan menjadi lima dengan menambahkan dan menggabungkan *hifzh al-nasl*, *hifzh al-nasab* dan *hifzh al-‘ardh* sekaligus. Yang dimaksud di sini adalah memelihara prinsip-prinsip pokok yang bersifat *dharuriyah* bagi kehidupan manusia. Karena tanpa hal tersebut akan dapat mengacau sistim kehidupan manusia (kemaslahatan manusia), atau dapat mengancam terjadinya keburukan dan kerusakan. Lihat Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi, *‘Ilm Al-Maqashid Al-Syari’ah*, (Riyad : Maktabah Al-‘Abikan, 1421 H./2001 M.), Cet. ke-1, hlm. 81-85.

Eksistensi kemaslahatan yang hendak dicapai oleh manusia adalah dalam upaya meraih hak kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus. Kebahagiaan itu hanya tercapai dengan mengupayakan segala cara yang diridhai oleh Allah swt, mencari rizki yang halal (الإلتئاش لإبتغاء مرضات الله) dengan menggunakan sarana nikmat yang telah disediakan.

[illegible]

³ Al-Syathibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut : Dar al-Ma'arif, 1975), juz I, hal. 3-4. Lihat Al-Ghazali, *al-Mustashfa Li Ilm al-Ushul*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), hal. 286-287.

bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus”.

Syari'at zakat⁴, apabila ditinjau dari sudut pandang ekonomi merupakan wujud perlindungan dasar kebutuhan sehari-hari bagi manusia, dalam upaya pemenuhan batasan kebutuhan paling rendah (تحقيق الحاجات الضرورية للمجتمع) yang mesti ada pada aturan ekonomi yang berimbang dalam masyarakat


⁴ Zakat bukan hanya syari'at Nabi Muhammad saw. Zakat sudah dikenal dalam risalah agama samawiyah, seperti pada masa Nabi Isa as dan Ismail as (QS. Maryam (19) : 30-31 dan 54-55), begitu juga pada masa Nabi-nabi lainnya, seperti Nabi Ibrahim as, Ishaq as, Ya'qub as (QS. Al-Anbiya' (21) : 72-73), hingga Nabi Musa as (QS. Al-Maidah (5) : 12), termasuk juga secara umum ibadah zakat disyari'atkan kepada ahlul kitab, seperti disebutkan dalam surat al-Bayyinah (98) : 4-5.


Pensyari'atan zakat ini menjadi satu rangkaian dengan ibadah shalat yang terjadi sejak Nabi Muhammad saw berada di Makkah, namun pada saat itu belum secara tegas menyatakan kewajiban zakat, umumnya hanya bersifat umum, belum ada ketentuan secara detail hukum dan jenis harta yang wajib dizakatkan serta batasan nisab dan kadar zakat yang akan dikeluarkan. Semua diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati dan rasa tanggung jawab seseorang terhadap orang lain. Pada periode Makkah ini kondisi ummat Islam secara sosiologis merupakan kelompok minoritas yang sering tertindas. Mereka tidak memiliki kekayaan dan harta benda yang melimpah, kecuali kekuatan iman dan Islam yang melekat pada jiwa. Ayat al-Qur'an pada waktu itu misalnya bercerita tentang hak fakir miskin, ketentraman dan kebahagiaan bagi orang yang menunaikan zakat, menyantuni anak yatim dan pembebasan budak. Oleh karena itu pada periode Makkah ayat-ayatnya tidak menggunakan *shighat amr* (perintah tegas) seperti dalam QS. Al-Ruum (30) : 39 ; QS. Al-Mukminun (23) : 1-4 ; QS. Al-Naml (27) : 1-3 ; QS. Al-Balad (90) : 11-16 ; QS. Luqman (31) : 2-4 dan QS Al-Ma'un (107) : 1-3.


Berbeda dengan kondisi ketika periode Madinah, secara politis ummat Islam sudah memiliki kekuatan yang mandiri. Ummat Islam sudah mendirikan negara sendiri, menerapkan hukum sendiri dan memiliki wilayah sendiri. Mereka terdiri atas penguasa, pemilik tanah, pedagang dan sebagainya. Pada kondisi ini ummat Islam memerlukan pranata untuk mengikat dan memperkuat kesatuan politik yang telah terbentuk itu. Maka ayat Madaniyyah tentang zakat mulai terlihat unsur kewajibannya yang merupakan bagian dari mekanisme untuk merekatkan kesatuan politik.


Di sisi lain juga, zakat merupakan aset pendapatan negara yang sangat berarti bagi kelangsungan pemerintahan. Dari zakat dapat terkumpul dana besar yang bisa didayagunakan untuk kepentingan negara. Dalam konteks ini, maka zakat menjadi tulang punggung perekonomian negara. Pada tahun ke dua hijriyyah, turun ayat dengan aturan yang lebih khusus dan mustahik zakat pada saat itu hanya terbatas pada dua kalangan fakir dan miskin, kendati ada juga dari selain kalangan fakir dan miskin yang meminta-minta zakat, kadang dikabulkan oleh Rasulullah dan kadang tidak setelah mencermati kondisi si peminta (QS. Al-Baqarah (2) : 271 dan QS. Al-Taubah (9) : 58. Dan ini berlangsung hingga tahun ke sembilan hijriyyah. Setelah itu barulah turun QS. Al-Taubah (9) : 60 yang menetapkan bahwa mustahik zakat itu tidak lagi terbatas pada fakir dan miskin, tetapi termasuk juga amil, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang terliit utang, untuk perjuangan di jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan. Dalam prakteknya, Nabi tidak membagi rata hasil zakat tersebut kepada delapan ashnaf itu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Secara eksplisit, Islam menentang akumulasi harta kekayaan oleh kelompok tertentu dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan terciptanya jurang pemisah antara orang kaya dengan orang fakir atau miskin, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an :









 (سورة الحشر : 59\7)

Artinya : “... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.

Ayat tersebut di atas menekankan adanya sebuah proses regulasi harta secara berimbang. Peredaran harta sebagai modal dalam aktivitas perekonomian merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Akumulasi harta pada kelompok tertentu dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Hal inilah yang terjadi dalam realitas kontemporer. Di mana, pemilik modal berupaya semaksimal mungkin mengakumulasi modal menjadi motif ekonomi yang mendasari aktivitas mereka di pasar. Modal dan harta tersebut menjadi senjata ekonomi untuk memperkaya diri. Akibatnya, masyarakat kelas menengah-bawah, yang tidak memiliki modal, menjadi golongan yang tertindas dalam sistem kapitalis yang menghegemoni institusi ekonomi kontemporer.

Persoalan kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran dan krisis ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, hubungan kemasyarakatan dan kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab bersama. Apabila masalah ini tidak dapat diselesaikan maka akan muncul bahaya yang semakin hari

semakin meluas dan berdampak buruk bagi kehidupan individu masyarakat, keluarga dan juga masyarakat secara umum.

Salah satu nilai instrumen ekonomi yang strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi dalam Islam adalah peralihan kekayaan melalui zakat.⁵ Zakat merupakan salah satu tata hubungan (*washīlah*) yang menghubungkan manusia (hamba) secara *vertikal* kepada Allah swt (*ḥablun min Allāh*), serta menjembatannya secara *horizontal* (sesama manusia) agar ada keseimbangan dan stabilitas sosial ekonomi pada ummat (*ḥablun min al-nās*).

Nilai strategi zakat di satu sisi merupakan panggilan agama yang merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Apabila dasar keimanan ini diteruskan, maka sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Karena orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis karena telah membayarnya setiap tahun atau periode waktu yang lain ia akan terus membayarnya. Di sisi lain, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Zakat pada hakikatnya merupakan bagian dari peraturan Islam tentang keharta bendaan dan kemasyarakatan (*nizhām al-Islām fi al-mâliy wa al-ijtimâ'iy*). Dari segi inilah ia dibahas dalam kitab *al-siyâsah al-syarī'ah al-mâliyah*. Adapun disebutkan dalam bab ibadah adalah karena ia menjadi “saudara kandung” dari shalat.⁶ Dengan demikian,

⁵ Nilai instrumen ekonomi Islam itu ada lima, yaitu ; zakat, pelarangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peranan pemerintah (artinya peranan pada aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber daya dan dana, pemerataan pendapatan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi).

⁶ Al-Qaradhâwiy, *Fiqh al-Zakâh*, (Beirut : Muassasah al-Risâlah, 1414 H/1994 M.), Juz I, hlm. 7.

ibadah zakat menjadi diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman (*ma'lûmun min al-dîn bi al-dharûrah*).⁷

Zakat merupakan *'ibadah maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan pendapatan (rizki) Allah swt. Melaksanakan syari'at zakat juga merupakan bukti ketauhidan, *'ubûdiyyah*, solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Dalam konteks kenegaraan, memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini harus senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup tercapainya suasana kehidupan yang aman, agamis, dinamis, seimbang dan merata dalam pemenuhan hak. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali potensi zakat dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan agama.

Kesempurnaan keislaman seseorang diukur berdasarkan pada ketaatannya terhadap segala aturan Allah swt. Seorang mukallaf tidak dibenarkan memilih-milih perintah atau larangan tertentu untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Syari'ah Islam memiliki keistimewaan tersendiri baik dalam kebaikan susunannya maupun dalam sistim aturannya. Walaupun demikian kalau tidak terlaksana secara totalitas maka akan bernilai

⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung : Mizan, 1995), cet. ke-3, hlm. 231.

Apabila ditelusuri dalam al-Qur'an, maka akan banyak ditemukan ayat yang mendorong supaya manusia konsisten dalam mentaati Allah swt dan Rasul-Nya, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4) ayat 59 yang berbunyi :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

𐤀・①𐤁② ③◆◆𐤄𐤅𐤆𐤇𐤈◆◆𐤉𐤊𐤋𐤌𐤍𐤎𐤏𐤐𐤑𐤒𐤓𐤔𐤕𐤖𐤗𐤘𐤙𐤚𐤛𐤜𐤝𐤞𐤟𐤠𐤡𐤢𐤣𐤤𐤥𐤦𐤧𐤨𐤩𐤪𐤫𐤬𐤭𐤮𐤯𐤰𐤱𐤲𐤳𐤴𐤵𐤶𐤷𐤸𐤹𐤺𐤻𐤼𐤽𐤾𐤿𐥀𐥁𐥂𐥃𐥄𐥅𐥆𐥇𐥈𐥉𐥊𐥋𐥌𐥍𐥎𐥏𐥐𐥑𐥒𐥓𐥔𐥕𐥖𐥗𐥘𐥙𐥚𐥛𐥜𐥝𐥞𐥟𐥠𐥡𐥢𐥣𐥤𐥥𐥦𐥧𐥨𐥩𐥪𐥫𐥬𐥭𐥮𐥯𐥰𐥱𐥲𐥳𐥴𐥵𐥶𐥷𐥸𐥹𐥺𐥻𐥼𐥽𐥾𐥿𐧀𐧁𐧂𐧃𐧄𐧅𐧆𐧇𐧈𐧉𐧊𐧋𐧌𐧍𐧎𐧏𐧐𐧑𐧒𐧓𐧔𐧕𐧖𐧗𐧘𐧙𐧚𐧛𐧜𐧝𐧞𐧟𐧠𐧡𐧢𐧣𐧤𐧥𐧦𐧧𐧨𐧩𐧪𐧫𐧬𐧭𐧮𐧯𐧰𐧱𐧲𐧳𐧴𐧵𐧶𐧷𐧸𐧹𐧺𐧻𐧼𐧽𐧾𐧿𐨀𐨁𐨂𐨃𐨄𐨅𐨆𐨇𐨈𐨉𐨊𐨋𐨌𐨍𐨎𐨏𐨐𐨑𐨒𐨓𐨔𐨕𐨖𐨗𐨘𐨙𐨚𐨛𐨜𐨝𐨞𐨟𐨠𐨡𐨢𐨣𐨤𐨥𐨦𐨧𐨨𐨩𐨪𐨫𐨬𐨭𐨮𐨯𐨰𐨱𐨲𐨳𐨴𐨵𐨶𐨷𐨹𐨺𐨸𐨻𐨼𐨽𐨾𐨿𐩀𐩁𐩂𐩃𐩄𐩅𐩆𐩇𐩈𐩉𐩊𐩋𐩌𐩍𐩎𐩏𐩐𐩑𐩒𐩓𐩔𐩕𐩖𐩗𐩘𐩙𐩚𐩛𐩜𐩝𐩞𐩟𐩠𐩡𐩢𐩣𐩤𐩥𐩦𐩧𐩨𐩩𐩪𐩫𐩬𐩭𐩮𐩯𐩰𐩱𐩲𐩳𐩴𐩵𐩶𐩷𐩸𐩹𐩺𐩻𐩼𐩽𐩾𐩿𐪀𐪁𐪂𐪃𐪄𐪅𐪆𐪇𐪈𐪉𐪊𐪋𐪌𐪍𐪎𐪏𐪐𐪑𐪒𐪓𐪔𐪕𐪖𐪗𐪘𐪙𐪚𐪛𐪜𐪝𐪞𐪟𐪠𐪡𐪢𐪣𐪤𐪥𐪦𐪧𐪨𐪩𐪪𐪫𐪬𐪭𐪮𐪯𐪰𐪱𐪲𐪳𐪴𐪵𐪶𐪷𐪸𐪹𐪺𐪻𐪼𐪽𐪾𐪿𐫀𐫁𐫂𐫃𐫄𐫅𐫆𐫇𐫈𐫉𐫊𐫋𐫌𐫍𐫎𐫏𐫐𐫑𐫒𐫓𐫔𐫕𐫖𐫗𐫘𐫙𐫚𐫛𐫜𐫝𐫞𐫟𐫠𐫡𐫢𐫣𐫤𐫦𐫥𐫧𐫨𐫩𐫪𐫫𐫬𐫭𐫮𐫯𐫰𐫱𐫲𐫳𐫴𐫵𐫶𐫷𐫸𐫹𐫺𐫻𐫼𐫽𐫾𐫿𐬀𐬁𐬂𐬃𐬄𐬅𐬆𐬇𐬈𐬉𐬊𐬋𐬌𐬍𐬎𐬏𐬐𐬑𐬒𐬓𐬔𐬕𐬖𐬗𐬘𐬙𐬚𐬛𐬜𐬝𐬞𐬟𐬠𐬡𐬢𐬣𐬤𐬥𐬦𐬧𐬨𐬩𐬪𐬫𐬬𐬭𐬮𐬯𐬰𐬱𐬲𐬳𐬴𐬵𐬶𐬷𐬸𐬹𐬺𐬻𐬼𐬽𐬾𐬿𐭀𐭁𐭂𐭃𐭄𐭅𐭆𐭇𐭈𐭉𐭊𐭋𐭌𐭍𐭎𐭏𐭐𐭑𐭒𐭓𐭔𐭕𐭖𐭗𐭘𐭙𐭚𐭛𐭜𐭝𐭞𐭟𐭠𐭡𐭢𐭣𐭤𐭥𐭦𐭧𐭨𐭩𐭪𐭫𐭬𐭭𐭮𐭯𐭰𐭱𐭲𐭳𐭴𐭵𐭶𐭷𐭸𐭹𐭺𐭻𐭼𐭽𐭾𐭿𐮀𐮁𐮂𐮃𐮄𐮅𐮆𐮇𐮈𐮉𐮊𐮋𐮌𐮍𐮎𐮏𐮐𐮑𐮒𐮓𐮔𐮕𐮖𐮗𐮘𐮙𐮚𐮛𐮜𐮝𐮞𐮟𐮠𐮡𐮢𐮣𐮤𐮥𐮦𐮧𐮨𐮩𐮪𐮫𐮬𐮭𐮮𐮯𐮰𐮱𐮲𐮳𐮴𐮵𐮶𐮷𐮸𐮹𐮺𐮻𐮼𐮽𐮾𐮿𐯀𐯁𐯂𐯃𐯄𐯅𐯆𐯇𐯈𐯉𐯊𐯋𐯌𐯍𐯎𐯏𐯐𐯑𐯒𐯓𐯔𐯕𐯖𐯗𐯘𐯙𐯚𐯛𐯜𐯝𐯞𐯟𐯠𐯡𐯢𐯣𐯤𐯥𐯦𐯧𐯨𐯩𐯪𐯫𐯬𐯭𐯮𐯯𐯰𐯱𐯲𐯳𐯴𐯵𐯶𐯷𐯸𐯹𐯺𐯻𐯼𐯽𐯾𐯿𐰀𐰁𐰂𐰃𐰄𐰅𐰆𐰇𐰈𐰉𐰊𐰋𐰌𐰍𐰎𐰏𐰐𐰑𐰒𐰓𐰔𐰕𐰖𐰗𐰘𐰙𐰚𐰛𐰜𐰝𐰞𐰟𐰠𐰡𐰢𐰣𐰤𐰥𐰦𐰧𐰨𐰩𐰪𐰫𐰬𐰭𐰮𐰯𐰰𐰱𐰲𐰳𐰴𐰵𐰶𐰷𐰸𐰹𐰺𐰻𐰼𐰽𐰾𐰿𐱀𐱁𐱂𐱃𐱄𐱅𐱆𐱇𐱈𐱉𐱊𐱋𐱌𐱍𐱎𐱏𐱐𐱑𐱒𐱓𐱔𐱕𐱖𐱗𐱘𐱙𐱚𐱛𐱜𐱝𐱞𐱟𐱠𐱡𐱢𐱣𐱤𐱥𐱦𐱧𐱨𐱩𐱪𐱫𐱬𐱭𐱮𐱯𐱰𐱱𐱲𐱳𐱴𐱵𐱶𐱷𐱸𐱹𐱺𐱻𐱼𐱽𐱾𐱿𐲀𐲁𐲂𐲃𐲄𐲅𐲆𐲇𐲈𐲉𐲊𐲋𐲌𐲍𐲎𐲏𐲐𐲑𐲒𐲓𐲔𐲕𐲖𐲗𐲘𐲙𐲚𐲛𐲜𐲝𐲞𐲟𐲠𐲡𐲢𐲣𐲤𐲥𐲦𐲧𐲨𐲩𐲪𐲫𐲬𐲭𐲮𐲯𐲰𐲱𐲲𐲳𐲴𐲵𐲶𐲷𐲸𐲹𐲺𐲻𐲼𐲽𐲾𐲿𐳀𐳁𐳂𐳃𐳄𐳅𐳆𐳇𐳈𐳉𐳊𐳋𐳌𐳍𐳎𐳏𐳐𐳑𐳒𐳓𐳔𐳕𐳖𐳗𐳘𐳙𐳚𐳛𐳜𐳝𐳞𐳟𐳠𐳡𐳢𐳣𐳤𐳥𐳦𐳧𐳨𐳩𐳪𐳫𐳬𐳭𐳮𐳯𐳰𐳱𐳲𐳳𐳴𐳵𐳶𐳷𐳸𐳹𐳺𐳻𐳼𐳽𐳾𐳿𐴀𐴁𐴂𐴃𐴄𐴅𐴆𐴇𐴈𐴉𐴊𐴋𐴌𐴍𐴎𐴏𐴐𐴑𐴒𐴓𐴔𐴕𐴖𐴗𐴘𐴙𐴚𐴛𐴜𐴝𐴞𐴟𐴠𐴡𐴢𐴣𐴤𐴥𐴦𐴧𐴨𐴩𐴪𐴫𐴬𐴭𐴮𐴯𐴰𐴱𐴲𐴳𐴴𐴵𐴶𐴷𐴸𐴹𐴺𐴻𐴼

Pada zaman Nabi dan para Khalifah (*khulafâ al-râsyidîn*), zakat merupakan suatu lembaga Negara. Sehingga menjadi kewajiban Negara untuk menghitung kewajiban zakat

Apabila diperhatikan, praktek yang dilakukan oleh Nabi saw dan *Khulafâ al-Râsyidîn* di atas, terlihat bahwa pelaksanaan zakat mesti dilakukan secara proaktif, dinamis dan efektif melalui kewenangan pemerintah (Negara), dalam hal ini adalah legalitas keberadaan amil zakat. Artinya, beban perintah pelaksanaan zakat ini ditujukan kepada amil zakat (*al-âmilîn 'alaihâ*). Oleh karena itu, maka amil zakat tidak boleh bersifat pasif karena ia mendapat porsi khusus yang sah berdasarkan ayat al-Qur'an :

Artinya : “Sesungguhnya harta zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

1. *Katabah*; orang yang diberikan tugas untuk mendata para wajib zakat.

2. *Hasabah*; orang yang diberi tugas untuk menaksir dan menghitung zakat.
3. *Jubah*; orang yang diberi tugas untuk mengambil zakat dari muzakki.
4. *Khazanah*; orang yang diberi tugas untuk menghimpun/memelihara harta zakat.
5. *Qasamah*; orang yang diberi tugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik.⁸

Berkenaan dengan praktek sejarah keamiran pada masa Nabi Muhammad saw terdapat dalam suatu riwayat mengatakan sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ⁹

Artinya : "Dari Ibnu Abbas, bahwa Mu'adz berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku. Beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menta'atimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu pada setiap siang dan malam. Jika mereka menta'atimu untuk hal tersebut maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka menta'atimu untuk hal tersebut maka kamu jauhilah harta mulia mereka. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah".

⁸ Abudin Nata, et.al., *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/Sedekah*, (Jakarta : BAZIS DKI Jakarta, 1999), hlm. 90.

⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Nail Al-Authar*, (Dar al-Fikr, t.th.), Jilid III, hlm. 170. Lihat Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan'ani, *Subul Al-Salam Syarah Bulugh Al-Maram Min Jami' Adillat Al-Ahkam*, (Bandung : Maktabah dahlani, t.th.), Juz II, hlm. 120.

Para amil zakat itu sesungguhnya mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan yang berat. Semua tugas dan pekerjaan itu berhubungan dengan pengaturan tentang zakat, yaitu :

1. Pendataan terhadap orang-orang yang wajib zakat (*muzakkiy*).
2. Pendataan terhadap jenis zakat yang diwajibkan atas mereka.
3. Pendataan terhadap nominal (besar) zakat yang wajib mereka keluarkan zakanya.
4. Pendataan terhadap mustahik zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta berapa biaya yang dapat mencukupi hidupnya.
5. Termasuk di dalamnya urusan pemberdayaan zakat.
6. Dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta pembantunya.

Sehingga berdasarkan perincian di atas, maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi urusan pokok amil zakat ada dua macam yaitu, *pertama*, urusan pengumpulan (*penghimpunan*) zakat, dan *kedua*, urusan pendistribusian zakat,¹⁰

Dikarenakan beratnya tugas yang dipikul serta beratnya tanggung jawab amil, maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, telah mengatur organisasi Pengelolaan zakat dalam wadah Badan Amil Zakat (BAZ), sebagai mana diatur di dalam Bab III pasal 6 sebagai berikut :

Pasal 6 :

1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Pembentukan Badan Amil Zakat :
 - a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri;

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh I-Zakah*, Juz I, op. cit., hlm. 580-581.

- b. Daerah provinsi oleh Gubernur atas usulan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
- c. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota;
- d. Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.¹¹

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah menganut agama Islam, namun kewajiban zakat tidak terlaksana dengan lancar. Paling tidak ada dua penyebab mengapa pelaksanaannya belum maksimal :

1. Karena para wajib zakat (*muzakkiy*) belum sadar pada kewajiban agamanya,
2. Mereka sudah sadar tetapi enggan karena tidak percaya penuh pada panitia pengumpul zakat yang ada.

Minimnya kesadaran berzakat, infaq dan shadaqah pada ummat Islam disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya adalah pengaruh sosial politik yang diwariskan penjajah. Pada masa penjajahan dan masa transisi (pasca kemerdekaan) Pengelolaan zakat hanya ditangani oleh amil dalam pengertian perorangan (*individu*) misalnya pada figur seorang ulama, kiyai, ustadz dan berpusat pada masjid, sementara dalam pelaksanaannya hanya bersifat temporer (musiman) dan pasif karena dibentuk hanya pada bulan suci Ramadhan menjelang hari raya 'Idul Fitri. Pelaksanaan zakat tidak dilaksanakan dalam bentuk organisasi seperti dicontohkan pada masa Rasulullah saw.

Pemikiran ini dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu karena mereka tahu betul bahwa apabila zakat benar-benar dikelola secara profesional dengan sistem organisasi dan administrasi yang baik akan dapat menghimpun dana yang

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III Pasal 6.

sangat besar dan potensial untuk melawan mereka (pemerintah Hindai Belanda). Akibatnya, hingga pada masyarakat modern saat ini pun masih terdapat ummat yang tidak dapat membedakan antara pengertian hukum, *nishâb*, *haul*, kadar zakat harta dan zakat fitrah. Seseorang yang mempunyai kekayaan dikira hanya cukup berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, sementara zakat harta terabaikan. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi secara intensif yang mengarah pada implementasi pengertian dan Pengelolaan zakat agar sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.¹²

Untuk merealisasikan agenda tersebut, setidaknya diperlukan sejumlah agenda taktis yang saling terkait. Agenda taktis yang mesti dilakukan adalah :

1. Transparansi dan amil yang akuntabel. Dengan transparansi dan amil yang akuntabel diharapkan tingkat pengumpulan zakat dapat lebih maksimal.
2. Pencerdasan *muzakkiy*. Disadari bersama, bahwa para *muzakkiy* belum banyak memahami tentang hakikat penunaian zakat. Selama ini, zakat hanya difahami sebatas zakat fitrah, sehingga potensi ketersediaan zakat maal, yang jumlahnya mayoritas belum tergarap.
3. Instrumen formal dari regulasi zakat yang mendukung. Langkah yang paling memungkinkan adalah dilakukannya regulasi tentang kewajiban zakat bagi *muzakkiy*.
4. Program pemberdayaan UMK (usaha mikro dan kecil) terpadu. Dari dana zakat yang terkumpul, kemudian dialokasikan bagi tambahan modal kepada UMK. Modal UMK dari dana zakat ini dapat menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan dengan regulasi modal dalam pinjaman konvensional. Karena, modal usaha dari dana zakat

¹² Abudin Nata, *op.cit.*, hlm. 91-92.

tidak ditujukan untuk menarik keuntungan dari dana yang digulirkan. Sehingga, pelaku UMK dapat lebih ringan dalam mengembangkan usahanya.

5. Membentuk lembaga zakat yang fokus pada advokasi kebijakan publik dalam hal pemberdayaan UMK. Diakui atau tidak, keberadaan lembaga advokasi dalam ranah kontemporer menjadi sangat penting. Dengan keberadaan lembaga advokasi ini, maka kebijakan pemerintah akan dapat lebih terarahkan dan berpihak pada pemberdayaan UMK. Jika sebelumnya dana zakat disalurkan langsung sebagai sarana konsumtif. Maka, dalam agenda ini, zakat dialokasikan secara produktif sebagai modal bagi UMK dalam pengembangan usahanya.

Berkaitan dengan pendistribusian harta zakat, pada umumnya dilaksanakan dengan cara pemenuhan kebutuhan konsumtif jangka pendek. Padahal cara ini dilihat secara substansial kurang menyentuh akar permasalahan para mustahik zakat, karena hanya membantu kebutuhan mereka sesaat.

Namun, perkembangan yang terjadi saat ini ada kecenderungan para Lembaga atau Amil Zakat mengelola dan memberikan harta zakat secara produktif. Sehingga dengan demikian dalam kajian fiqh zakat kontemporer memproduktifkan harta zakat sudah menjadi permasalahan sangat penting dan serius untuk segera dijawab secara tuntas.

Secara umum, praktek yang dilakukan oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat dalam mengelola harta zakat yang dikumpulkan, sebelum dibagikan kepada *mustahiq*nya dikelola terlebih dahulu menjadi aset produktif. Setelah mendatangkan hasil, baru hasil atau manfaat pengembangan harta zakat itu diberikan kepada *mustahiq*, seperti memfasilitasi mustahik (orang fakir miskin) berobat secara gratis melalui Rumah Sakit yang dibangun dari sumber harta zakat. Atau adakalanya Badan atau Lembaga Amil Zakat

secara langsung memberikan harta zakat itu namun berupa bentuk lain dari jenis harta zakat yang dikumpulkan, yaitu berupa modal produktif untuk dikembangkan sendiri oleh *mustahiqnya*.

Model pendistribusian secara produktif ini yang dilaksanakan oleh Lembaga atau Badan Amil Zakat bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya dengan menjalin kerja sama kemitraan dengan BMT dan BPRS binaan yang menyebar di berbagai daerah, bentuk program itu di antaranya adalah : ¹³

1. Pemberian hibah ; sebagai modal usaha tanpa ada ikatan untuk mengembalikan modal, seperti usaha pertanian, usaha jualan dan lain-lain.
2. Pemberian dana bergulir berupa pinjaman lunak ; seperti memberikan modal usaha dengan akad *qardh al-hasan*.
3. Sistem akad *mudhârabah* atau *musyârah*, dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal.
4. Melalui kegiatan UHT (Usaha Hasil Tani), dengan cara menyediakan ketersediaan beras dengan harga terjangkau.
5. Layanan Sosial (*charity*), dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis seperti program LKC (Layanan Kesehatan Cuma-cuma) dan bantuan bencana alam.
6. Pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.¹⁴
7. Termasuk juga misalnya usaha peternakan mandiri (salah satu program unggulan Swadaya Ummah Riau).

¹³ Cara ini dipraktekkan oleh salah satu Lembaga Amil Zakat di Indonesia, yaitu Dompot Dhu'afa Republika Jakarta. Lihat Khairul Amri, *Dompot Dhu'afa Republika; Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan ZIS*, Tesis PPs IAIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2000, tidak diterbitkan), hlm. 89.

¹⁴ Khairul Amri, *op.cit.*, hlm. 89-92.

Berkaitan dengan permasalahan pendistribusian harta zakat secara produktif di atas, apabila ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip dasar syari'at zakat, maka menjadi permasalahan menarik untuk dicari argumentasi syara'hya, apakah diperbolehkan ataukah menyimpang dari prinsip syari'at zakat ?. Atau apabila diperbolehkan mengelola dan mendistribusikan harta zakat secara produktif, apa yang menjadi dasar hukumnya ?. Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikupas dalam penelitian tesis dengan mengangkat judul ; *Pengelolaan Zakat Mâl Secara Produktif Perseptif Maqâshid al-Syarî'ah*.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi penelitian tesis ini pada tiga sub pembahasan yang akan dikaji, yaitu :

1. Pandangan *fuqahâ'* terhadap Pengelolaan zakat mal secara produktif.
2. Argumentasi *fuqahâ'* terhadap Pengelolaan zakat mal secara produktif.
3. Tinjauan *maqâshid al-syarî'ah* terhadap Pengelolaan zakat mal secara produktif.

C. Perumusan Masalah

Dalam rangka memperoleh hasil penulisan yang baik dan memenuhi syarat penulisan karya ilmiah serta untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka dalam tesis ini diperlukan adanya perumusan masalah.

Perumusan masalah dalam suatu karangan ilmiah merupakan hal yang penting agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan permasalahan yang akan dibuat

penulisannya, demikian pula data sampel yang dicari dapat diperoleh dalam penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁵

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan *fuqahâ'* terhadap pengelolaan harta zakat mal secara produktif?.
2. Apa argumentasi *fuqahâ'* terhadap pengelolaan zakat mal secara produktif ?.
3. Bagaimana tinjauan *maqâshid al-syarî'ah* terhadap pengelolaan zakat mal secara produktif ?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti. Adapun tujuan ini diperlukan adalah untuk memberi petunjuk tuntunan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan pandangan *fuqahâ'* terhadap pengelolaan harta zakat mal secara produktif.
2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan argumentasi *fuqahâ'* terhadap pengelolaan zakat mal secara produktif.
3. Untuk mengetahui dan mengungkapkan tinjauan *maqâshid al-syarî'ah* terhadap pengelolaan zakat mal secara produktif.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 13.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi amil zakat (Badan atau Lembaga Amil Zakat yang ada saat ini) dalam melaksanakan Pengelolaan zakat supaya lebih berdaya guna.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penulis, para peneliti dan civitas akademika dalam upaya menambah khazanah keilmuan tentang penerapan syari'at zakat.
3. Sebagai bahan penyuluhan pada masyarakat umum agar dapat lebih memahami kewajiban zakat sehingga tidak ada lagi ketimpangan pemahaman kewajiban zakat maal dan zakat fitrah, dan dapat memfasilitasikan kewajiban zakat mereka melalui Badan atau Lembaga Amil Zakat yang profesional dan proporsional, serta berperan aktif mengawasi pelaksanaan tugas kelembagaan zakat tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian sebelumnya, ulasan dan penelitian mengenai konsep zakat dalam literatur keislaman telah banyak mengupas permasalahan tentang zakat, yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh para ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer.

Secara spesifik, ulama klasik di antaranya Abu Ubaid, dalam bukunya *Al-Arwâḥ*, mengupas konsep dan prinsip-prinsip pengelolaan harta termasuk konsep zakat yang diterapkan dalam Islam mulai dari zaman Nabi, sahabat hingga tabi'in.

Ulama madzhab (*Hanâfiyah*, *Mâlikiyyah*, *Syâfi'iyyah* dan *Hanâbilah*) dalam masing-masing kitab fiqh mereka, memasukkan secara khusus bab zakat, dan menguraikannya secara sistimatis dengan mengemukakan bagaimana konsep zakat menurut al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.

Abdullah bin Manshur Al-Ghâfiliy, dalam kitabnya *Nawâzil Al-Zakâh* juga secara spesifik membahas fiqh zakat. Ia memberikan kontribusi yang spektakuler berkisar pembaharuan fiqh zakat (*fiqh zakat kontemporer*) dengan menganalisa berdasarkan pendekatan komparatif *madzhab*.

Ulama kontemporer lainnya yang secara spesifik membahas tentang zakat di antaranya adalah Yusuf al-Qaradhawiy. Ia membahas secara khusus mengenai seluk-beluk syari'at zakat dalam bukunya yang berjudul *Fiqh al-Zakâh*. Bukunya ini secara filosofis mengupas persoalan zakat dari segala bidang, dan telah menjadi rujukan standar dalam permasalahan zakat.

Secara umum, melalui telaah kepustakaan, penulis melakukan pelacakan terhadap tulisan-tulisan yang pernah dipublikasikan sebelumnya tentang konsep zakat, atau yang tidak dipublikasikan, ternyata tema zakat cukup mendapat perhatian khusus bagi kalangan ulama, akademisi dan peneliti. Sehingga pembahasan tentang zakat akan selalu mendapat perhatian dalam berbagai sudut pandang.

Secara spesifik tentang judul yang penulis tawarkan yaitu *Pengelolaan Zakat Mâl Secara Produktif Perseptif Maqâshid al-Syari'ah*, belum ada yang menelitinya. Untuk itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, bagaimana sistim Pengelolaan zakat mal secara produktif ditinjau dari perseptif *maqâshid al-syari'ah*.

F. Judul Penelitian dan Penjelasan Istilah

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa tesis ini diberi judul "*Pengelolaan Zakat Mal Secara Produktif Perseptif Maqâshid Al-Syarî'ah*". Guna memberikan pemahaman dari maksud penelitian tesis ini maka perlu penulis paparkan beberapa kata kunci berikut ini :

Kata "Pengelolaan", dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan berasal dari kosa kata "kelola", yang berarti "laku, cara (melakukan sesuatu), akal (daya upaya), perbuatan". Apabila kata ini mendapat imbuhan awalan "pe" dan akhiran "an", maka menjadi kata "pengelolaan", maka artinya adalah "proses, cara, perbuatan pengelola", artinya, "upaya menggerakkan sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang lain (menjadi sempurna, dan lain-lain)".¹⁶ Sehingga dikatakan, istilah "pengelolaan" (*management*) bermakna proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain.

Kata "zakat mal", terdiri dari dua kata yaitu kata "zakat" dan "mal", yaitu ibadah yang berkaitan dengan mengeluarkan sebagian harta benda sebagai bentuk ketaatan karena Allah. Dalam Islam tentang ketentuan ibadah zakat itu ada dua macam, yaitu zakat mal (zakat harta kekayaan) dan zakat fitrah (zakat konsumsi individu di saat bulan atau

¹⁶ W.J.S. Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), Edisi III, Cet. ke-3, hlm. 808.

akhir bulan ramadhan). Adapun yang penulis maksud dalam penelitian tesis ini adalah berfokus pada permasalahan “zakat mal (zakat harta kekayaan)”.

Kata “produktif”, juga dalam kamus bahasa indonesia dijelaskan, artinya adalah “banyak mendatangkan hasil”. Sementara, kata “perspektif”, dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan maknanya adalah “berhubungan dengan pengertian (cepat dimengerti), penerimaan, atau tanggapan”.¹⁷ Yaitu sudut pandang atau pandangan dalam melihat sesuatu, sehingga mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar.

Sedangkan “*maqâshid al-syari’ah*” adalah salah satu teori *ushuliyah* yang dikembangkan oleh para ulama *ushul*, yang secara umum maknanya adalah tujuan pokok disyariatkannya suatu hukum. Dengan kata lain, mengutip pendapat al-Syathibiy *maqâshid al-syari’ah* mestilah mencakup pada nilai kemaslahatan secara utuh di dunia dan akhirat, sehingga ia mengatakan dalam kitabnya :

وَضَعَ الشَّرَائِعَ إِنَّمَا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا¹⁸

Artinya : “Mewujudkan segala nilai kemaslahatan manusia untuk kehidupan di dunia dan di akhirat sekaligus”.

Jadi, maksud dari penelitian ini adalah berupaya mengungkapkan secara komprehensif bagaimana pengelolaan harta zakat mal secara produktif (lebih banyak mendatangkan hasil dan manfaat, baik bagi *muzakkiy* maupun bagi *mustahiq* zakat) ditinjau berdasarkan teori *maqâshid al-syari’ah*.

G. Metode Penelitian

¹⁷ Purwadarminta, *op.cit.*, hlm. 880-881.

¹⁸ Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*, (t.t. : 1395 H./1975 M.), Juz II, hlm. 6.

Langkah penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang diteliti melalui pendekatan pemikiran yang kritis dan akurat. Penelitian juga dapat diartikan sebagai pencarian yang terus menerus terhadap sesuatu yang diteliti. Berdasarkan hal itu maka metode penelitian yang dipakai harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Dalam menyusun tesis ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum. Hal ini dimaksudkan dalam upaya menelusuri temuan-temuan baru tentang fenomena permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat, kemudian dikaji berdasarkan argumentasi hukum yang *masyrû'iyah*.

1. Jenis dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini memusatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), maka jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang sepenuhnya diperoleh dari berbagai sumber tertulis (klasik maupun kontemporer) yang membahas tentang judul yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

a. Data primer

Data primer yang kumpulkan adalah dengan cara menelusuri, mengumpulkan dan menela'ah kitab-kitab yang membahas tentang zakat, ayat-ayat dan tafsirnya, hadits-hadits hukum serta syarahnya, kaidah fiqhiyah dan ushuliyah serta pendapat para ulama. Di antaranya, dengan tidak bermaksud memerinci satu persatu, sebagai berikut :

1) Kitab *Fiqh wa Muqâratuh* :

Penulis menjadikan data primer pada bidang *fiqh* dan *muqâranahnya* di antaranya adalah Ibnu Abidin, *Rad Al-Mukhtâr 'Alâ Dâr Al-Mukhtâr Syarh Tanwir Al-Anshâr*, Abdurrahman Al-Maghribiy, *Mawâhib Al-Jalil Lisyarh Mukhtashar Khalil*, Abu Al-Hasan, *Al-Hâwiy Al-Kabir Min Fiqh Madzhab Al-Imâm Al-Syâfi'iy*, Taqiyuddin Muhammad Al-Futuhiy, *Muntahâ Al-Îrâdat fi Jâmi' Al-Miqnâ' Ma'a Tanqih Wa Ziyâdât*, Ibnu Qudamah Al-Muqaddasiy, *Al-Mughniy 'Alâ Mukhtashar Al-Kharqiy*, Al-Jaziri, *Kitâb Al-Fiqh 'Alâ Madzâhib Al-Arba'ah*, Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, Yusuf Al-Qaradhâwiy, *Fiqh Al-Zakâh*, Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Abdullah bin Manshur Al-Ghafiliy, *Nawâzil Al-Zakâh*. Dan masih banyak lagi kitab lainnya, lebih lengkap terdapat pada uraian daftar pustaka pada tesis ini.

2) Kitab *Tafsir* dan *Hadîts Al-Ahkâm*:

Pada bidang tafsir, sebagai data primer penulis memilih kitab tafsir Al-Qurthubiy, *Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'ân* dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'ân Al-'Azhim Al-Syahir Bi Tafsir Al-Manâr*. Sementara untuk data *Hadîts* dan *Hadîts al-Ahkâm*, penulis memilih kitab Al-Bukhâriy, *Al-Jâmi' Al-Shahih*, Al-Suyuthiy, *Al-Tausyih Syarh Al-Jâmi' Al-Shahih*, *Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawâwiy*, Musa Syâhin Lâsyin, *Al-Manhâl Al-Hadîts Fi Syarh Al-Hadîts*, Al-Tirmidziy, *Sunan Al-Tirmidziy*, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Abdurrahman Al-Bassâm, *Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Marâm*, Al-Asqalaniy, *Fath Al-Bâriy*,

3) Kitab *Ushul al-Fiqh* dan *Maqâshid al-Syarî'ah*:

Adapun pada bidang *ushul al-fiqh* dan *maqâshid al-syari'ah*, sebagai data primer penulis mengambil *kitab* Al-Ghazaliy, *Al-Mustashfâ Min 'Ulum Al-Ushul*, Al-Syâthibiy, *Al-Muwâfaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Al-Arriy, *Al-Ihkâm fi Ushul Al-Ahkâm*, Muhammad Wâshil, *Al-Madkhâl Al-Wasith Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islâmiyah Wa Al-Fiqh Wa Al-Tasyri'*, Al-Yubiy, *Maqâshid Al-Syari'ah Al-Islâmiyah Wa 'Alâqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'iyyah*, Ali Ahmad Al-Jurjawi, Alauddin Husain Rahhal, *Ma'âlim Wa Dhawâbith Al-Ijtihad 'Inda Syaikh Al-Islâm Ibnu Taimiyah, Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuh*, Al-Suyuthiy, *Al-Asybâh Wa Al-Nazhâir Fi Furu'ihî*, dan buku-buku klasik lainnya yang dapat melengkapi penelitian tesis ini.

b. Data sekunder

Adapun data sekunder, akan penulis ambil dari berbagai buku, artikel, majalah, fatwa ulama dan sumber terkait lainnya jika ada yang dapat mendukung penyelesaian penelitian tesis ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka cara yang ditempuh adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mentelaah (dokumentasi) sumber-sumber fiqh yang berkaitan dengan judul, baik berupa teks-teks klasik maupun kontemporer. Teknik dokumentasi ini sangat tepat digunakan dan lazim dipakai dalam penelitian kualitatif, terutama berkaitan dengan buku-buku teks yang berisi pendapat-pendapat dan teori-teori yang berkembang dalam konteks sosial-historis. Untuk itu, maka teknik ini sangat tepat dipakai dalam penelitian ini, karena

keseluruhannya berkaitan dengan berbagai pendapat, pandangan dan teori yang terdapat dalam teks-teks yang ada.

3. Teknik Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan teknik analisis data deskriptif analisis. Deskriptif, karena penelitian ini bertitik tolak dari konsep-konsep berdasarkan nas-nas syara' (*nushush al-syar'iyyah*), pendapat para *fuqaha* dan peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif (*tasyri'iyyah*).

Setelah semua data terkumpul, kemudia diklasifikasikan berdasarkan kategori masalah, lalu dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa isi (*content analysis*), dengan cara menganalisis data menurut isinya. Dengan kata lain, suatu upaya untuk menelaah maksud dari isi sesuatu yang termuat dalam suatu dokumen. Kemudian dipaparkan (dideskripsikan) serta dianalisa menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.

H. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarah pembahasan tesis ini maka penulis membuat sistematika berdasarkan bab masing-masing. Penulis membaginya menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelas dari bab tersebut.

BAB I dimulai dengan pendahulaun, yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, judul penelitian dan penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan pembahasan mengenai konsep syari'at zakat, yang terdiri dari pengertian zakat, landasan syari'at zakat, syarat-syarat dan jenis harta yang wajib dizakatkan, hikmah dan fungsi zakat, prinsip kepemilikan pada harta zakat, sasaran pendistribusian zakat dan sistim pengelolaan zakat.

BAB III merupakan uraian tentang tinjauan umum terhadap teori *maqâshid al-syarî'ah*, yang terdiri dari pengertian *maqâshid al-syarî'ah*, sejarah dan perkembangan ilmu *maqâshid al-syarî'ah*, landasan *maqâshid al-syarî'ah*, pembagian *maqâshid al-syarî'ah*, metode dalam mengungkapkan *maqâshid al-syarî'ah*, dan status *maqâshid al-syarî'ah* dalam berhujjah.

BAB IV merupakan analisa terhadap implementasi *maqâshid al-syarî'ah* terhadap pengelolaan zakat secara produktif, yang terdiri dari *maqâshid al-syarî'ah* pada zakat, prinsip-prinsip pengelolaan harta zakat, pandangan ulama tentang pengelolaan harta zakat secara produktif dan tinjauan *maqâshid al-syarî'ah* terhadap pengelolaan zakat secara produktif.

BAB V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan bahasan sebelumnya dan menjawab permasalahan yang dikemukakan di awal, dan sekaligus mengemukakan saran bagi semua pihak yang berkompeten dalam hal dengan harapan merespon hasil dari penelitian.

BAB II

KONSEP SYARI'AT ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Dalam Al-Qur'an kata zakat (الزَّكَاةُ) terdapat sebanyak 32 kata¹, 28 kata di antaranya bergandengan dengan kata shalat, hal ini mengisyaratkan tentang penting dan eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan dengan Tuhan, sedangkan zakat merupakan perwujudan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakkiy*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Kata zakat ini juga banyak diulang sebutannya dengan menggunakan kata yang sinonim dengannya yaitu kata sedekah (الصَّدَقَةُ) dan infak (الْإِنْفَاقُ).² Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai

kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.

¹ Muhammad Fuad Abdul Bâqiy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâzh Al-Qur'ân Al-Karîm*, (Kairo : Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1324), hlm. 331-332. Lihat Mundzir Qahaf, *Al-Nushush Al-Iqtishâdiyyah Min Al-Qur'ân Wâ Al-Sunnah*, (Jeddah : Markaz Al-Nasyr Al-'Ilmiy, 1995 M/1415 H.), Cet. I, hlm. 685.

² Yusuf Al-Qaradhawiy, *Al-'Ibâdah Fi Al-Islâmiy*, (Beirut : Muassasah Al-Risâlah, 1422 H./2001 M.), Cet. ke-2, hlm. 227. Lihat Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maḥdhah dan Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), cet. ke-2, hlm. 43.

1. Pengertian Secara Bahasa

Secara bahasa (*etimologi*), kata zakat berasal dari bahasa arab (زَكَاةٌ), akar katanya adalah (زَكَأَ يَزْكُو زَكَاءً وَ زَكُوًا).³ Di antaranya bermaknanya tumbuh, berkembang (produktif) dan bertambah (النَّمَاءُ وَالرَّيْعُ وَالزِّيَادَةُ), suci atau bersih (التَّطَهِيرُ وَالطُّهْرَةُ), berkah (الْبَرَكَهَةُ), pantas, layak atau bermanfaat (الصَّلَاحُ وَالْإِصْلَاحُ), baik dan utama (الْخَيْرُ وَالْفَضْلُ).⁴

Dinamakan zakat, karena dengan berzakat menjadi sebab harta itu bertambah dan dapat memeliharanya dari kebinasaan, bahkan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menambahkan pahala bagi pelakunya.⁵

2. Pengertian Secara Istilah

Sedangkan secara istilah (*terminologi*), para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan zakat, secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Menurut *madzhab Hanafiyyah*, zakat adalah :

تَمْلِكُ جُزْءَ مَالٍ عَيْنُهُ الشَّارِعُ مِنْ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمَلِكِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ لِلَّهِ تَعَالَى⁶

³ Ibn Manzhur, *Lisân Al-'Arab*, (Beirut : Dâr Shâdir, 1410 H./1990 M), Cet. ke-1, Jilid XIV, hlm. 358. Abdullah bin Manshur Al-Ghâfiliy, *Nawâzil Al-Zakâh*, (Riyad : Kerja Sama antara Bank Al-Bilâd dan Dâr Al-Maiman), Cet. ke-1, hlm. 39.

⁴ Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, *Al-Mujam Al-Washith*, (Mesir : Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyyah, 1425 H./2004 M), cet. ke-4, hlm. 396. Lihat Ibn Manzhur, *op.cit.*, hlm. 358-359. Lihat juga Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lâm*, (Beirut : Dar Al-Masyriq, tt), hlm. 303. Lihat juga Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fi qh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, Juz II, *op.cit.*, hlm. 729-730.

⁵ Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, Juz II, *ibid.*, hlm. 730. Lihat Khalid Abdurrazaq Al-'Aliy, *Mashârif Al-Zakâh Fi Dhu' Al-Kitâb Wa Al-Sunnah*, (Amman : Dar Usâmah, 1999), Cet. ke-1, hlm. 33.

⁶ Ibnu Abidin, *Rad Al-Mukhtâr 'Ala Dar Al-Muhtâr Syarh Tanwîr Al-Anshâr*, (Riyad : Dar 'Alim Al-Kutub, 1423 H./2003 M), Juz III, hlm. 171-173.

Artinya : “Pemberian bagian harta tertentu karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim atau bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa terputus manfaat harta itu dari pemiliknya (yang asli) dengan cara apapun.⁷

2. Menurut *madzhab Malikiyyah*, zakat adalah :

إِسْمُ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ شَرْطُهُ لِمُسْتَحِقِّهِ يَبْلُوغُ الْمَالَ نَصَابًا وَمَصْدَرٌ إِخْرَاجُ جُزْءٍ إِلَى آخِرٍ⁸
Artinya : “Mengeluarkan (bagian tertentu) dari jenis harta tertentu yang telah memenuhi syarat dan mencapai *Nishâb* (batas kuantitas tertentu yang mewajibkan zakat) untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.

⁷ Menurut *madzhab Hanafiyah* sebagaimana dikutip Al-Zuhailiy, ada juga yang mendefinisikan dengan redaksi yang berbeda, yaitu : تَمْلِيكُ جُزْءٍ مَالٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوصٍ عَيْنَهُ الشَّارِعُ لَوَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى

Penggunaan istilah “kepemilikan” (التمليك) dalam definisi yang dikemukakan oleh *Hanafiyyah*, adalah dimaksudkan untuk penghindaran dari maksud *ibahah* (pembolehan), sehingga apabila seseorang memberi makan anak yatim dengan niat membayar zakat, maka cara seperti ini tidak boleh. Lain halnya apabila ia memberikan makanan seperti ia memberi pakaian padanya, yang demikian itu dengan syarat kepemilikan harta itu diikatkan pada yang menerimanya. Demikian juga apabila harta yang diberikan itu dihukumi hanya sebagai nafkah kepada anak yatim itu, maka syarat tersebut tidak diperlukan.

Yang dimaksud dengan “sebagian harta” (جُزْءُ مَالٍ) dalam definisi di atas adalah keluarnya manfaat dari orang yang memberinya. Dengan demikian, jika seseorang melayani seorang fakir untuk berdiam di rumahnya selama satu tahun dengan niat berzakat, maka hal ini tidak dianggap sebagai zakat.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan istilah bagian tertentu (الْجُزْءُ الْمَخْصُوصُ) pada definisi di atas adalah ukuran yang wajib dikeluarkan, dan “harta tertentu” (الْمَالُ الْمَخْصُوصُ) yang dimaksud adalah *Nishâb* yang ditentukan oleh *syara'*. Sedangkan “orang tertentu” (الشَّخْصُ الْمَخْصُوصُ) yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq al-zakâh*). Kemudian, maksud istilah “yang sudah ditentukan oleh *syara'*” (عَيْنُهُ الشَّارِعُ) adalah kadar *Nishâb* dari yang sudah ditentukan dari masing-masing jenis harta zakat dan telah mencapai *haul*. Sehingga terkecualikan darinya sedekah sunnah (صَدَقَةُ النَّافِلَةِ) dan zakat fitrah. Dan pelaksanaan zakat ini semata-mata hanya bertujuan mencari *ridha* Allah swt. Lihat Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islâmîy Wa Adillatuh*, Juz II, hlm. 730.

⁸ Abdurrahman Al-Maghribiy, *Mawâhib Al-Jalîl Lisyarh Mukhtashar Khalîl*, (t.tp. : Dar 'Alim Al-Kutub, t.t.), Juz III, hlm. 80. Lihat Muhammad Al-Anshariy Al-Rishâ'iyy, *Syarh Hudud Abi 'Arafah; Al-Mausum; Al-Hidâyah Al-Kâfiyah Al-Syâfiyah Li Bayân Haqâiq Al-Imâm Abi 'Arafah Al-Wâfiyah*, (Beirut : Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1993 M), Cet. ke- 1, Bab I, hlm. 140. Lihat juga Abdullah Bin Masshur Al-Ghâfiliy, *Nawâzil Al-Zakâh*, hlm. 41.

3. Menurut *madzhab Syafi'iyah*, zakat adalah :

إِسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافِهِ مَخْصُوصَةٌ لَطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٌ⁹
Artinya : “*Suatu istilah bagi pengeluaran sesuatu yang dikhususkan pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok yang ditentukan pula*”.

4. Menurut *madzhab Hanabilah*, zakat adalah :

حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لَطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ¹⁰
Artinya : “*Hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu yang telah ditentukan pula*”.

5. Sedangkan menurut Al-Sayyid Sabiq, zakat ialah :

إِسْمٌ لِمَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ¹¹
Artinya : “*Sesuatu hak (yang mana pada dasarnya) merupakan milik Allah swt yang harus dikeluarkan (diserahkan) oleh manusia kepada orang fakir*”.

6. Dan menurut Abdul Karim Zaidan, zakat menurut istilah adalah :

حَقٌّ وَاجِبٌ مُقَدَّرٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لَطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ¹²
Artinya : “*Suatu hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang telah ditentukan, untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu yang sudah ditentukan pula*”

⁹ Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Al-Bashâriy, *Al-Hâwiy Al-Kabîr Min Fiqh Madzhab Al-Imâm Al-Syafi'iy*; *Syarh Mukhtashar Al-Muzniy*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1414 H./ 1994 M.), Cet. ke-1, Juz III, hlm. 71. Lihat Al-Nawâwiy, *Kitâb Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab Li Al-Syairâziy*, Juz V, hlm. 295. Lihat juga Abdullah Bin Masshur Al-Ghâfiliy, *Nawâzil Al-Zakâh*, hlm. 41.

¹⁰ Taqiuddin Muhammad Bin Ahmad Al-Futuhiy, *Muntaha Al-Iradat fi Jam'i Al-Miqna' Ma'a Tanqih Wa Ziyadat*, (t.tp. : Muassasah Al-Risâlah, t.th.), Juz I, hlm. 435. Lihat Al-Jaziri, *Kitâb Al-Fiqh 'Ala Madzâhib Al-Arba'ah*, Juz I, hlm. 536. Lihat juga Abdullah bin Manshur Al-Ghâfiliy, *Nawâzil Al-Zakâh*, hlm. 43. Dan Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, Juz II, *op.cit.*, hlm. 731.


¹¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo : Al-Fath Li Al-'Alam Al-'Arabi, t.th.), Juz I, hlm. 235.

¹² Abdul Karim Zaidân, *Al-Mufashshal Ahkam Al-Mar'ah Wa Al-Bait Al-Muslim Fi Al-Syari'ah Al-Islâmiyah*, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1413 H./1993 M.), Cet. ke- 1, Juz I, hlm. 343.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa zakat secara terminologi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu pembagian yang ditentukan secara syara'. Yang dimaksudkan adalah penyerahan, pembagian atau pemindahan kepemilikan harta tertentu yang telah mencapai *nishâb*, yang telah ditentukan oleh Allah swt.
2. Terhadap harta kekayaan tertentu. Kewajiban tersebut ditujukan kepada yang memiliki harta-harta zakat (*al-ammâl al-zakawiyah*) baik berupa hewan ternak, uang, tanaman tertentu, hasil pemiagaan atau hasil bumi (hasil tambang).
3. Diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*ashnâf al-tsamâniyah*) yang dikhususkan oleh Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103.
4. Dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu Islam, merdeka, milik sempurna, mencapai haul, serta niat ikhlas karena Allah swt.

Antara makna bahasa dan istilah ini memiliki kaitanan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci dan bersih dari hak orang lain, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Secara lahiriyah harta yang dizakatkan itu berkurang, namun secara hakiki dengan mengeluarkan zakat justru harta tersebut mendatangkan keberkahan, tumbuh dan bertambah dan Allah swt akan menggantinya dengan kebaikan (rizki), di dunia, sementara di akhirat akan memperoleh derajat pahala yang mulia, sebagai mana Allah swt nyatakan dalam al-Qur'an :



 (سورة سبأ: 34\39)

Artinya ; “Dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik”.

Dalam sebuah riwayat hadits juga dikatakan sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ¹³

Artinya : "Dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw bersabda : "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya."

Di samping itu juga, selain untuk kekayaan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan suci, bagi pelakunya, zakat berfungsi sebagai pembersih jiwa, bagian dari amal *shaleh*, sehingga dengan melaksanakan amal *shaleh* keimanan menjadi bertambah. Dengan zakat juga dapat menyenangkan hati sehingga ia semakin dekat kepada *ridha* Allah swt. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ ثَمَرِ مَا نَحْنُ مُنْزِلِينَ لَكُمْ مِنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (سورة التوبة: 9\103)

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Ibadah zakat, dalam hal ini berfungsi membersihkan dan menyucikan harta dengan memperoleh keberkahan bagi pemiliknya,¹⁴ sekaligus menyucian jiwa dari sifat tidak terpuji, penyeimbang atas kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang yang

¹³ *Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawiy*, (Kairo : Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah, 1349 H/1930 M.), Juz XVI, Cet. ke-1, hlm. 141.

¹⁴ Lihat Al-Qurthubiy, *Al-Jâmi' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 2006), Juz X, cet. ke-1, hlm. 363-364.

tidak mampu (*li mashlahah al-daafi' wa al-akhidz ma'an*),¹⁵ karena pada ibadah zakat merupakan penunaian hak dari jenis harta yang telah ditentukan, dan kewajiban untuk diberikan kepada kelompok orang tertentu pula pada waktu yang telah ditentukan. Sebagai mana firman Allah swt dalam beberapa ayat, di antaranya :

﴿فَاْكُلْ مِنْ ثَمَرِهِ اِذَا يَرْتَجِ ۚ وَذُرِّيَّةَ مَنْ حَلَّ لَكَ مِنْهُ اِلَى الْيَوْمِ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْا اَمْرِيْ ۙ لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝۱۴۱﴾
 (سورة الأنعام : 141\6)

Artinya : “Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝۱۴۲﴾
 (سورة الإسراء : 26\17)

Artinya : “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝۱۴۳﴾
 (سورة الروم : 39-38\30)

Artinya : “Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan

¹⁵ Taqiuddin Bin Daqiq Al-'Id, *Ihkam Al-Ahkam Syarh 'Umdah Al-Ahkam*, (Kairo : Al-Maktabah Al-Sunnah, 1414 H/1994 M.), Cet. ke-1, hlm. 377.

berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)".¹⁶

B. Landasan Syari'at Zakat

Perintah melaksanakan ibadah zakat merupakan urutan ketiga dari rukun Islam yang lima. Ibadah zakat ini diwajibkan di Madinah pada bulan Syawwal tahun kedua Hijriyah, yang mana kefardhuannya ditetapkan setelah penetapan fardhu puasa Ramadhan dan zakat fitrah.¹⁷ Ibadah zakat merupakan *fardhu 'ain*¹⁸ yang ditetapkan kefardhuannya berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma',¹⁹ dan dapat juga ditinjau secara historis (sejarah), logika, filsafat dan sosiologis.²⁰

1. Landasan Al-Qur'an

Adapun dalil Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang mewajibkan berzakat di antaranya adalah :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةً مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (سورة البقرة: 217)
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةً مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (سورة البقرة: 217)
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةً مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (سورة البقرة: 217)

Artinya : "Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar

¹⁶ Dalam ayat ini terlihat ada dua perbedaan prinsip peralihan kekayaan (transaksi kekayaan), pertama, prinsip riba, cara mencari keuntungan yang jelas diharamkan dalam Islam, kerna mengandung unsur *kezhaliman*, dan kedua, prinsip zakat, bernilai positif dan secara langsung berperan dalam memperbaiki kondisi ekonomi lemah, dan Allah swt menjamin bahwa cara zakat inilah yang sebenarnya memberikan keuntungan dunia dan akhirat (*diridhai* Allah swt).

¹⁷ Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, op.cit., Juz II, hlm. 733.

¹⁸ Para Ulama sepakat bahwa ibadah zakat diwajibkan kepada setiap muslim (baik laki-laki maupun perempuan) yang merdeka, baligh, berakal sehat, memiliki harta seukuran nishab, dan kepemilikan (pada harta) yang sempurna. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakat terhadap anak kecil, orang gila, budak (hamba sahaya), orang yang berutang. Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashshal Fi Ahkam Al-Mar'ah Wa Al-Bait Al-Muslim Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Juz I, hlm. 343 dan 345.

¹⁹ Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz II, op.cit., Lihat Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Al-Bashariy, *Al-Hawiy Al-Kabir Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi'iy*; *Syarh Mukhtashar Al-Muzniy*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1414 H./1994 M), Cet. ke-1, Juz III, hlm. 71.

²⁰ Abdurrahman Qadir, op.cit., hlm. 50-52.

melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)".

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa perintah beribadah kepada Allah swt di antaranya adalah mentauhidkan Allah swt, dan memerintahkan shalat yang kebanyakan ayat al-Qur'an selalu menggandengkannya dengan perintah zakat sekaligus, wajib dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah swt semata, sebagai bukti nyata bahwa pelaksanaan ibadah ini merupakan perwujudan dari ajaran yang sebenarnya (agama yang lurus).²¹

Beberapa ayat al-Qur'an yang menegaskan perintah wajib menunaikan zakat, di antaranya adalah sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (سورة البقرة: 110\2)

Artinya : *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat"*.

Imam Al-Qurthubiy menyatakan dalam tafsirnya bahwa kata *آتوا الزكاة* adalah berfaedah perintah wajib.²² Dan apabila diperhatikan, kebanyakan ayat tentang perintah zakat ini menggunakan kata "آتوا", dengan segala *musytaqqatnya*, yang berarti

"الإعطاء", suatu perintah untuk menunaikan atau membayar.²³



²¹ Al-Qurthubiy, *Al-Jâmi' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz XXII, hlm. 412-413.

²² Al-Qurthubiy, Juz II, *ibid.*, hlm. 23.

²³ Lihat Ibnu Manzhur, *Lisan Al-'Arab*, hlm. 23



 (المزمل: 73 \ 20)

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 (سورة التوبة: 9\103)

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.



 (سورة الأنعام: 6 \ 141)

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon korma, tanam-tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Nash Al-Qur'an²⁴ tentang perintah zakat diturunkan dalam tiga periode :

²⁴ Al-Qur'an menampilkan redaksi perintah zakat dalam empat gaya bahasa (*ushlub*), yaitu :

- Menggunakan *ushlub insya'i*, yaitu berupa perintah tegas seperti (آتُوا \ أَنْفَقُوا), antara lain terdapat pada ayat 43, 83 dan 110 QS. Al-Baqarah (2); ayat 33 QS. Al-Ahzab (33); ayat 78 QS. Al-Hajj (22); ayat 56 QS. Al-Nur (24) dan ayat 20 QS. Al-Muzzammil (73). Dalam ayat lain juga menggunakan kata kerja yaitu perintah (خُذْ) mengambil atau memungut zakat (*shadaqah*) seperti terdapat dalam QS. Al-Taubah (9) ayat 103, yang mana sasaran perintahnya ditujukan kepada penguasa (*'amil zakat*).

Pertama, sebelum hijriyah, yang mana pada periode ini perintah zakat masih secara umum tanpa ada batasan dan perinciannya. Akan tetapi hanya pada tataran motifasi memberi, berbagi dan berbuat baik kepada sesama, seperti terdapat di antaranya dalam QS. *Al-Dzariyat* (51) ayat 19 (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ), demikian juga dalam QS. *Fushshilat* (41) ayat 7 (الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) dan dalam QS. *Al-Mudatsir* (74) ayat 44 (وَلَمْ نَكُ نَطْعَمُ الْمَسْكِينِ).

Kedua, pada tahun ke dua hijriyah, yang mana pada masa ini ketentuan zakat sudah diperinci dan tegas baik jenis harta yang wajib dizakatkan, ukuran nishab dan kadar harta yang wajib dizakatkan.

Dan *ketiga*, pada tahun ke sembilan hijriyah, yang mana pada masa ini perkembangan Islam semakin luas, maka Nabi Muhammad saw mulai mengutus petugas khusus (السعاة والجباية) mengumpulkan dan membagikan harta zakat.²⁵

2. Landasan Sunnah

-
- b. Menggunakan *ushlub targhib* (motivasi) untuk mendirikan shalat dan membayar zakat yang merupakan ciri-ciri orang yang benar iman dan taqwanya, kepada mereka dijanjikan akan memperoleh ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Tuhan. Salah satunya seperti yang terdapat dalam QS. *Al-Baqarah* (2) ayat 277.
 - c. Menggunakan *ushlub tarhib* (intimidasi/peringatan), yang ditujukan kepada orang yang suka menumpuk harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang seperti ini diancam dengan azab yang pedih, yang akan dibakar dahi, lambung dan punggungnya dengan batangan emas dan perak yang sudah dipanaskan dengan api neraka jahanam. Ancaman tersebut seperti terdapat dalam QS. *Al-Taubah* (9) ayat 34-35.
 - d. Menggunakan *ushlub madh* (pujian/sanjungan), terhadap orang yang menunaikan zakat. Mereka disanjung sebagai penolong (*wali*) yang disifatkan dengan sifat ketuhanan, kerasulan dan orang yang beriman, karena kesanggupannya memberikan zakat kepada orang lain. *Ushlub* ini seperti terdapat dalam QS. *Al-Maidah* (5) ayat 55. Lihat Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), cet. ke-2, hlm. 45-49.

²⁵ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram*, (Makkah : Maktabah Al-Asadiy, 1423 H./2003 M.), Cet. ke-5, Juz III, hlm. 288-289.

Adapun dalil Sunnah yang berkaitan dengan masalah zakat banyak sekali.

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadits-hadits yang berkaitan dengan zakat ada sekitar 800 hadits. Di antara hadits yang menunjukkan kewajiban berzakat adalah :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ²⁶
Artinya : *"Dari Ibnu Umar ra, ia berkata; Rasulullah saw bersabda : "Islam itu dibangun*

atas lima dasar, yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah swt, dan bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah swt, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibâdah haji dan puasa pada bulan ramadhani".

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ²⁷

Artinya : *"Dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas ra, bahwa ketika Nabi saw mengutus Mu'adz ra ke negeri Yaman, ia berkata,: "Ajaklah kepada mereka syahadat (persaksian) bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka".*

²⁶ Al-Bukhari, *Al-Jâmi' Al-Shahîh*, (Kairo : Al-Batba'ah Al-Salafiyah, 1400 H.), Cet. ke-1, Juz I, hlm. 20. Lihat Al-Zubaidiy, *Al-Tajrid Al-Sharîh Li Ahâdîts Al-Jâmi' Al-Shahîh*, (Mesir : Al-Maimaniyyah, t.th.), Juz I, hlm. 8. 96.

²⁷ Al-Bukhari, *Al-Jâmi' Al-Shahîh*, Juz I, *op.cit.*, hlm. 430. Lihat Badruddin Abi Muhammad Mahmud, *'Umdah Al-Qariy Syarh Shahîh Al-Bukhari*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1421 H./2001 M.), Cet. ke-1, Juz VIII, hlm. 337. Lihat Al-Karmaniy, *Al-Bukhari Bi Syarh Al-Karmaniy*, (Beirut : Dar Ihya Al-Turats Al-Arabiyy, 1401 H./1981 M.), Cet. ke-2, Juz IX, hlm. 166-167. Lihat Ahmad bin Ali Bin Hajar Al-Asqalaniyy, *Fath Al-Bariyy*, (Riyad : t.t., 1421 H./2001 M.), Cet. ke-1, hlm. 307. Lihat Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthiy, *Al-Tausiyih Syarh Al-Jâmi' Al-Shahîh*, (Riyad : Maktabah Al-Rusydi, 1419 H./1998 M.), Cet. ke-1, hlm. 1141.

Pada hadits ini tergambar bahwa dari rukun Islam yang lima terdapat tiga pokok penting kewajiban yang diamanahkan oleh Rasulullah saw kepada Mu'adz ketika diutus ke Yaman, yaitu : *pertama*, rukun *i'tiqadiyah* yaitu dua kalimat syahadat (pengakuan terhadap Allah swt dan Rasulullah saw), *kedua*, rukun *badaniyah* yaitu perintah shalat lima waktu, dan *ketiga*, rukun *malayah* yaitu perintah zakat.²⁸

Sementara, dalam riwayat lain juga dikatakan :

حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ مِنْذُ كَمْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ²⁹

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Abdulrahman Al-Kindi Al-Kufi; telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab; telah mengabarkan kepada kami Mu'awiyah bin Shalih; telah menceritakan kepadaku Sulaim bin 'Amir; dia berkata, Saya mendengar Abu Umamah berkata, saya telah mendengar khutbah Rasulullah saw ketika haji wada', ia bersabda: Bertakwalah kepada Allah Rabb kalian, kerjakanlah shalat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadhan, tunaikanlah zakat mal kalian, dan taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga Rabb kalian. Dia (Sulaim bin 'Amir) berkata, saya bertanya kepada Abu Umamah, sejak kapan kamu mendengarnya dari Rasulullah?. Dia menjawab, saya mendengarnya ketika berumur tiga puluh tahun. Abu 'Isa berkata, ini adalah hadits hasan shahih”.

3. Landasan Ijma'

Sedangkan dalil ijma', menyatakan bahwa seluruh ulama dan umat Islam sepakat bahwa ibadah zakat hukumnya wajib. Bahkan para sahabat ra, sepakat

²⁸ Musa Syahin Lasyin, *Al-Manhal Al-Hadits Fi Syarh Al-Hadits*, (Kairo, Dar Al-Syuruq, 1424 H./2003 M.), Cet. ke-3, Juz II, hlm. 102.

²⁹ Al-Tirmidziy, *Sunan Al-Tirmidziy*, (Riyadh : Maktabah Al-Ma'arif, t.th.), Cet. ke-1, hlm. 156. Lihat dalam Abdulrahman Al-Jaziriy, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzâhib Al-Arba'ah*, Juz I, hlm. 536.

menyatakan bahwa orang yang enggan menunaikan zakat wajib diperangi, orang yang mengingkari kewajiban zakat dihukum kafir dan menjadi murtad.³⁰

Ibnu Qudamah, mengutip dalam kitab *Al-Mughniy 'Ala Mukhtashar Al-Kharqiy* suatu riwayat dari Bukhari yang isnadnya berasal dari Abu Hurairah ra sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا تَوَفَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ , وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ , فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ , وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا . قَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ صَدْرُ أَبِي بَكْرٍ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ ³¹

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra, tatkala Nabi saw wafat, kemudia kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar ra. Ketika itu banyak orang kembali kepada kekafirannya. Maka berkata Umar ra kepada Abu Bakar ra: bagaimana engkau memerangi mereka? Karena Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan *Laa Ilaaha Illallaah* (tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah), apabila mereka mengucapkannya, maka harta jiwa terlindungi, kecuali atas dasar haq dan perhitungannya kepada Allah Ta'la. Lalu Abu Bakar ra berkata : "Demi Allah, Pasti akan aku perangi orang yang membedakan antara perintah shalat dan zakat, karena zakat itu adalah hak keharta bendaan. Dan demi Allah, jika mereka menolak memberikan zakat padahal dulu di masa Rasul saw mereka menyerahkannya kepada Rasulullah saw, maka mereka layak diperangi. dan saya akan perangi siapa saja yang enggan membayarnya." Kemudian Umar ra berkata; "Maka demi Allah, "Sungguh Allah telah menerangkan dada Abu Bakar ra. Dan saya melihat yang demikian (memerangi orang yang enggan menunaikan zakat) itulah yang benar".

³⁰ Ibnu Qudamah Al-Muqaddasiy, *Al-Mughniy 'Ala Mukhtashar Al-Kharqiy*, (Beirut : dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1414 H./1994 M.), cet. ke- 1, Juz II, hlm. 359. Lihat Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, op.cit. hlm. 734.

³¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy 'Ala Mukhtashar Al-Kharqiy*, op.cit., Juz II, hlm. 359. Lihat Musa Syahin Lasyin, *Al-Manhal Al-Hadits Fi Syarh Al-Hadits*, (Kairo : Dar Al-Syuruq, 1424 H./2003 M.), Cet. ke-3, Juz II, hlm. 107.

Selanjutnya pada masa tabi'in dan imam mujtahid serta murid-muridnya senantiasa melakukan ijtihad dalam upaya merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.

4. Landasan Historis

Zakat bukan hanya syari'at Nabi Muhammad saw. Zakat sudah dikenal dalam risalah agama samawiyah, seperti pada masa Nabi Isa as dan Ismail as (QS. Maryam (19) : 30-31 dan 54-55), begitu juga pada Nabi-nabi lainnya seperti Nabi Ibrahim as, Ishaq as, Ya'qub as (QS. Al-Anbiya' (21) : 72-73), hingga Nabi Musa as (QS. Al-maidah (5) : 12), termasuk juga secara umum disyari'atkan kepada *ahl al-kitab* dalam surat al-Bayyinah (98) : 4-5.

Pensyari'atan zakat ini menjadi satu rangkaian dengan ibadah shalat terjadi sejak Nabi Muhammad saw berada di Makkah, namun pada saat itu belum secara tegas (*ilzam*) menyatakan kewajiban zakat, tetapi hanya bersifat umum, belum ada ketentuan secara detil hukum dan jenis harta yang wajib dizakatkan serta batasan nisab dan kadar zakat yang akan dikeluarkan.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, pada periode Makkah zakat yang diwajibkan oleh Allah swt merupakan zakat mutlak (*zakah muthlaqah*), yang mana waktu itu zakat belum memiliki ketentuan dan batasan tertentu, semua diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati dan rasa tanggung jawab seseorang terhadap orang lain, solidaritas dan belas kasihan (*charity*). Adakalanya orang memberi sedikit saja dan adakalanya ada orang yang memberikan zakatnya dalam jumlah yang sangat besar.³²

³² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakâh*, Juz I, *op.cit.*, hlm. 61

Pada periode Makkah ini kondisi ummat Islam secara sosiologis merupakan kelompok minoritas yang sering tertindas. Mereka tidak memiliki kekayaan dan harta benda yang melimpah, kecuali kekuatan iman dan Islam yang melekat pada jiwa. Ayat al-Qur'an pada waktu itu misalnya ketika bercerita tentang hak fakir miskin, ketenteraman dan kebahagiaan bagi orang yang menunaikan zakat, menyantuni anak yatim dan pembebasan budak, ayat-ayatnya tidak menggunakan *shighat amr* (perintah tegas) seperti yang terdapat dalam QS. Al-Ruum (30) : 39; QS. Al-Mukminun (23) : 1-4; QS. Al-Naml (27) : 1-3; QS. Al-Balad (90) : 11-16; QS. Luqman (31) : 2-4 dan QS. Al-Ma'un (107) : 1-3.

Berbeda dengan kondisi ketika periode Madinah, secara politis ummat Islam sudah memiliki kekuatan yang mandiri. Ummat Islam sudah mendirikan negara sendiri, menerapkan hukum sendiri dan memiliki wilayah sendiri. Mereka terdiri atas penguasa, pemilik tanah, pedagang dan sebagainya. Pada kondisi ini ummat Islam memerlukan pranata untuk mengikat dan memperkuat kesatuan politik yang telah terbentuk itu. Maka ayat Madaniyyah tentang zakat mulai terlihat unsur kewajibannya yang merupakan bagian dari mekanisme untuk merekatkan kesatuan politik.

Di sisi lain juga, zakat merupakan aset pendapatan negara yang sangat berarti bagi kelangsungan pemerintahan. Dari zakat dapat terkumpul dana besar yang bisa didayagunakan untuk kepentingan negara. Dalam konteks ini, maka zakat menjadi tulang punggung perekonomian negara.

Pada tahun ke dua hijriyyah, barulah turun ayat dengan aturan yang lebih khusus dan *mustahiq* zakat pada saat itu hanya terbatas pada dua kalangan fakir dan

miskin, kendati ada juga dari selain kalangan fakir dan miskin yang meminta-minta zakat, kadang dikabulkan oleh Rasulullah saw dan kadang tidak, setelah mencermati kondisi si peminta (QS. Al-Baqarah (2) : 271 dan QS. Al-Taubah (9) : 58. Dan ini berlangsung hingga tahun ke sembilan hijriyah. Setelah itu barulah turun QS. Al-Taubah (9) : 60 yang menetapkan bahwa *mustahiq* zakat itu tidak lagi terbatas pada fakir dan miskin, tetapi termasuk juga amil, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang terlilit utang, untuk perjuangan di jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan. Dalam prakteknya, Nabi tidak membagi rata hasil zakat tersebut kepada delapan ashnaf itu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.³³

5. Landasan Logika, Filosofis dan Sosiologis

Ibadah zakat, meskipun ia sebagai kewajiban agama berdasarkan nash-nash normatif, tetapi ia dapat difahami secara logika dan filosofis. Landasan logika dan filosofis ini meliputi pertimbangan logika tentang mengapa zakat itu diwajibkan, apa fungsi dan peranannya sehingga diyakini bahwa ibadah zakat sangat logis dan sesuai dengan pertimbangan akal sehat dan hati nurani yang beriman serta dilihat pula dari sisi hikmah dan rahasia yang terkandung dalam syariat zakat.

Argumentasi secara logika, sebagai mana pendapat al-Kasani yang dikutip oleh Abdurrahman Qadir, zakat dapat dianalisa dari beberapa sisi, antara lain :

- a. Membayar zakat itu tergolong ke dalam membantu orang lemah untuk memulihkan kemampuan mereka, sehingga mampu menunaikan kewajibannya kepada Allah swt dan keutuhan akidah serta akhlakunya serta dari segala akibat kemiskinan yang dialaminya.

³³ Abudin Nata, et.al., *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/Sedekah*, (Jakarta : BAZIS DKI Jakarta, 1999), hlm. 64-72.

- b. Membayar zakat itu hakikatnya untuk kepentingan diri orang kaya itu sendiri, yaitu menyucikan jiwa dan harta dari berbagai noda dan dosa, memperhalus budi pekerti dengan sifat pemurah dan menjauhkan sifat pelit dan egoistis, bersikap toleran, menjaga amanah dan menyampaikan hak kepada mereka yang berhak.
- c. Bahwa mensyukuri nikmat adalah wajib baik ditinjau secara logika maupun secara syari'at dan etika, sedangkan membayar zakat merupakan salah satu wujud mensyukuri nikmat Allah swt.
- d. Jika diperhatikan secara seksama, salah satu penyebab terjadinya kebinasaan umat terdahulu karena kebakhilan orang-orang kaya yang tidak mau memperhatikan nasib orang-orang miskin yang hidup serba kekurangan.³⁴

Secara filosofis, fakta dan realitas manusia dikotakkan oleh Allah swt menjadi dua golongan, yaitu kaya dan miskin, harus difahami sebagai kerangka rencana Tuhan dalam menciptakan keseimbangan yang harmonis dan mewujudkan keadilan yang hakiki serta mendidik manusia supaya menghayati dan menerapkan sikap dan perilaku yang berkeadilan (*ummatan wasathan*).³⁵

Secara sosiologi, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk sosial mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain. Meskipun kejahatan sering merajalela di muka bumi, namun sejalan dengan itu sifat dan rasa belas kasihan dan tolong-menolong sudah menjadi budaya sejak adanya manusia dan tidak akan pernah hilang. Justru itu

³⁴ Abdurrahman Qadir, *op.cit.*, hlm. 53-54.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

zakat merupakan suatu kewajiban yang abadi, yang sudah disyari'atkan kepada umat-umat sebelum Islam.³⁶

C. Syarat-syarat dan Jenis Harta yang Wajib Dizakatkan

1. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakatkan

Tidak semua jenis harta diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah, para ulama telah menyusun kriteria jenis harta yang wajib dizakatkan. Apabila harta seseorang tidak memiliki kriteria yang telah ditetapkan, maka tidak ada kewajiban zakat padanya, meskipun secara nominal jumlahnya telah melebihi ukuran *Nishâb*. Karena masih ada sisi-sisi dan kriteria-kriteria tertentu lainnya yang harus dipenuhi. Ada 6 kriteria utama harta itu menjadi wajib untuk dikeluarkan zakatnya yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu :³⁷

- a. Harta itu dimiliki secara sempurna (المالك التام).

Yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara sempurna adalah keberhakan seseorang yang diberikan oleh Allah swt untuk menyimpan, memiliki serta menguasai harta itu sepenuhnya dan dia mampu untuk membelanjakannya

³⁶ *Op.cit.*, hlm. 55.

³⁷ Al-Qaradhawiy, *Fiqh Al-Zakâh*, *op.cit.* Juz I, hlm. 127-162.

atau memanfaatkannya, kapan pun dia mau melakukannya secara legal dan sah sesuai dengan ketentuanNya.³⁸

Berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki harta dengan tidak sempurna, di mana secara status harta itu adalah miliknya, namun dalam kenyataannya, harta itu tidak sepenuhnya dikuasainya.³⁹

b. Harta itu berpotensi untuk diproduksikan (النماء)

Yang dimaksud harta yang berpotensi untuk diproduksikan adalah bahwa harta itu adalah harta yang tumbuh atau bisa dikembangkan, atau dengan kata lain harta itu dapat diproduksitaskan. Dalam konteks ekonomi, harta itu dimiliki pokoknya namun bersama dengan itu, harta itu bisa memberikan keuntungan ekonomi, pendapatan atau bernilai investasi bagi pemiliknya.⁴⁰

Seperti uang yang diinvestasikan dalam usaha perdagangan. Di mana perdagangan itu sendiri akan memberikan keuntungan, sementara uang yang menjadi modalnya tetap utuh. Bergitu juga dengan harta berbentuk usaha pertanian, dimana seiring dengan berjalannya waktu, para petani akan memanen hasil dari bibit yang ditanamnya.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 129.

³⁹ Ketidaksempurnaan kepemilikan bisa juga berbentuk harta yang tidak dimiliki oleh orang tertentu, melainkan dimiliki secara kolektif oleh sekumpulan orang yang tidak bisa ditentukan jati diri pemiliknya satu per satu. Kepemilikan atas suatu harta secara kolektif tanpa diketahui secara pasti hak masing-masing, telah menggugurkan pengertian kepemilikan secara sempurna. Contoh-contoh lebih detail dari harta yang dimiliki secara tidak sempurna antara lain : *pertama*, uang yang dipinjam (piutang) dan tidak jelas statusnya, akan kembali atau tidak; *kedua*, harta yang telah diwaqafkan untuk umat (penguasaannya diamanahkan kepada *nadzir waqaf*); *ketiga*, harta hasil usaha yang haram, karena pada hakikatnya penguasaannya tergolong ilegal (*ghulul*) dan tidak diridhai oleh Yang Maha Pemilik harta (Allah swt); *keempat*, harta yang dikumpulkan untuk pihak tertentu secara massal (seperti uang kas lembaga sosial, atau untuk bantuan bencana alam dan lain-lain); *kelima*, Harta milik negara; dan yang *keenam*, harta pinjaman. Lihat Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakâh*, *op.cit.*, Juz I, hlm. 131-139.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 139.

c. Harta itu memenuhi ukuran *Nishâb* (بلوغ النصاب)

Apabila suatu harta belum memenuhi jumlah tertentu, maka belum ada kewajiban zakat atas harta itu. Namun sebaliknya, apabila jumlahnya telah sampai pada batas tertentu atau lebih, barulah ada kewajiban zakat atasnya. Jumlah tertentu ini kemudian disebut dengan istilah *Nishâb*.⁴¹

d. Harta itu telah melebihi kebutuhan dasar (الفضل عن الحوائج الأصلية)

Sebagian ulama menambahkan syarat lainnya, yaitu bahwa sebuah harta baru diwajibkan untuk dizakatkan, manakala pemiliknya telah terpenuhi hajat dasarnya (*al-hajat al-dharuriyyah*) atas harta itu.⁴²

e. Terbebas dari utang (السلامة من الدين)

Sebagian ulama menambahkan syarat terakhir, yaitu bila seseorang memiliki harta yang memenuhi kriteria di atas, namun dirinya sendiri punya utang

⁴¹ Nisab masing-masing jenis harta sudah ditentukan langsung oleh Rasulullah saw. Dan kalau dikomparasikan antara nisab jenis harta tertentu dengan nisab lainnya dari nilai nominalnya, maka sudah pasti tidak sama. Misalnya, nishab zakat emas adalah 85 gram. Sedangkan nisab zakat beras adalah 520 kg. Bila dinilai secara nominal, harga 85 gram emas itu berbeda dengan harga 520 kg beras. Perlu disadari, bahwa jenis harta itu memang berbeda-beda, maka wajar pula bila nilai nominal nisabnya pun berbeda pula. Akan tetapi masing-masing ketentuan *Nishâb* itu ada hikmahnya.

Yusuf Al-Qaradhawi mengutip pendapat Syekh Islam Al-Dahlawi, yang menjelaskan bahwa hikmah ketentuan *Nishâb* lima kwintal bijian dan kurma itu sesuai dengan kebutuhan minimal rumah tangga (yang terdiri dari minimal seorang suami, seorang istri, seorang pembantu dan seorang anak) selama setahun. Dan besar kebutuhan makanan pokok seseorang adalah satu kati atau satu gantang beras, yang apabila masing-masing makan sebanyak itu diperkirakan bagi mereka cukup untuk ukuran satu tahun, dan sisanya dapat untuk keperluan lauk pauk dan simpanan. Lihat Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakâh, ibid.*, Juz I, him. 150.

⁴² Yang dimaksud dengan kebutuhan atau hajat dasar tentu saja relatif, namun bukan berarti setiap orang berhak menentukan sendiri apa kebutuhannya. Yang dimaksud adalah kebutuhan yang memang benar-benar mendasar buat seorang manusia untuk bisa menyambung hidupnya. Misalnya, kebutuhan untuk makan dan mengisi perutnya, kebutuhan untuk bisa menutup auratnya dengan pakaian yang layak, kebutuhan untuk bisa berlindung di bawah dengan memiliki rumah, meskipun seadanya atau sekedar dirinya bisa terlindung dari terik matahari, curah hujan atau kedinginan.

kepada pihak lain, maka dia tidak lagi punya kewajiban membayar zakat. Karena zakat itu diwajibkan atas orang kaya, sedangkan seseorang tidak dapat disebut kaya apabila kekayaannya itu diperoleh dari utang, kecuali apabila ia mampu melunasinya.

Namun yang dimaksud dengan utang disini bukan sembarang utang. Maksudnya adalah utang yang besar di mana bila hartanya itu dikurangi dengan nilai kewajiban yang harus dibayarkan, maka utang itu membuat harta yang dimilikinya tidak lagi memenuhi *Nishâb* zakatnya. Dalam keadaan demikian, maka gugurlah kewajiban zakat baginya. Sebab pada hakikatnya orang itu sebenarnya tidak punya harta yang memenuhi *Nishâb* zakat. Sehingga bagaimana mungkin dia diwajibkan untuk membayar zakat ?, sementara hartanya yang banyak itu, sejatinya bukanlah miliknya yang hakiki, tetapi adalah utang yang harus dibayar.

f. Telah mencapai batas waktu (*haul*) tertentu (حولان الحول)

Para ulama telah menetapkan bahwa bila seseorang memiliki harta dalam waktu singkat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang kaya. Sehingga ditetapkan harus ada masa kepemilikan minimal atas sejumlah harta, agar pemiliknya dikatakan sebagai orang yang wajib membayar zakat.

Yang penting untuk diketahui, bahwa batas kepemilikan ini dihitung berdasarkan lama satu tahun Hijriyah bukan dengan hitungan tahun Masehi. Dan sebagaimana diketahui, bahwa jumlah hari dalam setahun dalam kalender Hijriyah lebih sedikit dan seimbang dibandingkan kalender Masehi yang lebih banyak dan berbeda dari setiap pergantian tahunnya. Bila seseorang pada tanggal 1 Muharram 1432 H mulai memiliki harta yang memenuhi syarat wajib zakat, maka setahun

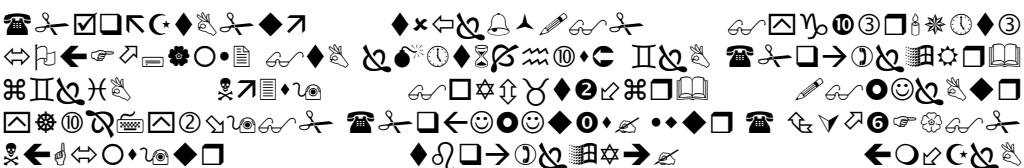
2. Jenis-jenis Harta yang Wajib Dizakatkan

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(سورة التوبة: 103\9)

Imam al-Qurthubiy menafsirkan ayat ini bahwa zakat itu diambil dari semua jenis harta yang dimiliki, meskipun Nabi saw selanjutnya mengemukakan perincian harta yang wajib dizakatkan.⁴³ Karena kepemilikan harta dengan cara apapun yang halal lagi baik dapat menyebabkan pemiliknya menjadi kaya (mencapai kadar *Nishâb* dan *haul*), mampu memenuhi melebihi kebutuhan pokoknya, maka wajib mengeluarkan zakatnya sesuai dengan kadarnya.

Zakat juga dapat diambil dari setiap hasil usaha yang halal lagi baik, dari hasil eksploitasi sumber daya alam, dan lain sebagainya, seperti digambarkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 :



⁴³ Al-Qurthubiy, Juz X, hlm. 359.



(سورة البقرة : 2\267)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-amwal* bentuk jamak dari kata *maal*) adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpannya dan memilikinya. Dengan demikian, maka unta, sapi, kambing, tanah (perkebunan), korma, emas dan perak adalah kekayaan.⁴⁴ Sehingga dengan perkembangan perekonomian modern saat ini, segala sesuatunya yang diperoleh secara halal lagi baik, dapat dimanfaatkan nilai dan harganya, maka dapatlah dikategorikan sebagai harta kekayaan yang dimaksud dan potensial untuk dikelurakan zakatnya.

Jenis harta yang wajib dizakatkan dapat diklasifikasikan kepada lima kelompok, yang mana masing-masing jenis harta tersebut kadar *Nishâb*nya telah ditetapkan.

Pertama, emas, perak dan uang tunai (زكاة النقود : الذهب والفضة والورق النقدي),

kedua, hasil tambang, barang temuan dan harta terpendam (زكاة المعادن والركاز أو الكنز),

ketiga, hasil perniagaan/perdagangan (زكاة عروض التجارة), *keempat*, hasil usaha

⁴⁴ Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakâh*, op.cit., Juz I, hlm. 124.

pertanian dan buah-buahan (زكاة النبات أو الخارج من الأرض), *kelima*,

hewan dan binatang ternak tertentu (زكاة الحيوان أو الأنعام).⁴⁵

Ulama kontemporer, di antaranya Yusuf Al-Qaradhawi, memerinci ada beberapa jenis harta kekayaan (selain yang disebutkan di atas) yang berkembang saat ini yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁶ Akan tetapi apabila dianalisa, ketentuan dari masing-masing zakat harta tersebut tetap mengacu pada ketentuan lima pokok atau kelompok jenis harta yang wajib dizakatkan di atas, masing-masing disesuaikan dengan sifat dan sumber kekayaan tersebut. Secara terperinci akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Zakat aset keuangan : emas, perak dan uang tunai

(زكاة النقود : الذهب والفضة والورق النقدي)

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya mengeluarkan zakat dari harta simpanan, baik berupa uang tunai yang dimiliki (dicetak), potongan emas, berupa

⁴⁵ Al-Zuhailiy, *Al-Fi qh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, Juz II, *op.cit.*, hlm. 759-832. Lihat juga Abdurrahman Al-Jaziri, Juz I, *op.cit.*, hlm. 541. Lihat juga Al-Saiyid Al-Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo : Al-Fath Li Al-A'lam Al-'Arabiyy, t.th.), Juz I, hlm. 243.

⁴⁶ Al-Qaradhawiy, dalam kitabnya *Fiqh Al-Zakâh*, mengklasifikasikan jenis harta yang wajib dizakatkan itu menjadi sembilan bagian ; *pertama*, zakat hasil pengembangan hewan ternak (زكاة الثروة الحيوانية); *kedua*, zakat emas dan perak (زكاة الذهب والفضة); *ketiga*, zakat hasil kekayaan dagang (زكاة الثروة التجارية); *keempat*, zakat hasil pertanian (زكاة الثروة الزراعية); *kelima*, zakat madu dan produksi hewani (زكاة العسل والمنتجات); *keenam*, zakat barang tambang dan hasil laut (زكاة الثروة المعدنية والبحرية); *ketujuh*, zakat investasi gedung, pabrik dan lain-lain (زكاة المستغلات : العمارات والمصانع ونحوها); *kedelapan*, zakat pencarian dan profesi (زكاة كسب العمل); *kesembilan*, zakat saham dan obligasi (زكاة الأسهم والسندات). Lihat Al-Qaradhawiy, *Fiqh Al-Zakâh*, *op.cit.*, Juz I, hlm. 167-521.

bejana, perhiasan yang disimpan (selain barang perhiasan yang dipakai) atau perak setelah mencapai *Nishâb* dan *haul*.⁴⁷

1) Uang tunai, (baik berupa mata uang kertas maupun mata uang logam).

Satuan uang yang sah (legal) merupakan unsur pokok dalam sistem keuangan di manapun, karena ia menjadi pedoman dan standar resmi yang ditentukan, baik berupa kepingan uang emas, perak, dan lainnya.

Sejak emas tidak dibenarkan lagi sebagai alat tukar umum dalam jual beli dan transaksi lainnya, uang telah menjadi harta yang berharga dan dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya. Maka harta berupa uang adalah termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila jumlah nilai uang tersebut telah mencapai ukuran *Nishâb*⁴⁸ emas yaitu sebanyak 20 *mitsqal* atau dinar. Atau sebanding dengan timbangan emas 85 gram dan perak sebanyak 595 gram, dan telah mencapai *haul* serta terbebas dari utang maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak sepersepuluhnya (yaitu 2 1/2 %).⁴⁹

2) Emas, perak dan perhiasan yang disimpan

Emas, perak dan perhiasan yang disimpan (selain perhiasan yang dipakai sehari-hari menurut ukuran yang wajar) seperti barang antik/seni, bejana, perhiasan mulia/mahal dan lain-lain adalah harta yang berharga yang wajib

⁴⁷ Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, op.cit., Juz II, hlm. 759.

⁴⁸ Satu *mitsqal* emas dibulatkan menjadi 4,25 gram dikali 20 *mitsqal* sehingga *Nishâb* emas untuk ukuran wajib zakat menjadi 85 gram emas. Sedangkan *Nishâb* perak adalah $200 \times 2,975 = 595$ gram perak. Maka barang siapa memiliki emas batangan, uang dari leburan emas atau uang tunai yang senilai dengan 85 gram emas maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2 1/2 %. Begitu juga dengan perak murni baik dalam berupa uang maupun leburan perak setimbang 595 gram, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2 1/2 %. Lihat Al-Qaradhaviy, *Fiqh Al-Zakâh*, op.cit., Juz I, hlm. 260.

⁴⁹ Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, op.cit., Juz II, hlm. 773.

dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *Nishâb* dan *haul*nya. Kadar *Nishâb*nya adalah 20 *mitsqat* atau dinar.⁵⁰

b. Zakat hasil tambang, barang temuan dan harta yang terpendam

(زكاة المعادن والركاز أو الكنت)

1) Barang tambang (معدن)

المال الذي خلقه الله في الأرض يوم خلق الأرض⁵¹

Artinya : “Barang/harta yang terdapat dalam bumi, yang telah diciptakan oleh Allah swt dari awal penciptaan bumi ini”.

Jenis ini mencakup barang tambang apa saja yang bernilai seperti emas, perak, besi, timah, logam, batu mulia, kristal, akik, belerang, aspal dan lain-lain. Secara umum barang temuan (الركاز) penyebutannya berlaku untuk kedua jenis *kanz* dan *ma’dan* dan wajib dikeluarkan seperlimanya, berdasarkan hadits Nabi saw :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس⁵²

Artinya : “‘Ajma’ (tanah yang di dalamnya tidak terdapat pepohonan) adalah jubar (tidak ada apapun di dalamnya), sumur juga jubar, barang tambang juga jubar dan rikaz (barang temuan) ada kewajiban *khumus* (seperlima/20 %)”.

⁵⁰ Ibid., hlm. 764.

⁵¹ Ibid.

⁵² Al-Zubaidiy, *Al-Tajrid Al-Sharîh Li Ahâdits Al-Jâmi’ Al-Shahîh*, Juz I, hlm. 105.

Apabila diklasifikasikan, jenis hasil tambang itu ada tiga macam, yaitu :

Pertama, hasil tambang yang keras dan dapat dilunakkan seperti dengan menggunakan api untuk dimanfaatkan oleh manusia, di antaranya adalah emas, perak, batu permata, mutiara dan logam/besi.

Kedua, hasil tambang yang keras namun tidak dapat dilunakkan dengan api untuk dimanfaatkan oleh manusia, seperti pasir dan kerikil.

Dan yang *ketiga*, hasil tambang yang lunak atau cair, seperti minyak dan gas. Mengeluarkan zakatnya (hasil tambang) adalah langsung setelah memperolehnya yaitu sebanyak 20 % atau 1/5 dari hasil penambangan secara keseluruhan, tidak disyaratkan adanya ketentuan *haul*.

2) Barang temuan (الركاز)

Barang temuan (الركاز) adalah :

الركاز هو الكنز أو المال المدفون في الأرض فهو دفن الجاهلية⁵³

Artinya : “*Rikaz adalah harta terpendam atau harta yang ditimbun ke dalam bumi di masa Jahiliyah*”.

Barang temuan (الركاز) ini penyebutannya berlaku untuk kedua jenis

kanz dan *ma'dan* dan wajib dikeluarkan seperlimanya, berdasarkan hadits yang disebutkan di atas.

3) Harta/barang terpendam (كنز)

Yang dimaksud dengan harta terpendam (كنز) adalah :

⁵³ *Al-Qamus Al-Islâm Li Al-Nasyî'in Wa Al-Syabâb Fî Bâb Al-Zakâh*, Jilid IV, hlm. 34.

المال الذي دفنه بنو آدم في الأرض⁵⁴

Artinya : “Harta/barang yang dipendam/ditimbun ke dalam tanah oleh manusia”.

Jenis barang terpendam ini dapat mencakup semua jenis harta seperti emas, perak, besi, timah, kuningan, logam dan lain-lain yang secara sengaja disembunyikan/disimpan di dalam tanah oleh manusia.

Penulis berpendapat, bahwa dari jenis hasil tambang, barang temuan dan harta yang terpendam (زكاة المعادن والركاز أو الكتن) ini yang dimaksud adalah semua jenis barang atau harta yang diperoleh dari hasil pertambangan (eksplorasi) dari perut bumi, hanya saja berbeda cara perhitungannya.

Apabila ia tergolong pada jenis emas maka nishabnya adalah 20 *mistqat*, dan apabila ia berupa jenis perak, maka *Nishâbnya* adalah 200 dirham. Maka apabila kedua jenis tersebut telah mencapai ukuran nishab di atas, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 20 % atau 1/5 dari keseluruhannya. Sedangkan selain dari kedua jenis di atas, maka dikeluarkan zakatnya seharga dengan nilai *Nishâbnya*, berdasarkan pada keumuman ayat 267 surat al-Baqarah di atas.

c. Zakat hasil perdagangan (زكاة عروض التجارة)

Yang dimaksud dengan hasil perdagangan adalah :

ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب الزكاة فيه زكاة العين كالإبل والغنم
والبقر أو لا كالثياب والحمير والبغال⁵⁵

⁵⁴ Lihat Abdul Karim Zaidân, *op.cit.*, Juz I, hlm. 397.

⁵⁵ *Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah*, (Kuwait : Wizarat Al-Auqaf Wa Al-Syu'un Al-Islâmiyah, 1412 H/1992 M), Cet. ke-2, Juz XXIII, hlm. 268.

Artinya : “Setiap apa saja yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan (*niaga*) yang mana jenisnya itu dapat berupa harta yang wajib dizakatkan seperti unta, kambing dan kerbau atau bukan sejenis harta yang wajib dizakatkan seperti pakaian, keledai atau kuda.

Dari definisi zakat perdagangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan hasil perdagangan adalah selain uang tunai dalam berbagai jenisnya, yakni semua yang diperuntukkan untuk dijual (guna memperoleh keuntungan) yang meliputi alat-alat, barang, pakaian, makanan, perhiasan, hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, rumah, dan sebagainya baik berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak.⁵⁶ Termasuk dalam hal ini hasil investasi gedung, ruko, pabrik dan lain-lain yang diperjualbelikan.⁵⁷ Zakat hasil perdagangan ini wajib dikeluarkan setiap tahunnya (mencapai *haul*) selama nilainya berikut dengan keuntungannya mencapai *Nishâb*.⁵⁸

Untuk ketentuan zakat hasil perdagangan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Nilainya telah mencapai ukuran *Nishâb* emas atau perak yang dibentuk, dan nilai harganya disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah atau yang dekat dengan daerah tersebut;

⁵⁶ Al-Qaradhawiy, *Fiqh Al-Zakâh*, *op.cit.*, Juz I, hlm. 313-314.

كل ما عدا النقدين مما يعد للتجارة من المال على اختلاف أنواعه مما يشمل الآلات والأمتعة والثياب والمأكولات والحلي والجواهر والحيوانات والنباتات والأرض والدور وغيرها من العقارات والمنقولات

⁵⁷ Yusuf Al-Qaradhawiy memasukkan jenis ini sebagai bagian dari harta zakat kontemporer. Lihat Al-Qaradhawiy, *Fiqh Al-Zakâh*, *op.cit.*, hlm. 458.

⁵⁸ Abdul Karim Zaidân, Juz I, hlm. 389.

- 2) Nilai harta tersebut telah mencapai dua sisi masa *haul* (*hulan al-haul*) terhitung dari awal dimilikinya harta tersebut sampai akhir tahun harta itu dimiliki;
- 3) Bermiat melakukan perdagangan saat membeli barang dagangan itu. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dinilai;
- 4) Barang-barang dagangan itu harus dimiliki melalui pertukaran, seperti melalui transaksi jual beli atau sewa-menyewa;
- 5) Harta dagangan itu tidak dimaksudkan sebagai "*al-qinyah*" (sengaja dimanfaatkan untuk diri sendiri dan tidak diperdagangkan);
- 6) Ketika perjalanan *haul*, agar semua harta perdagangan jumlahnya mencukupi *Nishâb*, dan *ketujuh*, zakat tidak berkaitan dengan harta itu sendiri, seperti pakaian dan buku. Dengan demikian, jika harta yang diperdagangkan itu berupa harta yang *Nishâb* dan zakatnya telah ada ketentuannya sendiri seperti emas, perak, hewan ternak dan kebun, maka zakatnya wajib dikeluarkan seperti halnya zakat *naqdain* (emas dan perak), hewan dan kebun.⁵⁹

d. Zakat hasil pertanian dan tumbuh-tumbuhan

(زكاة الزروع والثمار : النبات أو الخارج من الأرض)

Produk pertanian merupakan salah satu penghasilan masyarakat yang telah dikaruniakan oleh Allah swt. Jumbuh ulama, terdiri dari sahabat, tabi'in dan para

⁵⁹ Lihat Wahbah Al-Zuhailiy, *op.cit.*, hlm. 787-792.

Ketentuan mencapai lima *autsaq* (653 kg.) ini berpedoman pada hadits Nabi saw yang berbunyi :

Artinya : “Tidak ada kewajiban zakat yang kurang dari lima autsad”.

[illegible]

Demikian juga dengan keumuman teks hadits Nabi saw :

⁶¹ QS. Al-Baqarah (2) : 267.

ما سقته السماء ففيه العشر وما سقى بغرب أو دالية نصف العشر⁶²

Artinya : “Tanaman yang disiram oleh air hujan (dari langit) maka wajib mengeluarkan zakat sepersepuluhnya, dan tanaman yang disiram dengan menggunakan alat penyiram (*gharb*) atau aliran irigasi maka zakatnya adalah seperduapuluh”.

Di antaranya adalah berupa kurma, anggur, sawit, karet, cengkeh, padi, gandum, dan lain-lain. Kadar *Nishâb* dari hasil pertanian dan buah-buahan ini adalah apabila telah mencapai lima *autsaq*.⁶³

e. Zakat hewan dan hasil peternakan (زكاة الحيوان أو الأنعام)

Berkaitan dengan hewan ternak, para ulama telah sepakat bahwa kewajiban zakat pada jenis hewan ternak tergolong kepada tiga jenis, yaitu unta, sapi atau kerbau dan kambing atau domba, dengan syarat bahwa apabila telah mencapai *Nishâb* dan *haul*, bukan dipergunakan untuk keperluan sendiri dan masing-masing jenis hewan ini adalah hewan yang ditemakkan.⁶⁴

Maka selain dari tiga jenis hewan di atas, yang kini dalam perekonomian modern berkembang dengan pesat, maka ketentuananya tidak termasuk dalam

⁶² Abdul Karim Zaidân , *op.cit.*, hlm. 391.

⁶³ Ini adalah pendapat mayoritas ulama (*jumhur al-ulamâ*) di antaranya Ibn Umar, Jabir, Umar Bin Abdul ‘Aziz, Al-Hasan, ‘Athâ’, Makhul, Al-Nakha’iy, Malik, Al-Tsauriy, Al-Auza’iy, ibn Abi Laila, Al-Syâfi’iy, Ahmad Bin Hanbal, dan Abu Yusuf (sahabat Abu Hanifah).

Lihat Abdul Karim Zaidân , Juz I, *op.cit.*, hlm. 391. Lihat Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, *op.cit.*, Juz II, hlm. 810-811.

⁶⁴ Lihat Abdurrahman Al-Jaziriy, Juz I, *op.cit.*, hlm. 541. Lihat juga Abdul Karim Zaidân , Juz I, *op.cit.*, hlm. 383. Lihat Al-Saiyid Sabiq, Juz I, *op.cit.* hlm. 259-260.

kategori zakat hewan ternak. Akan tetapi termasuk pada kategori zakat perdagangan, karena memang dari awal jenis hewan selain tiga jenis itu ditemakkan dan diniatkan sebagai komoditas perdagangan. Berikut ini diklasifikasikan berdasarkan jenis masing-masing hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya :

Tabel *Nishâb* Zakat Unta dan Kadar Jumlahnya yang Dizakatkan⁶⁵

<i>NISHÂB</i>	BANYAKNYA/JENIS ZAKAT YANG HARUS DIKELUARKAN
5 s.d. 9 ekor unta	satu ekor domba/kambing
10 s.d. 14 ekor unta	dua ekor domba/kambing
15 s.d. 19 ekor unta	tiga ekor domba/kambing
20 s.d. 24 ekor unta	empat ekor domba /kambing
25 s.d. 35 ekor unta	satu unta betina usia satu tahun masuk usia tahun ke dua (ابنة مخاض) atau satu unta jantan usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga (ابن لبون ذكر)
36 s.d 45 ekor unta	satu unta betina berusia dua tahun penuh masuk usia tahun ke tiga (بنت لبون)
46 s.d. 60 ekor unta	satu ekor unta berusia tiga tahun masuk tahun ke empat (حقة)
61 s.d. 75 ekor unta	satu ekor unta berusia empat tahun masuk usia tahun ke lima (حذعة)
76 s.d. 90 ekor unta	dua ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga (ابنتا لبون)
91 s.d. 120 ekor unta	dua ekor unta usia tiga tahun masuk usia tahun ke empat (حقتان)
121 s.d. 129 ekor unta ⁶⁶	tiga ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga (بنات لبون)
130 s.d. 139 ekor unta	satu ekor unta berusia tiga tahun masuk tahun ke empat (حقة) ditambah dua ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga (ابنتا لبون)
140 s.d. 149 ekor unta	dua ekor unta berusia tiga tahun masuk tahun ke empat (حقتان) ditambah dua ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga (ابنتا لبون)
150 s.d. 159 ekor unta	tiga ekor unta berusia tiga tahun masuk tahun ke empat (حقائق)
160 s.d. 169 ekor unta	empat ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga (بنات لبون)
170 s.d. 179 ekor unta	tiga ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga (بنات لبون) ditambah satu ekor unta berusia tiga tahun masuk usia tahun ke empat (حقة)
180 s.d. 189 ekor unta	dua ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga (ابنتا لبون) ditambah dua ekor unta usia tiga tahun masuk usia tahun ke empat (حقتان)

⁶⁵ Muhammad Ali Al-Hamsyariy, et.al., *Al-Qarnus Al-Islâmiy Li Al-Nasyi'in Wâ Al-Syabab*, (Riyad : Maktabah Al-'Abikan, 1418 H/1997 M), Cet. ke-1, Juz IV, hlm. 46. Lihat Abdul Karim Zaidân , Juz I, *op.cit.*, hlm. 383-384.

⁶⁶ Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang lebih dari 120 ekor unta. Lihat Abdul Karim Zaidân , Juz I, *op.cit.*

190 s.d. 199 ekor unta	tiga ekor unta berusia tiga tahun masuk tahun ke empat (حَقَّاقٌ) ditambah satu unta betina berusia dua tahun penuh masuk usia tahun ke tiga (بنت لبون)
200 s.d. 209 ekor unta ⁶⁷	empat ekor unta berusia tiga tahun masuk tahun ke empat (حَقَّاقٌ) ditambah lima ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga (بنات لبون)

Tabel *Nishâb* Zakat Sapi/Kerbau dan Kadar Jumlahnya yang Dizakatkan⁶⁸

NISHÂB	BANYAKNYA/JENIS ZAKAT YANG HARUS DIKELUARKAN
-	Jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada zakat pada jenis sapi/kerbau kecuali telah mencapai jumlah 30 ekor
30 s.d. 39 ekor sapi/kerbau	Satu ekor sapi/kerbau berusia satu tahun (تبيع أو تبيعة)
40 s.d. 59 ekor sapi/kerbau	Satu ekor sapi/kerbau berusia dua tahun (مُسِنَّةٌ)
60 s.d. 69 ekor sapi/kerbau	Dua ekor sapi/kerbau berusia satu tahun (تبيعان أو تبيعتان)
70 s.d. 79 ekor sapi/kerbau	Satu ekor sapi/kerbau berusia dua tahun dan satu ekor sapi/kerbau berusia satu tahun (تبيع ومسننة)
Setelah lebih dari jumlah di atas, setiap tambahan 30 ekor sapi/kerbau dikeluarkan tambahan satu ekor sapi/kerbau berusia satu tahun (تبيع) dan setiap tambahan 40 ekor sapi/kerbau dikeluarkan tambahan satu ekor sapi/kerbau berusia dua tahun (مُسِنَّةٌ)	

Tabel *Nishâb* Zakat Kambing/Domba dan Kadar Jumlahnya yang Dizakatkan⁶⁹

NISHÂB	BANYAKNYA/JENIS ZAKAT YANG HARUS DIKELUARKAN
-	Tidak ada zakat pada jenis kambing kecuali telah mencapai jumlah 40 ekor
40 s.d. 120 ekor kambing/domba	Satu ekor domba/kambing
121 s.d. 200 ekor kambing/domba	Dua ekor domba/kambing
201 s.d. 400 ekor kambing/domba	Tiga ekor domba/kambing
400 ekor kambing/domba	Empat ekor domba/kambing
Setiap tambahan 100 ekor kambing/domba dikeluarkan tambahan satu ekor kambing/domba	

⁶⁷ Muhammad Ali Al-Hamsyariy, et.al., Juz IV, *op.cit.*

⁶⁸ Abdul Karim Zaidân, Juz I, *op.cit.*, hlm. 385.

⁶⁹ *Ibid.*

Hewan ternak selain yang disebutkan di atas seperti jenis kuda, keledai atau himar tidak wajib dizakatkan kecuali jika jenis ini dijadikan komoditas perdagangan.⁷⁰ Begitu juga dengan jenis hewan ternak pada era modern saat ini yang termasuk dalam komoditas perdagangan (menghasilkan untung yang banyak), seperti ikan, jenis unggas (ayam dan itik pedaging, ayam dan itik petelur, dan lain-lain), burung walet, jangkrik, kelinci dan lain-lain maka ketentuannya *Nishâbnya* termasuk dalam kategori harta perdagangan, karena ia menjadi komoditas perdagangan.⁷¹

D. Hikmah dan Fungsi Zakat

1. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimai'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) dan harus diterima secara *ta'abbudiy*, karena ia bernilai ritual dan ibadah *mahdhah* kepada Allah swt. Di samping itu juga zakat sekaligus merupakan ibadah yang bersentuhan langsung dengan urusan sesama makhluk (*ibâdah ghair mahdhah*) karena ia memiliki dimensi ekonomi. Bahkan, dalam

⁷⁰ Abdurrahman Al-Jaziry, *op.cit.* Lihat

⁷¹ Perhitungan zakat pada barang-barang (komoditas) perdagangan adalah; *pertama*, modal bersih pemilik harta apabila telah mencapai batas *Nishâb* (setara dengan nilai emas dan perak), dan telah melewati masa *haul* (hitungan tahun hijriyah), *kedua*, kalkulasi keuntungan yang dihasilkan setelah dikeluarkan biaya dan administrasinya. Kedua ketentuan tersebut kemudian digabungkan dan dihitung banyaknya, untuk dihitung zakatnya sebanyak 2,5 % dari total keuntungan.

perspektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal.

Dalam ajaran Islam, zakat adalah satu-satunya mekanisme teknis yang diungkap secara detil, yang memadukan aspek dimensi ibadah *mahdlah* dan dimensi ibadah sosial (*ghair mahdlah*). Sebagai bukti antara lain kewajiban mengeluarkan zakat, kelompok penerima zakat, maupun prosentase yang harus dikeluarkan, telah diatur sedemikian lengkap oleh Islam, baik sebagaimana yang tertera dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi. Tentu saja hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa zakat inilah solusi terhadap berbagai problematika ekonomi umat, terutama di dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Ditinjau dari dimensi pembangunan masyarakat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan pengolahan zakat yang baik, sangat dimungkinkan mampu membangun suatu pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan pada saat yang bersamaan. Dalam kondisi riil, disadari bahwa tidak semua pelaku ekonomi dalam mekanisme tersebut akan memperoleh keberuntungan yang sama. Zakat sebagai sumber dana sosial kaum muslimin, sebenarnya, memiliki potensi yang besar bagi pendanaan aktifitas peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi kaum muslimin.

Ibadah zakat sedikit agak sulit untuk difahami dan diyakini oleh sebagian manusia karena ia menyangkut materi yang paling disayangi. Hal ini wajar karena manusia dikaruniai Allah swt potensi untuk cenderung menyayangi harta, sebagai mana Allah swt berfirman :

﴿لَا يَرْضَىٰ لِحُرَّتِهِمْ هَبْءًا مِنْ مَالِهِمْ﴾
﴿لَا يَرْضَىٰ لِحُرَّتِهِمْ هَبْءًا مِنْ مَالِهِمْ﴾
﴿لَا يَرْضَىٰ لِحُرَّتِهِمْ هَبْءًا مِنْ مَالِهِمْ﴾



 (سورة آل عمران: 14\3)

Artinya : “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”.

Ibadah zakat juga mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat islam, yaitu *pertama*, untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah; *kedua*, zakat sebagai dana masyarakat (para *mustahiq* zakat) yang dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan sosial mereka guna mengurangi kemiskinan (*al-takâful al-ijtimâ'iy*).

Ali Ahmad Al-Jurjawi mengemukakan hikmah dan fungsi zakat itu di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menunaikan zakat merupakan bagian dari upaya menolong orang-orang yang lemah, susah dan tidak berdaya sehingga mereka mampu untuk menunaikan segala kewajibannya (tauhid dan ibadah) kepada Allah swt.
- b. Zakat itu berguna untuk menyucikan jiwa yang menunaikannya dari noda dosa, memperbaiki akhlaknya, menjadi orang yang dermawan dan santun, sehingga terbebas dari sifat tamak dan kikir, sehingga jiwa yang semula kikir pada harta menjadi terbiasa bermurah hati serta rela memberikan hak-hak orang lain yang menempel pada hartanya.

c. Ekspresi rasa syukur orang kaya dari segala karunia nikmat yang mereka rasakan serta harta kekayaan yang telah Allah swt berikan, sehingga mereka diperintahkan untuk menunaikan zakat kepada orang fakir.⁷²

Sebab, dari beberapa ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang muslim tidaklah bersifat absolut miliknya. Artinya, tidak ada kepemilikan aset kekayaan yang bersifat mutlak pada seseorang. Ada bagian/prosentase tertentu yang diatur oleh syariah sebagai milik orang lain, yaitu milik kelompok *dhuafa*.

﴿سُورَةُ الزَّكَاٰتِ﴾ (سورة الزاريات : 19\51) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْلِهِمْ هَدَاهُمْ﴾

Artinya : “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.

Pernyataan Allah SWT di atas menegaskan bahwa ada bagian tertentu dalam harta seseorang yang bukan merupakan miliknya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian harta tersebut harus dialirkan dan didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang yang membutuhkan (*al-sâil wa al-mahrûm*). Sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas, salah satunya adalah melalui syari'at zakat.

Sebagai sebuah instrumen, tentu saja zakat membutuhkan infrastruktur yang memadai, baik dalam bentuk regulasi dan kebijakan, hingga bentuk lembaga dan teknis operasional yang bersifat detil. Namun demikian, penulis berkeyakinan, jika fungsi zakat sebagai instrumen bagi redistribusi pendapatan dan kekayaan berjalan dengan baik, maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat diatasi.

⁷² Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuh*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1414 H/1994 M.), Juz I, hlm. 111-112.

Apabila diperhatikan prinsip-prinsip manajemen zakat yang diterapkan oleh Rasulullah saw, kemudian direalisasikan pada prakteknya di Indonesia saat ini, tidak mustahil angka-angka potensi zakat bisa diwujudkan. Jika hal itu terjadi, maka zakat akan benar-benar berfungsi sebagai instrumen fiskal Islami, yang akan sangat membantu keuangan Negara.

2. Fungsi Zakat

Sayyid Quthub menyebutkan setidaknya ada dua fungsi utama zakat :

- a. Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtimâ'iy*) dalam masyarakat muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Ada kalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
- b. Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (*al-dhamân al-ijtimâ'iy*), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupkan kebutuhan hidupnya.⁷³

Zakat akan berfungsi sebagai sumber perekonomian rakyat jika dikelola dengan baik, profesional dan bertanggungjawab. Untuk merealisasikan tujuan zakat ini, agar pengelolaan zakat terlaksanakan dengan baik, profesional dan bertanggungjawab, paling tidak harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

⁷³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 64. Mengutip pendapat Sayid Quthub, *Fi Zhilal Al-Qur'ân*, (Beirut : Dar Al-Ihya' Al-Turats Al-'Arabiyy, 1971), Juz X, hlm. 244.

- a. Perlu adanya sosialisasi zakat secara efektif, yaitu program untuk membangkitkan motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam dalam mengeluarkan zakat demi mengangkat harkat dan martabat hidup seluruh seluruh anggota masyarakat.
- b. Perlu menjadikan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, profesional, transparan, mandiri dan produktif.
- c. Adanya hasil nyata dan program konkrit yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya oleh para *mustahiq* zakat. Program itu harus menyentuh kebutuhan dasar para *mustahiq* seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.⁷⁴

E. Prinsip Kepemilikan pada Harta Zakat

Prinsip dasar yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits sangat memperhatikan masalah perilaku ekonomi manusia dalam memanfaatkan sumber material yang diciptakan Allah swt untuk manusia untuk memiliki harta, mengkonsumsinya dan memproduksi. Namun pada hakikatnya, kepemilikan mutlak itu ada pada Allah swt. Allah swt lah yang memiliki semua yang ada di langit, di bumi dan segala bentuk harta kekayaan yang diciptakan, dihibahkan dan diberikan serta dimudahkan pemanfaatannya oleh Allah swt bagi manusia.⁷⁵

⁷⁴ Said Agil Husin Al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'an dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta : Ciputat Press, 2005), Cet. ke-2, hlm. 284-285.

⁷⁵ Al-Qaradhawi, *Al-Ibâdah Fî Al-Islâm*, *op.cit.*, hlm. 247.

Dalam firmanNya Allah swt menyatakan :

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah swt dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah swt telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

Salah satu bentuk ketidakamanahan dan keingkaran itu adalah bakhil dan kikir, termasuk tidak mau menunaikan zakat. Untuk itu Allah swt meminta pertanggungjawaban dan akan menggantikan dengan orang atau kaum lain yang amanah.

Artinya : “Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir

sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri\, dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling niscaya dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini”.

Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan Syari'ah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis Syari'ah. Al-Qur'an telah memberikan gambaran tentang asal usul harta atau hak milik, yang pertama kali diberikan Allah kepada manusia pertama kemudian turun-temurun kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, awal sejarah kepemilikan sama dengan awal manusia itu sendiri. Selama hidup, manusia tidak akan pernah lepas dari masalah kepemilikan.

Ibnu Al-Subkiy dalam *Al-Kifâyah* mengatakan, terdapat dalam kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhâir Li Al-Suyuthiy*, bahwa sebab kepemilikan itu ada sembilan, yaitu ganti rugi, warisan, jual beli, pemberian, wasiat, wakaf, barang rampasan perang, menghidupkan tanah yang belum dimiliki orang lain dan sedekah (zakat).⁷⁶

Para ahli fiqh membagi kepemilikan menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Kepemilikan yang tetap seperti penguasaan terhadap barang yang mubah dan hasil dari kepemilikan.
2. Pemindahan kepemilikan yang sebelumnya merupakan kepemilikan orang lain seperti jual beli dan transaksi lainnya seperti ganti rugi.
3. Kepemilikan yang ditinggalkan seperti warisan dan wasiat.⁷⁷

⁷⁶ Al-Suyuthiy, *Al-Asybah Wa Al-Nazhâir Fi Furu'ih*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1403 h./1983 M), Cet. I, hlm. 317.

⁷⁷ Al-'Izz Abn 'Abd Al-Salam, *Qawa'id Al-Ahkâm*, jilid II, hlm. 86.

Perintah zakat pada dasarnya, merupakan sebuah upaya agar harta kekayaan dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Islam tidak menginginkan harta kekayaan tersebut hanya beredar dikalangan tertentu saja dalam masyarakat.

Sebuah peringatan yang justru tengah terjadi dalam dinamika ekonomi kontemporer, di mana para pemilik modal dapat leluasa mengakumulasi modal mereka secara tersistematis dan mampu menikmati kesejahteraan yang sangat layak. Sementara, kelompok masyarakat miskin selalu tertindas karena mereka tidak memiliki akses usaha dan modal (harta) sedikitpun untuk dapat menjalani kehidupan ekonomi mereka.

Harta dan kepemilikannya itu dalam Islam bukanlah sesuatu yang begitu saja dapat dimiliki dan digunakan secara bebas tanpa batas, akan tetapi ia mempunyai dimensi moral dan sakral yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemilik mutlaknyanya, yaitu Allah swt.⁷⁸

Islam memandang bahwa status kepemilikan harta bukanlah otoritas absolut individu. Artinya, manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta kekayaan yang mereka

⁷⁸ Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa segala apa yang dilakukan oleh *mukallaf* maka akan diminta pertanggungjawabannya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ *

Artinya : "Dari 'Abdullah bin 'Umar ra bahwa dia mendengar Rasulullah saw telah bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imâm (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". Dia ('Abdullah bin 'Umar ra) berkata: "Aku mendengar semua itu dari Rasulullah saw, dan aku munduga Nabi saw juga bersabda"; "Dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Lihat Al-Bukhari, *Al-Jâmi' Al-Shahîh*, Juz II, hlm. 178.

dapati, karena semua itu merupakan titipan dari Allah SWT. Ibadah zakat merupakan kewajiban bagi hamba (khalifah Allah swt), yang tidak hanya dibebankan pada individu melainkan juga bahwa negara mempunyai tanggungjawab dalam menjalankannya serta membagikan hasilnya secara adil kepada mereka yang berhak menerimanya.⁷⁹

Keterikatan manusia dengan ibadah yang bersifat keuangan merupakan unsur pendukung langsung yang mendorong manusia agar selalu mengusahakan dan mengembangkan harta, sebagai mana firman Allah swt :


 (سورة الوبه : 9\104)

Artinya : “*Tidakkah mereka mengetahui bahwa menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima tibat lagi Maha Penyayang*”.

Al-Qurthubiy menafsirkan kata “*ya’khudzu al-shadaqât*”, bahwa dari nash ini sangat jelas sekali bahwa Allah swt yang mengambil shadaqah (zakat) itu serta memberikan pahala kepada yang menunaikannya. Dan zakat itu merupakan hak Allah swt, sementara Nabi saw hanyalah sebagai perantara Allah swt (dalam mengambil zakat). Ketika Nabi telah wafat, maka amil zakat menjadi perantara (mengambil zakat) setelah Nabi. Oleh karena itu, *khitâb* ayat ini bukan hanya kepada Nabi saja, tetapi adalah kepada semua ummat.⁸⁰

Dari uraian di atas, maka dapat difahami bahwa fungsi amil zakat (*al-âmilîn*) merupakan pemegang amanah Allah swt dalam upaya mendistribusikan hak Allah swt

⁷⁹ Abdulhamid Mahmud Al-Ba’liy, *op.cit.*, hlm. 57.

⁸⁰ Al-Qurthubiy, Juz X, hlm. 366.

yang dikehendakiNya supaya diserahkan kepada para *mustahiq al-zakâh*. Dengan demikian, berarti peran dan fungsi amil zakat merupakan posisi yang sangat mulia dan wajib dilaksanakan dengan prinsip kerja keras, amanah, transparan, akuntabel, profesional dan proporsional.

Lebih lanjut, Islam menegaskan bahwa dalam harta yang diperoleh tersebut, di dalamnya, terdapat hak-hak orang lain yang harus mereka kembalikan kepada pemiliknya.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةَ مَا كَسَبْتُمْ مِنْ حَرْثٍ وَمِنْ رِغَالٍ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الرَّسُولِ إِنَّكُمْ لَعِنَائِي﴾

(سورة المعارج: 24-25)

Artinya : “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.

Dalam melaksanakan zakat, syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkannya adalah kepemilikan penuh dan dikuasakan oleh Allah swt kepemilikannya. Tidak ada sangkut paut dengan orang lain. Diberlakukan syarat dan ketentuan wajib zakat dari harta tersebut merupakan hak Allah swt yang akan diserahkan kepada yang berhak menerimanya (penyeimbangan penguasaan kekayaan). Oleh karena itu, maka arti hak (kepemilikan) dalam zakat merupakan salah satu hak dari hak-hak yang dimiliki oleh Allah swt. Sehingga para ahli *Syari'ah Islâmiyah* membagi hak menjadi empat bagian, yaitu :

1. Hak murni milik Allah swt.
2. Hak murni milik hamba.
3. Hak yang tergabung di dalamnya antara hak Allah swt dan hak hamba, tetapi hak Allah swt lebih besar.

4. Hak yang tergabung di dalamnya antara hak Allah swt dan hak hamba, tetapi hak hamba lebih besar.⁸¹

Kepemilikan dalam zakat yang dimaksud adalah bahwa zakat merupakan salah satu sebab kepemilikan bagi yang berhak menerimanya (*mustahiq al-zakâh*). Dengan adanya zakat maka mereka (*mustahiq al-zakâh*) dapat mewujudkan dan menutupi kebutuhannya (sebagai anugerah transformasi hak kepemilikan dari Allah swt untuk mereka) dan melakukan apa pun terhadap yang diterimanya. Dengan kata lain bahwa para *mustahiq* zakat memperoleh hak milik zakat dari Allah swt melalui orang-orang yang dikenakan kewajiban zakat (*muzakkiy*).

Pada hakikatnya, yang menerima terlebih dahulu zakat itu adalah Allah swt melalui perantaraan amil, baru kemudian diterima oleh para penerima zakat. Inilah yang dimaksudkan dengan zakat sebagai ibadah, karena ibadah adalah hak prerogatif Allah swt semata, sebagai mana dikatakan oleh Al-Kasâniy :

إِخْلَاصُ الْعَمَلِ بِكُلِّيَّتِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya : “Mengikhlaskan segala amal ibâdah seluruhnya hanya karena Allah swt”.⁸²

⁸¹ Abdul Hamid Mahmud Al-Ba’liyy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah*, Terjemahan Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 53-54.

⁸² Abdurrahman Qadir mengutip perkataan Al-Kasaniy, dalam kitabnya *Badai’ Al-Shana’i*, (Beirut : dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 891. Lihat Abdurrahman Qadir, *op.cit.* hlm. 65.

F. Sasaran Pendistribusian Zakat (*Mustahiq Zakat*)

Pada ayat 60 surat al-Taubah dijelaskan bahwa kelompok yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan (*ashnaf*). Maka harta zakat tidak boleh diberikan kepada selain dari delapan kelompok yang telah ditegaskan. Sebagai mana ditegaskan oleh Allah swt dalam firmanNya :

لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ مَالِهِمْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ سَبْعًا وَمَا لِلْفُقَرَاءِ مِنَ الْمَالِ لَهُمْ سَبْعًا وَمَا لِلْفُقَرَاءِ مِنَ الْمَالِ لَهُمْ سَبْعًا وَمَا لِلْفُقَرَاءِ مِنَ الْمَالِ لَهُمْ سَبْعًا وَمَا لِلْفُقَرَاءِ مِنَ الْمَالِ لَهُمْ سَبْعًا وَمَا لِلْفُقَرَاءِ مِنَ الْمَالِ لَهُمْ سَبْعًا وَمَا لِلْفُقَرَاءِ مِنَ الْمَالِ لَهُمْ سَبْعًا وَمَا لِلْفُقَرَاءِ مِنَ الْمَالِ لَهُمْ سَبْعًا (سورة التوبة: 60\9)

Artinya : “Sesungguhnya harta zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (*memerdekakan*) hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Allah swt dalam ayat ini menggunakan adat *hashar* “إنما”, bermaksud mengkhususkan yang berhak menerima zakat/sedekah wajib itu hanyalah delapan kelompok *ashnaf* yang disebutkan dalam ayat ini saja, tidak boleh menyimpang dari konteks ayat. Dan Allah swt juga mengkhususkan sebagian manusia dari yang lainnya dalam penerimaan nikmat harta, sebagai karunia, bukti kekuasaan Allah dan menjadikan mereka semakin bersyukur kepadaNya. Sehingga orang yang memiliki harta bersedia membantu yang tidak mampu, dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya melalui sedekah (zakat).

Dikatakan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah saw sangat selektif dan berhati-hati tat kala hendak membagikan harta zakat, karena harta zakat hanya boleh dinikmati oleh yang berhak (*al-ashnâf al-tsamâniyah*) yang ditentukan oleh Allah swt.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطَيْتَكَ حَقَّكَ⁸³

Artinya : “Dari Abdurrahman bin Ziyad bahwa ia mendengar Ziyad bin Nu’aim Al-Hadhrani bahwa ia telah mendengar Ziyad bin Harits Al-Shuda’i berkata; aku menemui Rasulullah saw lalu memba’iatnya. Kemudian ia menyebutkan hadits yang panjang. Ia berkata; kemudian terdapat seseorang yang datang kepada beliau dan berkata; berikanlah aku sebagian dari sedekah! Maka Rasulullah saw berkata kepadanya: “Sesungguhnya Allah tidak ridha kepada hukum seorang Nabi atau yang lainnya, Dialah yang telah menentukannya dan telah menetapkan bagi delapan bagian dalam perkara zakat, hingga Dia sendiri yang memutuskan. Maka Allah membaginya menjadi delapan bagian, seandainya engkau termasuk dari bagian itu maka aku akan memberikan hakmu kepadamu”.

Para ulama berbeda pendapat tentang cara pendistribusian zakat ini, apakah delapan golongan *ashnaf* ini secara keseluruhan harus diberi hak zakat atau tidak. Perbedaan pendapat tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Golongan Syafi’iyah menyatakan bahwa zakat wajib dibagikan kepada delapan kelompok yang tersebut dalam Al-Qur’an (QS. Al-Taubah ayat 60), baik zakat fitrah maupun zakat mal. Karena pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kepemilikan (hak) zakat pada ayat adalah dengan menggunakan *lam tamlik* berfungsi untuk ke delapan kelompok dengan hak yang sama.
2. Sedangkan menurut jumhur ulama (Hanafiyyah, Mâlikiyyah dan Hanâbilah), harta zakat itu dapat dibagikan kepada satu kelompok saja. Menurut golongan Hanafiyyah dan Mâlikiyyah membolehkan pembagian zakat itu kepada satu kelompok saja dari

⁸³ Sunan Abu Daud, Juz II, hlm. 192-193.

dari delapan kelompok *ashnâf*.⁸⁴ Bahkan, menurut golongan Mâlikiyyah sunnah hukumnya memberikan harta zakat kepada orang sangat membutuhkan (*asyad al-hâjah*) daripada kelompok yang lainnya.⁸⁵

Secara global, peruntukan pendistribusian zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu untuk keperluan pribadi (*asykhâsh*) dan untuk keperluan kemaslahatan (*mashâlih*) umum.⁸⁶

1. Untuk keperluan individu (*asykhâsh*); al-Qur'an menggunakan redaksi kalimat "*lam al-tamlik*" yaitu kelompok asnaf yang berhak memiliki secara utuh untuk dirinya, sehingga mereka dapat memanfaatkan sekehendak hatinya, karena mereka sama-sama pribadi yang mempunyai sifat tertentu (*li dafi' hâjatihi*). Mereka yang dimaksudkan dalam kategori *asykhash* ini ada enam kelompok, yaitu; fakir (الفقراء), miskin (المساكين), amil (العاملين عليها) dan muallaf (المؤلفة قلوبهم), dan ditambah orang berutang (الغارمين) dan ibnu sabil (ابن السبيل).
2. Untuk keperluan kemaslahatan (*mashalih*); al-Qur'an menggunakan redaksi kalimat "*fi al-zharfiyyah*", sasarannya adalah untuk kemaslahatan umum, sosial masyarakat dan negara. Kelompok ini mencakup dua sasaran selain yang telah disebutkan di

⁸⁴ Ini adalah pendapat Imam Malik, dan termasuk juga Umar, Huzaifah, Ibnu Abbas, Abu Al-'Aliyah, Sa'id Bin Jabir dan Maimun Bin Maharan. Lihat Muhammad Nasib Al-Rifa'i, *Taisir Al-'Aliy Al-Qadîr Li Ikhtishar Tafsir Ibn Kaisr*, (Riyadh : Maktabah Al-Ma'arif, 1410 H./1989 M), Juz II, hlm. 347.

⁸⁵ Lihat Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, Juz I, hlm. 867-869.

⁸⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim Al-Syahir Bi Tafsir Al-Manar*, (Mesir : Dar Al-Manar, 1368 H.), Cet. ke-2, Juz X, Hlm. 586.

atas, yaitu memerdekakan budak (في الرقاب) dan untuk keperluan kebaikan di jalan

Allah (في سبيل الله).⁸⁷

Adapun golongan *ashnaf* secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Orang fakir (الفقراء)

Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi, tidak ada usaha sama sekali karena ketidakmampuan fisiknya, dan tidak memiliki siapa-siapa (kerabat) yang mampu membantu meringankan serta mencukupi beban hidupnya.⁸⁸

2. Orang miskin (المساكين)

Yang dimaksud miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya. Seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan hariannya sepuluh, namun ia hanya mampu mendapatkan

⁸⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *op.cit.*, hlm. 587.

⁸⁸ Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam pengertian fakir ini. *Pertama*, menurut golongan Hanafiyah, pengertian fakir adalah bahwa orang yang memiliki kebutuhan hidup kurang dari *Nishâb*, atau memiliki harta seukuran nishab atau lebih namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya, sehingga ia tetap dalam status kefakirannya.

Kedua, menurut golongan Malikiyyah, pengertian fakir adalah orang yang memiliki harta tidak mencukupi kebutuhan untuk ukuran satu tahun. Karena apabila ia memiliki seukuran *Nishâb*, maka ia wajib memberikan zakatnya. Menurut Malikiyah juga, seseorang tidak tergolong fakir apabila ia masih mempunyai orang yang wajib lagi mampu menafkahnya.

Ketiga, menurut golongan Syafi'iyah dan senada juga dengan pendapat golongan Hanabilah, bahwa orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak punya pekerjaan yang menghasilkan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kendatipun ada tetapi kurang dari separoh kecukupan hariannya, sementara ia juga tidak mempunyai keluarga yang akan menafkahnya. Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzâhib Al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1424 H./2003 M), Cet. ke-2, Juz I, hlm. 562-566.

delapan sehingga belum dianggap berkecukupan yang layak pada kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁸⁹

Ada perbedaan antara orang fakir dan miskin, yaitu orang fakir lebih sengsara kehidupannya dibandingkan dengan orang miskin. Artinya orang miskin masih punya hal yang bisa dikerjakan, masih punya penghasilan dan pemasukan, meskipun tidak mencukupi hajat kebutuhan pokoknya.⁹⁰ Kondisi perbedaan ini dapat difahami berdasarkan firman Allah SWT berikut ini :

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (الكهف: 79\18)

Artinya : “Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakinya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.”

3. Amil Zakat (العاملين عليها)

Yaitu orang-orang yang mendapat tugas dari penguasa atau negara untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakkiy*, menjaganya dan membaginya kepada orang-orang yang berhak. Mereka ini berhak diberi zakat sepadan dengan pekerjaannya meskipun mereka kaya.

Amil zakat seringkali disebut dengan istilah *al-su'ât li jibayat al-shadaqah* yang artinya adalah orang yang aktif meluangkan waktunya berkeliling untuk mengumpulkan zakat (*shadaqah*).

⁸⁹ Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, Juz II, *op.cit.*, hlm. 869.

⁹⁰ Lihat Al-Syaukaniy, *Nail Al-Authar*, Juz VIII, hlm. 140-141.

Untuk menjadi amil diwajibkan bagi mereka orang-orang yang memenuhi syarat sebagai amil, yaitu :

- a. adil (*'âdil*)
- b. memiliki ilmu dan mengerti (*ma'rifah*) tentang hukum zakat
- c. orang yang luas pergaulannya (*al-'asyir*)
- d. ahli dalam pencatatan (*al-kâtib*)
- e. mengerti sistem pembagian zakat
- f. aman dan terjaga dalam menyimpan harta
- g. ahli dalam tugas mendata/mengumpulkan orang yang berharta (*al-hâsyir bi ma'na 'âmil jibayat al-mâl*) dan cara membagi zakat.
- h. Mereka itu bekerja dengan baik agar proses pengambilan harta zakat berjalan dengan benar, tepat sasaran, serta bekerja keras untuk bisa memastikan bahwa orang-orang yang berhak mendapat zakat itu benar-benar telah menerimanya (orang yang *'ârif* dalam bertindak).⁹¹

4. Muallaf (المؤلفة قلوبهم)

Mereka adalah orang yang masih lemah niatnya memasuki Islam. Muallaf ini dibedakan ke dalam dua golongan yaitu muallaf muslim dan muallaf kafir.

- a. Muallaf muslim ini perlu diberikan bagian zakat dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Orang yang masih lemah niat keislamannya maka mereka diberikan zakat bertujuan untuk memperkuat keislamannya.

⁹¹ Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, Juz II, *op.cit.*, hlm. 870.

- 2) Golongan yang terdiri dari para pemuka dan pemimpin muslim yang dihormati pengikutnya dan diharapkan ketetapan hati dan kekuatan iman mereka bertambah agar mereka rela berjihad.
- 3) Kelompok kaum muslim yang berada di benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka memperoleh bagian zakat dengan harapan agar mereka dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslim lain yang tinggal jauh dari benteng itu dari serbuan musuh.
- 4) Golongan kaum muslim yang diperlukan untuk memungut pajak serta zakat dan menariknya dari orang yang tidak mau menyerahkan zakat kecuali dengan pengaruh dan wibawa mereka.⁹²

b. Muallaf kafir, diklasifikasikan menjadi dua golongan :

- 1) Golongan yang diharapkan keislamannya. Mereka yang diharapkan kebajikannya sehingga mereka yang diharapkan masuk Islam. Mereka diberikan sebagian dari harta zakat, agar ada semacam dorongan bisa masuk Islam.
- 2) Golongan yang dikhawatirkan kejahatannya, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. Kepada mereka, dibolehkan pemberian sebagian harta zakat demi untuk melunakkan hati dan mengurangi atau menghentikan permusuhan kepada kaum muslimin.⁹³

⁹² Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz II, *op.cit.* hlm. 872.

⁹³ *Op.cit.*, hlm. 871. Lihat Ensiklopedi Islam, (Jakarta : Ikhtiar Baru van Hoeve, 2005), Jilid 7, hlm. 317-318.

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, bahwa Nabi saw telah memberikan sebagian harta zakat untuk Abu Sufyân bin Al-Harb, Sofwan bin Umayyah, 'Uyainah bin Hishan, Al-Aqra' bin Habis dan Abbas bin Mirdas, masing-masing 100 ekor unta. Bahkan kepada 'Alqamah bin Uatsah diberikan harta ghanimah perang Hunain.⁹⁴ Semua itu dalam rangka membujuk hati mereka agar minimal mengurangi permusuhan kepada Islam. Dan kalau bisa sampai masuk Islam, tentu akan lebih baik lagi.⁹⁵

5. Budak (في الرقاب)

Menurut jumhur ulama *al-riqâb* adalah para budak muslim yang tidak mampu membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras. Karena keadaan yang tidak memungkinkan dirinya menebus status perbudakannya melainkan dengan membuat perjanjian. Maka disyaratkan pemberian bagian zakat untuk membebaskan budak, bahwa budak itu seorang muslim dan sangat membutuhkan kebebasan.

⁹⁴ Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, Juz II, *op.cit.*, Lihat Al-Syaukaniy, *Nail Al-Authar*, Juz VIII, hlm. 162-163.

⁹⁵ Namun sebagian ulama kurang sependapat dengan hal ini. Golongan madzhab Hanabilah dan Malikiyyah berpendapat bahwa mereka diberi bagian harta zakat supaya mereka tertarik kepada Islam. Karena Nabi saw pernah memberi bagian harta zakat kepada muallaf muslim dan kaum musyrik. Sementara golongan madzhab Hanafiyah dan madzhab Syafi'iyah mengatakan bahwa apa yang diberikan oleh Rasulullah saw itu hanya terjadi di masa awal dakwah Islam. Ketika umat Islam masih sedikit dan mereka sangat tertekan. Sedangkan ketika posisi umat Islam sudah kuat, tidak pernah lagi ia memberikannya kepada mereka. Dan hal ini juga dilakukan di zaman khalifah Umar bin Al-Khattab ra, dimana ia tidak pernah memberikan harta zakat kepada orang kafir harta zakat. Bahkan Umar ra berkata, "*Kita tidak akan memberikan sesuatu pun untuk menjadi muslim. Siapa yang mau silahkan masuk Islam dan siapa yang tidak mau silahkan kafir saja*". Lihat Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, Juz II, *op.cit.*, hlm. 871.

6. Orang yang Berutang (الغارمون)

Dalam hal ini, golongan Syâfi'iyah dan Hanabilah mengatakan ada dua kemungkinan orang yang berutang. *Pertama*, seseorang berutang untuk keperluan dirinya sendiri. Dalam hal ini, bila pada dasarnya dia adalah orang kaya dan berkecukupan, tidaklah berhak atas dana zakat. *Kedua*, seseorang berutang untuk kepentingan pihak lain, seperti untuk mengishlah pihak-pihak yang bersengketa, maka dia berhak atas dana zakat untuk menutupi utangnya itu, tanpa melihat apakah dia miskin atau kaya. Meski dia kaya, tapi tetap berhak atas dana zakat.

Golongan Hanafiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *gharim* adalah orang yang berutang, namun ia tidak mempunyai harta untuk membayarnya. Sedangkan menurut golongan Malikiyyah, seseorang yang berutang bukan sebagai akibat dari perbuatan dosa.⁹⁷

7. Sabilillah (في سبيل الله)

Pada awalnya makna *sabilillah* adalah berperang di jalan Allah. Mereka adalah para peserta pertempuran fisik melawan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakkan agama Islam, meskipun mereka itu pada hakikatnya orang-orang yang cukup berada. Sebab dalam hal ini memang bukan sisi kemiskinannya yang

⁹⁷ Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, op.cit., Juz II, hlm. 873-874.

dijadikan objek zakat, melainkan apa yang dikerjakan oleh para mujahidin itu yaitu memperjuangkan kemaslahatan umat.

Menurut golongan Hanabilah, orang yang ingin melaksanakan ibadah haji adalah termasuk golongan *sabilillah*.⁹⁸ Dalam konteks saat sekarang, makna status *sabilillah* berkembang menjadi segala jenis upaya dalam memperjuangkan agama Allah, maka termasuk di antaranya adalah para da'i, guru agama, ustadz dan lain-lain.

8. Ibnu Sabil (ابن السبيل)

Ibnu Sabil ialah musafir yang berjalan di jalan ketaatan mencari ridha Allah, bukan perjalanan yang mengandung unsur maksiat atau dosa. Sementara ia membutuhkan kecukupan dalam menempuh perjalanannya, meskipun dia adalah seorang yang berkecukupan di negerinya.⁹⁹

G. Sistim Pengolahan Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam Negara, karena ia berfungsi sebagai alat untuk memindahkan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin dan menjadi sumber pendapatan Negara. Fungsi zakat sebagai sumber pendapatan sudah berjalan, namun fungsi pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin tampaknya belum. Akibatnya, jumlah orang miskin selalu meningkat. Padahal tujuan utama zakat adalah untuk mengatasi kemiskinan.

Dalam al-Qur'an dikatakan :

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 874.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 875.

...
 (سورة الحشر: 59\7)
 Artinya : “... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara
 kamu”. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang
 dilaranya bagimu maka tinggalkanlah.

Demikian juga dikatakan dalam hadits Nabi saw :

... فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ¹⁰⁰
 Artinya : “Beritahukan kepada mereka bahwa Allah swt mewajibkan mereka membayar
 zakat yang diambil dari harta orang yang tergolong kaya di antara mereka untuk
 diberikan kepada orang fakir (di antara) mereka”.

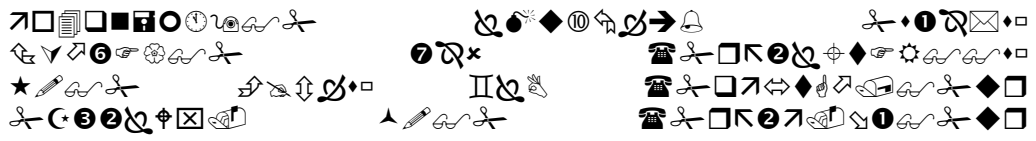
Hadits ini berkaitan dengan ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman oleh
 Rasulullah Saw untuk memungut Zakat, mengajarkan tentang cara pemindahan kekayaan
 dari orang kaya kepada orang miskin dalam Islam yaitu melalui ibadah zakat.

Berkaitan dengan fungsi zakat, dalam memberikan solusi atas masalah
 kemiskinan, Islam membagi fakir dan miskin atas tiga kelompok. Masing-masing kelompok
 dalam upaya menanganinya memiliki solusi yang berbeda.

1. Anjuran bekerja bagi yang fisiknya kuat bekerja

Muslim yang kuat dituntut bekerja, mengembara di muka bumi dan mencari
 rizki Allah (الإنّشار في الأرض). Bekerja bagi orang yang masih memiliki fisik yang kuat
 adalah wajib hukumnya dan merupakan senjata pertama dalam memerangi
 kemiskinan.


¹⁰⁰ Al-Bukhari, *Al-Jâmi' Al-Shahîh*, Juz I, *op.cit.*, hlm. 430.



 (سورة البقرة: 106)

Artinya : “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

Pada dasarnya, Allah swt telah menjamin rizki bagi setiap makhluknya, termasuk manusia. Namun, rizki yang sudah dijamin oleh Allah swt itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan mengerahkan segala upaya dan tenaga dengan melakukan usaha. Oleh karena itu Allah swt memerintahkan manusia agar senantiasa berusaha mencari rizki yang telah Allah swt sediakan di permukaan bumi ini. Firman Allah SWT:



 (سورة البقرة : 156)

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajilah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Dalam hadits Nabi saw, juga disebutkan, bahwa Rasulullah saw bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَأَانَا جُلْدَيْنِ فَقَالَ إِنَّ شَيْئًا أُعْطِيَتْكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسَبٍ¹⁰¹

Artinya : “Dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar berkata; telah mengabarkan kepadaku dua orang yang telah menemui Rasulullah saw pada waktu haji wada’ sementara beliau sedang membagikan zakat, mereka berdua meminta kepada beliau sebagian dari zakat tersebut, lalu beliau mengangkat pandangannya kepada kami, lalu menundukkannya dan beliau melihat kami adalah orang yang kuat, lalu beliau berkata: “Kalau kalian berdua

¹⁰¹ Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Juz II, hlm. 195.

menginginkannya maka kami akan memberikan kepada kalian berdua, dan tidak ada bagian dalam zakat tersebut bagi orang yang kaya dan orang yang mampu untuk bekerja”.

Bahkan dalam hadits lain dikatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ أَحْرَصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ¹⁰²

Artinya : “Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw bersabda: “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah swt daripada orang mukmin yang lemah”. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza Wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan; “Seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu”. Tetapi katakanlah; “Ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya. Karena sesungguhnya ungkapan kata “law” (seandainya) akan membukakan jalan bagi godaan syetani”.

2. Memberikan jaminan nafkah (*infâq*) kepada kerabat

Orang miskin yang lemah dan tidak mampu bekerja, seperti janda, anak-anak, atau orang jompo, tetapi masih mempunyai kerabat, mereka itu mendapat jaminan nafkah dari anggota keluarga. Jika ditemukan orang miskin dari kelompok kedua ini maka harus ditanya terlebih dahulu apakah ia masih memiliki kerabat atau tidak. Sebab, kerabatnyalah yang pertama sekali yang harus bertanggungjawab atas kekurangan saudaranya. Sebagai mana firman Allah swt :

¹⁰² *Shahîh Muslim Bi Syarh Al-Nawawiy, Juz XVI, hlm. 215.*



 (سورة : البقرة : 215\2)

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui”.

Dalam ayat lain dikatakan :



 (سورة النحل : 90\16)

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

3. Memberikan zakat untuk orang yang tidak kuat bekerja dan tidak punya kerabat

Tidak semua orang fakir miskin memiliki kerabat yang mampu menjamin kebutuhan hidupnya. Atau mereka mempunyai kerabat, tetapi mereka miskin. Oleh karena, itu Allah swt telah menetapkan hak yang pasti berupa zakat. Tujuan utama zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir miskin. Orang kaya mempunyai kewajiban untuk mendekatkan kesenjangan itu, yaitu dengan mengeluarkan zakat dari harta mereka. Karena memang ada hak fakir miskin dalam harta mereka itu.

Untuk menjembatani ketiga keadaan di atas, Syari’at Islam telah menetapkan suatu penghubung, solusi berupa jaminan bagi yang miskin dan lemah kepada yang

kaya, dengan cara mengelola harta zakat secara profesional dan proporsional, akuntabel dan bertanggungjawab, melalui :

a. Pengolahan Zakat Secara Konsumtif

Pada awalnya, harta zakat yang dikelola oleh amil diberikan kepada para *mustahiq* zakat adalah bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hanya sekedar pemenuhan jangka pendek, namun kurang membantu mereka untuk jangka panjang. Karena uang atau kebutuhan sehari-hari yang diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan membutuhkan harta zakat. Oleh karena itu untuk memberikan zakat yang bersifat konsumtif perlu peninjauan ulang dan melalui syarat serta kebijakan kemaslahatan yang mampu mewujudkan tujuan syari'at zakat (*maqâshid al-syari'ah fi zakâh*).

Zakat sebagai lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah peradaban yang mampu menjamin dan memproteksi kehidupan bermasyarakat terutama terhadap orang-orang yang lemah, tidak memiliki penghasilan dan kehidupan yang teratur.

Islam menjadikan zakat sebagai pondasi pertama dalam membangun jaminan kemasyarakatan (*al-tâkaful al-ijtimâ'iy*) dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu strategi pendistribusian zakat berkaitan erat dengan upaya merealisasikan fungsi zakat sebagai jaminan kemasyarakatan yang terorganisir dan sampai ke tangan yang berhak menerimanya, sehingga zakat itu dapat berdaya guna bagi kemaslahatan *mustahiq* zakat.

Langkah ini dapat diupayakan melalui langkah pengelolaan dan manajemen yang konstruktif dan inovatif, yaitu :

1) Pengolahan zakat konsumtif tradisional.

Cara ini sifatnya adalah bahwa zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti zakat (zakat mal/harta atau fitrah) yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

Perlu diketahui, terutama oleh amil bahwa para *mustahiq* zakat itu ada mampu berusaha (produktif) dan ada yang tidak lagi mampu berusaha (pasif). Maka dalam pendistribusian zakat dapat diklasifikasikan pengolahannya sesuai dengan kebutuhan para *mustahiq* zakat. Pada prinsipnya, pengolahan zakat harus mengarah kepada bagaimana tujuan syari'ah (*maqâshid al-syarî'ah*) zakat itu ditetapkan. Dalam mengelola zakat untuk *mustahiq* zakat ada dua prinsip dasar yang harus dicapai dan dirasakan manfaatnya :

a) Memberi kecukupan (*had al-kifâyah*)

Pemberian kecukupan di sini adalah terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu asupan (makanan dan minuman), pakaian dan tempat tinggal sehingga ia mampu memperahankan lima prinsip pokok dalam Islam (*al-dharuriyyat al-khamsah; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*).

b) Membangun jaminan kemasyarakatan (*al-takâful al-ijtimâ'iy*)

Upaya membangun solidaritas atau jaminan sosial ini merupakan wujud nilai persaudaraan dalam Islam. Oleh karena itu Islam tidak membenarkan seseorang hidup tanpa memperdulikan orang lain.¹⁰³

¹⁰³ Baca Ni'mat Abdul Latif Masyhur, *Al-Zakah Al-Asas Al-Syar'iyyah Wa Al-Daur Al-Inma'iyy Wa Al-Tauzi'iy*, hlm. 343-385.

2) Pengolahan zakat konsumtif kreatif.

Maksudnya adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari pemberian langsung. Kepada mereka yang mampu berusaha atau memiliki keterampilan tertentu agar diberikan modal untuk menjalankan pekerjaannya. Akan tetapi apabila mereka bukan orang yang memiliki keahlian dan usaha, misalnya karena lemah secara fisik maka mereka diberikan kecukupan untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Keperluan jangka pendek misalnya secara langsung (karitatif) dan untuk keperluan jangka panjang dengan cara misalnya memberikan padanya rumah untuk disewakan dan hasilnya dapat mencukupi keperluan hidupnya. Atau misalnya diwujudkan dalam bentuk alat sekolah, biaya pengobatan, beasiswa dan lain-lain. Sehingga berwujud menjadi manfaat yang bersumber dari produktifitas aset untuk dikonsumsi oleh para mustahiknya.

b. Pengolahan Zakat Secara Produktif

Untuk mewujudkan sistem pengelolaan harta zakat secara produktif, dengan syarat bahwa telah dipastikan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah* para mustahik zakat. Memproduktifitaskan harta zakat ini dapat ditempuh melalui dua cara produktif tradisional dan produktif kreatif.

1) Pengolahan zakat produktif tradisional.

Sejatinya, tanggungjawab besar pengolahan zakat yang mesti dilaksanakan oleh amil zakat adalah mentransformasikan seorang *mustahiq* (orang yang berhak mendapatkan zakat) menjadi seorang *muzakkiy* (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat). Oleh karena itu, dana zakat harus dikelola

menjadi zakat produktif. Untuk mencapai tingkatan *muzakkiy*, seorang *mustahiq* ditransformasikan secara bertahap. Pada awalnya seorang *mustahiq* zakat ditransformasikan menjadi seorang *muktafi* (orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri). Pada level ini, seorang *muktafiy* memang belum bisa berbagi dengan yang lain tapi sudah bisa mandiri.

Transformasi dari status *mustahiq* menjadi *muzakkiy* memang membutuhkan proses dan konsistensi dalam berusaha. Sebelum dana zakat diberikan, lembaga pengelola zakat harus melakukan *visibility study* atau *assessment* terlebih dahulu. Calon penerima zakat diajarkan tentang manajemen keuangan yang baik. Sehingga mereka bisa menghitung berapa persentase modal yang akan dikelola, berapa labanya, dan berapa persen yang akan mereka konsumsi. Jika semua proses itu tidak terpenuhi, maka dana zakat tidak akan produktif melainkan menjadi konsumtif. Maka nasibnya akan sama seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai). Dengan demikian zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* mendatangkan tantangan tersendiri bagi lembaga zakat sebagai pengelola (amil zakat).

Dana zakat diupayakan agar bisa memberikan nilai tambah atau manfaat berlimpah, serta mampu membangkitkan sektor ekonomi riil. Sehingga *muzakkiy* merasa tentram, diuntungkan dan tepat sasaran. Terutama untuk zakat mal, lebih mengarahkan pada bagaimana menyalurkannya secara produktif. Bagaimana zakat bisa membangkitkan sektor ekonomi riil. Karena itu, zakat

didistribusikan dan didayagunakan terutama untuk golongan fakir dan miskin yang dibina sebelumnya.

Orang miskin, harus dibebaskan terlebih dahulu dari kemiskinan jiwanya sehingga tidak mudah untuk meminta-minta. Sebelum melangkah pada persoalan teknis, sasaran pertama adalah membuat jiwa (mental) si miskin menjadi kaya dan siap untuk berusaha. Mereka diyakinkan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan.

Setelah itu, baru digulirkan dana zakat tersebut untuk mereka kelola menjadi usaha mikro, seperti berdagang bakso atau gorengan dan lainnya. Sambil mereka berusaha dengan gigih, harus juga diajarkan untuk berinfaq dan bersedekah. Karena untuk bersedekah tidak mesti menunggu *Nishâbnya*, berapa saja, dan kapan saja seseorang dapat mengeluarkan infak dan sedekah. Namun, mereka tidak berjalan sendiri melainkan dikelompokkan sehingga bisa membantu antar anggota kelompoknya dan bahkan membantu kelompok yang lain.

Bagi lembaga pengelola zakat (amil), zakat dapat diberikan kepada *mustahiq* yang memiliki fisik yang kuat untuk bekerja dalam bentuk barang-barang produktif. Sebagaimana sumber atau jenis harta tertentu yang wajib dizakatkan, maka amil zakat dapat memberikan zakat kepada *mustahiq* berupa jenis harta zakat tertentu. Misalnya unta, kerbau/sapi, sehingga mustahik suatu saat nanti dapat menjadi peternak yang produktif dan menjadi *muzakkiy*.

Umar bin Khattab ra telah melakukan upaya memberikan kecukupan kepada orang fakir dengan harta zakat. Tidak sekedar menutupi kelaparan

mereka dengan memberi beberapa suap makanan saja, atau sekedar melepaskan kesusuhan mereka dengan memberi beberapa dirham saja, tetapi hal itu tidak mampu merubah kondisi ekonominya.

Umar bin Khattab dalam melaksanakan prinsip kebijakannya (*al-siyâsah*) berkaitan dengan zakat mengemukakan : *“Apabila kalian membagikan harta zakat, kayakan mereka”*. Bahkan ia berkata kepada para amil zakat : *“Berikanlah kepada mereka zakat, sekalipun salah seorang dari mereka baru dapat tercukupi jika mendapat seratus ekor unta”*. Bahkan, salah seorang ulama fiqh kenamaan dari kalangan *tâbi’in* yakni ‘Athâ’ bin Abi Rabah pernah berkata : *“Apabila seseorang memberikan harta zakat kepada keluarga kaum muslimin, sehingga sampai mereka menjadi berkecukupan, maka hal itu lebih saya sukai”*.¹⁰⁴

Atau dengan pengembangan usaha seperti misalnya dengan memberikan modal usaha konfeksi, dengan membelikan perlengkapan mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

2) Pengolahan zakat produktif kreatif.

Mustahiq zakat, karena status kefakiran dan kemiskianya diberikan harta zakat adalah bertujuan untuk menghilangkan sebab kefakiran dan kemiskinannya sehingga ia tidak lagi memerlukan zakat di masa yang akan datang. Guna melepaskan mereka dari kefakiran dan kemiskinan itu maka amil zakat mesti merancang formulasi manajemen zakat secara produktif kreatif.

¹⁰⁴ Jaribah Bin Ahmad Bin Sanyan Al-Haritsiy, *Al-Fiqh Al-Iqtishady Li Amir Al-Mukminin Umar Bin Khattab*, hlm. 257. Lihat Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakâh*, Juz I, hlm. 566-567.

Pengolahan zakat secara produktif kreatif adalah bertujuan supaya *mustahiq* zakat mencapai taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya dan kesinambungan hidupnya, yaitu dengan cara menginvestasikan harta zakat yang telah dihimpun, kemudian hasil investasi/asset produktif tersebut dipergunakan untuk kepentingan kemaslahatan *mustahiq* zakat.

Imam Al-Khaththabiy menyatakan dalam menjelaskan hadits *Qabishah bin Mukhariq Al-Hilâli* di atas bahwa batas pemberian zakat adalah mencapai kecukupan yang mana dengan pemberian itu diharapkan kehidupan seseorang menjadi baik, dan batasan kecukupan itu disesuaikan dengan keadaan dan tingkat kehidupan masing-masing penerimanya. Tidak ada suatu ketentuan yang pasti dalam hal kecukupan seseorang, dan setiap orang berbeda sesuai dengan keadaan mereka.¹⁰⁵

Yusuf Al-Qardhawi bahkan berpendapat bahwa Negara Islam (Pemerintah) dapat membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga ekonomi dan sebagainya dari harta zakat. Kemudian kepemilikannya dijadikan untuk orang fakir, seluruhnya atau sebagiannya. Sehingga usaha yang dimiliki itu dapat mendatangkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tetapi jangan jadikan bagi mereka hak menjual atau pemindahan hak kepemilikan agar senantiasa mendatangkan manfaat bagi mereka.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Abu Sulaiman Hammad Bin Muhammad Al-Khaththabiy Al-Bustiy, *Ma'alim Al-Sunan ; Sarh Sunan Al-Imâm Abu Daud*, (tt. : Mathba'ah Al-'Ilmiyah, 1352 H/1933 M.), Cet. ke-1, Juz II, hlm. 68.

¹⁰⁶ Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakâh*, Juz I, *ibid.* 566-567.

Berkaitan dengan pengolahan harta zakat secara produktif, Abdullah bin Manshur Al-Ghâfiliy dalam kitabnya *Nawâzil Al-Zakâh*, menyebutkan ada enam prinsip aturan (*dhawâbith*)¹⁰⁷ yang harus dipenuhi, yaitu :

- a) Tidak ada unsur mendesak untuk segera mendistribusikan harta zakat tersebut

Yang dimaksud dengan kebutuhan mendesak di sini adalah seperti menutupi kebutuhan pokok (*al-hâjat al-dharuriyah*) bagi mustahik zakat, seperti keharusan memenuhi kebutuhan pangan (makan dan minum), sandang (pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi auratnya) atau papan (tempat tinggal agar mereka dapat berlindung dari panas, hujan dan).

Adapun apabila masih ada kebutuhan mendesak yang pokok ini yang harus ditunaikan, maka tidak boleh menunda pembagian harta zakat kepada mustahiknya, sekalipun dengan alasan ingin memproduktifitaskannya. Sehingga, apabila harta zakat tersebut telah menjadi aset tetap seperti pabrik atau harta tidak bergerak (seperti perabotan rumah, lahan, rumah dan lain-lain) maka aset itu harus segera dijual dan hasil penjualannya diserahkan untuk menutupi kebutuhan yang dimaksud.

- b) Memproduktifitaskan harta zakat itu harus kepada usaha yang baik (*masyru'iyah*)

Cara *masyru'iyah* di sini adalah segala nilai kemaslahatan usaha yang layak untuk keperluan mustahik zakat. Artinya harus dapat memberikan jaminan

¹⁰⁷ Abdullah bin Manshur Al-Ghâfiliy, *Nawâzil Al-Zakâh*, *op.cit.*, hlm. 495-496.

bahwa yang menerimanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk jangka panjang. Dalam satu riwayat disebutkan :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ عَرِينَةِ الْمَدِينَةِ فَرَّخَصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَأْقُوا الدَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِحِمَمٍ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعْضُونَ الْحِجَارَةَ تَابِعَهُ أَبُو قَلَابَةَ وَحَمِيدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ¹⁰⁸

Artinya : “Dari Anas ra, bahwa ada sekelompok orang dari ‘Urainah yang sakit terkena udara dingin kota Madinah. Maka Rasulullah saw membantu meringankan beban mereka dengan memberi bagian dari zakat unta, dengannya mereka dapat meminum susu-susunya dan air kencingnya. Namun kemudian orang-orang itu membunuh pengembala unta tersebut dan mencuri unta-untanya sejumlah antara tiga hingga sepuluh. Maka Rasulullah saw mengutus seseorang. Akhirnya mereka dibawa ke hadapan Beliau, lalu kemudian Beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas lalu menjemur mereka dibawah panas dan ditindih dengan bebatuan. Hadits ini dikuatkan juga oleh Abu Qalabah dan Humaid dari Tsabit dari Anas”.

Dari hadits di atas, dapat difahami bahwa Rasulullah saw memberikan harta zakat kepada seseorang dari kelompok ‘Urainah yang ketika itu sakit terkena udara dingin kota Madinah. Pemberian yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah berupa aset produktif yang manfaatnya di samping untuk kebutuhan hidupnya dapat dimanfaatkan juga sekaligus untuk keperluan pengobatannya.

Maka para amil zakat dalam konteks saat ini dapat melakukan pengolahan zakat dengan cara memfasilitasi mustahik zakat yang tidak lagi produktif bekerja karena kelemahan yang mereka alami. Bagi mereka disediakan misalnya rumah kontrakan, yang hasil kontrakannya dapat memenuhi kebutuhan pokok (*dharuriyah*) mereka untuk jangka panjang.

¹⁰⁸ Al-Jami' Al-Shahih, Juz I, hlm. 465-466.

Adapaun kepada mereka yang masih punya daya usaha namun lemah secara financial, maka mereka dapat diberikan modal usaha peternakan tertentu yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan pokok hidupnya.

Usaha produktif yang *syari'y*, artinya adalah bahwa dari hasil zakat tersebut dipergunakan untuk mengelola usaha yang terbebas dari unsur riba, gharar dan perkara yang dilarang lainnya. Seperti membuat usaha perdagangan, perindustrian, peternakan atau perkebunan yang halal, dengan harapan hasil dari usaha tersebut menjadi aset protektif bagi kebutuhan mustahik untuk jangka panjang.

Rasulullah saw, dalam satu riwayat tidak langsung segera membagikan harta zakat kepada mustahiknya, akan tetapi dikumpulkan terlebih dahulu dan diberi tanda pada masing-masing hewan ternak dari hasil zakat, sebagai mana disebutkan dalam riwayat hadits sebagai berikut :

حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسْمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ¹⁰⁹

Artinya : “Telah menceritakan kepada saya Anas bin Malik ra, ia berkata: “Aku berangkat di pagi hari bersama ‘Abdullah bin Abu Thalhah menemui Rasulullah saw untuk mentahniknya dan aku dapati di tangan Beliau ada stempel besi yang biasanya untuk memberikan tanda pada unta (dari hasil zakat)”.

c) Mengupayakan langkah yang dapat menjamin bahwa aset harta (yang diproduktifitaskan itu) tetap utuh sebagai harta zakat

Artinya, menjadikan semua hasil yang terkandung dalam usaha tersebut sebagai aset harta zakat, yang semuanya itu dijadikan untuk keperluan mustahik zakat. Dan apabila ada kebutuhan mendesak untuk menjual aset usaha dari

¹⁰⁹ Al-Bukhariy, *Al-Jâmi’ Al-Shahîh*, Juz I, hlm. 466.

harta zakat tersebut, maka hasil penjualannya juga harus dikembalikan untuk keperluan mustahik.

- d) Harus ada inisiatif untuk mengalirkan aset produktif itu apabila ada kebutuhan yang wajib ditunaikan kepada mustahik zakat

Artinya, apabila ada kebutuhan mendesak untuk menjual aset usaha dari harta zakat tersebut, karena ada kebutuhan yang mendesak pada mustahiknya, maka hasil penjualannya juga harus dikembalikan untuk keperluan mustahik. Tujuannya adalah agar ada upaya secara serius dan amanah dalam merealisasikan usaha yang sudah dianalisa secara cermat oleh tim ahli, sehingga dapat menjaga serta menghasilkan stabilitas produksi pada aset yang ekonomis secara *syar'iy*.

- e) Ada usaha maksimal untuk memastikan bahwa bentuk usaha produktif yang akan dijalankan dari aset harta zakat itu dapat menghasilkan keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan mustahik zakat

Upaya ini hanya bisa terealisasi apabila pelaksanaannya telah ditopang oleh penataan usaha, pilihan usaha yang bernilai ekonomis, pengawasan dan bimbingan tenaga ahli yang berpengalaman (profesional) dan amanah.

- f) Harus ada jaminan stabilitas produksi harta zakat, maka harus dilaksanakan orang-orang yang berwenang, terpercaya, berpengetahuan yang luas, berpengalaman, amanah, *istiqamah*, bertakwa, adil, bijaksana serta memiliki semangat untuk bekerja demi kepentingan umum.

Berkaitan dengan peraturan di atas, tugas amil zakat adalah menjalankan segala ketentuan syari'ah yang berkaitan dengan kewajiban zakat,

dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak. Seharusnya zakat yang dihimpun melalui organisasi pengelola zakat (amil zakat), dapat membantu dan memproteksi permasalahan yang dihadapi oleh mustahik zakat.

Dalam satu riwayat disebutkan :

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهَلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمِ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَتَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلَّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمِلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَصِيبَهَا ثُمَّ يَمْسُكَ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاَحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سَحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحْتًا¹¹⁰

Artinya : *"Dari Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali ia berkata; Aku pernah menanggung hutang (untuk mendamaikan dua kabilah yang saling sengketa). Lalu aku datang kepada Rasulullah saw, meminta bantuan beliau untuk membayarnya. Beliau menjawab: "Tunggulah sampai orang datang mengantarkan zakat, nanti kusuruh menyerahkannya kepadamu". Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Hai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh (tidak halal) kecuali untuk tiga golongan, yaitu, pertama, orang yang menanggung beban berat (seperti gharim, berutang untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau seumpamanya). Maka orang itu boleh meminta-minta, sehingga beban beratnya lepas. Bila hutangnya telah lunas,*

¹¹⁰ Shahih Muslim bi Syarh Al-Nawawi, Juz VII, hlm. 133.

maka tidak boleh lagi ia meminta-meminta. Kedua, orang yang terkena bencana, sehingga harta bendanya musnah. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. Ketiga, orang yang ditimpa kemiskinan, disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercayai bahwa dia memang miskin. Orang itu boleh meminta-minta, sampai dia memperoleh sumber penghidupan yang layak. Selain tiga golongan itu, haram baginya untuk meminta-minta, dan haram pula baginya memakan hasil meminta-minta itu”.

Dari hadits di atas dapat difahami bahwa Rasulullah memperkenankan meminta agar terpenuhi kebutuhan si peminta dalam konteks ini bisa jadi si peminta berstatus orang kaya atau orang fakir. Maka ada dua faedah yang dapat dipetik dari hadits di atas :

- (1) yang meminta itu termasuk orang kaya namun ia boleh meminta disebabkan karena terdesak oleh suatu kebutuhan yang memberatkan baginya, seperti kelompok pertama yang disebutkan dalam hadits yang disebabkan karena menanggung beban berat seperti orang berutang (*gharim*) untuk kepentingan mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau seumpamanya.
- (2) dua kelompok yang terakhir, yang mana mereka meminta itu karena kefakirannya (secara *zhahir* atau *bathin*). Kemiskinan mereka disebabkan oleh faktor *dharuriyyah* seperti korban bencana, atau jatuh bangkrut.

BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH*

A. Pengertian *Maqâshid al-syarî'ah*

1. Pengertian *Maqâshid*

Kalimat *Maqâshid al-syarî'ah* (مقاصد الشريعة) merupakan susunan jumlah *idhâfiyah* yang terdiri dari dua kata yaitu kata *maqâshid* dan *syarî'ah*. Secara etimologi, kata *maqâshid* adalah bentuk plural (*jama'*) dari kata *maqshad*,¹ *shighah mashdar mîmiy* yang diambil dari kata *al-qashd* (قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْدًا وَمَقْصِدًا), di antaranya dapat bermakna *berniat* (نَوَى), *bermaksud* atau *berkeinginan* (تَعَمَّدَ أَوْ غَرَضَ), *menghendaki* (أَرَادَ), *sasaran* atau *tujuan* (هَدَفَ أَوْ غَايَةً), dan dapat juga bermakna *seimbang* atau *pertengahan* dan *tidak melampaui batas* (اعْتَدَلَ وَ تَوَسَّطَ وَ عَدِمَ الْإِفْرَاطَ), atau dapat juga bermakna *konsisten* (إِسْتِقَامَةً).²

¹ Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Washith*, (Mesir : Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 1425 H./2004 M), cet. ke-4, hlm. 738. Lihat Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fii Al-Lughah Wa Al-A'lam*, (Beirut : Dar Al-Masyriq, tt), hlm. 632.

² Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Washith*, *op.cit.*. Lihat Al-Yubiy, *Maqâshid al-syarî'ah Al-Islamiyah Wa 'Alaqaatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'iyyah*, (Riyad : Dar Al-Hijrah, 1418 H./1998 M), Cet. ke-1, hlm. 25-27.

2. Istilah Lain dari *Maqâshid*

Para ulama mengistilahkan *maqâshid* dengan berbagai istilah namun makna dan maksudnya adalah sama yakni membicarakan tentang maksud dan tujuan *syari'* (Allah swt) menurunkan *syari'ah* kepada hambaNya. Muhammad Al-Badawiy menguraikan ada beberapa ungkapan yang digunakan oleh para ulama yang berhubungan dengan *maqâshid*, yakni dengan sebutan *hikmah* (الحكمة), arti atau makna (المعنى), 'illat atau alasan (العلة), hubungan atau kesesuaian (المناسبة) dan maslahat atau kepentingan (المصلحة).³

3. Pengertian *Syari'ah*

Dalam al-Qur'an kata *syari'ah* dengan berbagai macam perubahan katanya (*tashrif*) terdapat sebanyak 5 kata.⁴ Kata *syari'ah* secara etimologi mempunyai banyak arti, di antaranya dapat berarti agama (الدين), sunnah (السنة), perintah (الأمر), madzhab (المذهب), ajaran (الملة), metode (المنهاج), atau jalan (الطريقة).⁵

³ Al-Badawiy, *Maqâshid al-syari'ah 'Inda Ibn Taimiyah*, (Yordan : Dar Al-Nafais, t.th.), hlm. 55-61.

⁴ QS. Al-Maidah (5) : 48 menggunakan kata شَرَعَ , QS. Al-A'raf (7) : 163 menggunakan kata شَرَعًا , QS. Al-Syura (42) : 13 dan 21 menggunakan kata شَرَعُوا dan شَرَعَ , dan QS. Al-Jatsiyah (45) : 18 menggunakan kata شَرِيعَةً. Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqiy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Quran Al-Karim*, (Kairo : Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1324), hlm. 378.

⁵ Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Washith*, hlm. 479. Lihat Al-Yubiy, *op.cit.*, hlm. 29. Lihat Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1427 H./2006 M.), juz XIX, cet. ke-1, hlm. 23.

Kata *syari'ah* bermakna sesuatu yang berasal dari Allah swt, yang harus diikuti dan tidak ada unsur memperturutkan hawa nafsu.

Secara bahasa, kata *syari'ah* bermakna “jalan yang lurus” (*al-tharîqah al-mustaqîmah*)⁶, makna ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah swt sebagai berikut :

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِ ۖ فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ يُخَافُ رَبَّهُ عَصَى﴾ (سورة)

(الجاثية: 45 \ 18)

Artinya : “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.

Demikian juga pada ayat lain, Allah swt berfirman :

﴿وَلَقَدْ جَاءَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولٍ مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو آيَاتِنَا ۚ وَلَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ﴾ (سورة المائدة: 5 \ 48)

Artinya : “Untuk setiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang”.

Sedangkan secara terminologi ulama fiqh mendefinisikan *syari'ah* adalah :

الشَّرِيعَةُ هِيَ مَجْمُوعُ الْأَحْكَامِ الَّتِي سَنَّهَا اللَّهُ لِلنَّاسِ جَمِيعًا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ⁷

Artinya : “Seluruh ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah swt untuk dilaksanakan oleh sekalian manusia (hambaNya), melalui bimbingan RasulNya Muhammad saw berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah”.

⁶ Mushthafa Syalaby, *Al-Madkhal Fi Al-Fiqh Al-Islamiy ; Ta'rifuhu Wa Tarikhuhi Wa Madzahibuhu Nazhriyah Al-Milkiyyah Wa Al-'Aqd*, (Beirut : Al-Dar Al-Jami'iyah, 1405 H/1985 M), Cet ke-10, Hlm. 27.

⁷ Muhammad Washil, *Al-Madkhal Al-Wasith Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Al-Fiqh Wa Al-Tasyri'*, (Mesir : Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, t.th.), hlm. 15.

4. Pengertian *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Secara substansial, ulama *ushuliyyun* memahami bahwa *maqâshid al-syarî'ah* itu adalah berkaitan pada semua pemanfaatan nilai kemaslahatan dan antisipasi nilai kemafsadatan yang meliputi pada segala sesuatu :

المقاصد هي الأمور المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها⁸

Artinya : “*Al-maqâshid (maqâshid al-syarî'ah) adalah segala sesuatu yang meliputi nilai-nilai kemaslahatan (kebaikan) dan kemafsadatan (kerusakan)*”.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai kemaslahatan itu dapat dijadikan tolak ukur dari tujuan suatu perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Karena segala nilai kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah swt, disediakan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.

Kebanyakan dari kitab-kitab yang membahas tentang *maqâshid al-syarî'ah* mengisyaratkan bahwa para ulama (*ushûliyyun dan fuqahâ'*) terdahulu tidak mendefinisikannya secara eksplisit. Pada berbagai tempat dalam kitab tersebut istilah *maqâshid al-syarî'ah* bagi mereka cukup difahami dengan mengacu kepada makna etimologisnya saja, yakni maksud/tujuan dan sasaran suatu syari'at. Di sisi lain, sebenarnya teori *maqâshid al-syarî'ah* terlihat merupakan pengembangan konsep *mashlahah* yang telah ada sebelumnya.

Para ahli ushul (*ushûliyyûn*) dan ahli fiqh (*fuqahâ'*) masing-masing mengemukakan pendapatnya dalam memahami *maqâshid al-syarî'ah* bahkan ada

⁸ Mahmud Hamid Utsman, *Al-Qamus Al-Mubin Fi Ishtilhat Al-Ushuliyyin*, (Riyad : Dar Al-Zahim, 1423 H./2002 M.), Cet. ke-1, hlm. 272.

kecenderungan mereka menggunakan istilah *mashlahah* yang secara substansial pemahaman satu dan lain hal adalah bertujuan untuk merealisasikan nilai kemaslahatan manusia dan menghindarkan diri dari segala kemafsadatan. Berikut ini penulis paparkan sebagian pemaknaan dalam upaya memahami *maqâshid al-syarî'ah* yang dikemukakan oleh masing-masing ulama :

- a. Imam Al-Ghazaliy (450-505 H.) menempatkan nilai kemaslahatan (*al-mashlahah*) sebagai *maqâshid al-syarî'ah* , sehingga ia mengatakan :

المَصْلَحَةُ هِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ وَهُوَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَنَفْسُهُمْ وَعَقْلُهُمْ وَنَسْلُهُمْ وَمَالُهُمْ⁹

Artinya : “*Al-Mashlahah* adalah suatu penjelasan yang mendasar tentang sesuatu yang mendatangkan nilai manfaat atau menghilangkan kemudharatan, yakni dengan cara memelihara lima tujuan pokok syara’ ; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka”.

- b. Menurut Al-Amidiy (w. 631 H.) *maqâshid al-syarî'ah* adalah :

الْمَقْصُودُ مِنَ الشَّرْعِ الْحَكْمُ إِمَّا جَلْبُ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعُ مَضَرَّةٍ أَوْ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْعَبْدِ لِتَعَالَى الرَّبِّ تَعَالَى عَنِ الضَّرَرِ وَالْإِنْتِفَاعِ وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ مَقْصُودًا لِلْعَبْدِ لِأَنَّهُ مُلَائِمٌ لَهُ وَمُوَافِقٌ لِنَفْسِهِ¹⁰

Artinya : “Maksud dari suatu syari’at adalah mengandung hikmah-hikmah, adakalanya bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau menghilangkan kemudharatan atau menyimpulkan keduanya (mengkompromikannya), bagi seorang hamba dituntut agar memuliakan Tuhannya dengan senantiasa mempertimbangkan antara yang dapat mendatangkan kemudharatan dengan yang bernilai

⁹ Al-Ghazaliy, *Al-Mustashfa Min ‘Ulum Al-Ushul*, (Riyadh : Dar Al-Hijrah, 1418 H./1998 M.), Juz II, Cet. ke-1, hlm. 481-482. Lihat Al-Yubiy, *Maqâshid op.cit.*, hlm. 33.

¹⁰ Al-Amidiy, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, (Riyad : Dar Al-Shami’iy, 1424 H./2003 M.), Cet. ke-1, Juz III, hlm. 339. Lihat Al-Badawiy, *p.cit.*, hlm. 46.

manfaat dan yang demikian itu dimaksudkan bagi hamba karena sesuai bagi kebutuhan dirinya.

c. Menurut Al-'Izz Bin 'Abd Al-Salam (577-660 H.) *maqâshid al-syarî'ah* itu adalah :

الشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ كُلِّهَا وَدَفْعِهَا وَجَلِّهَا وَعَلَى دَرْءِ الْمَفَاسِدِ بِأَسْرَها
دَفْعِهَا وَجَلِّهَا فَلَا تَجِدُ حُكْمًا لِلَّهِ إِلَّا وَهُوَ جَالِبٌ لِمَصْلَحَةٍ عَاجِلَةٍ أَوْ آجِلَةٍ أَوْ عَاجِلَةٍ وَ
آجِلَةٍ أَوْ دَرْءِ مَفْسَدَةٍ عَاجِلَةٍ أَوْ آجِلَةٍ أَوْ عَاجِلَةٍ وَ آجِلَةٍ¹¹

Artinya : “Syari’at itu semuanya mengandung unsur penegakan kemaslahatan lahir dan batin, juga mengandung unsur pencegahan dengan cara membatasi kemafsadatan lahir dan batin, maka, cepat atau lambat namun secara pasti hukum Allah akan senantiasa menjadi pendorong nilai kemaslahatan atau pencegah kemafsadatan di dunia dan akhirat”.

d. Menurut Imam Al-Syâthibiy (720-790 H.), meskipun ia membahas konsep *maqasid al-syarî'ah* secara sistematis dan mendetil, namun tidak menegaskan secara konkrit definisi *maqâshid al-syarî'ah* . Ia justru melihat bahwa *syarî'ah* diturunkan kepada manusia semata-mata untuk kesejahteraan mereka, yang mana berisi kaidah-kaidah umum tentang kehidupan manusia, peraturan dan batas-batas yang semua manusia wajib mentaatinya dan melaksanakannya agar kehidupan mereka teratur, tertib dan aman.

Menurut Al-Syathibiy, tujuan pokok disyari’atkannya suatu hukum adalah :

أَنَّ وَضَعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا¹²

Artinya : “Yakni untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat”.

Sehingga dalam memahami *maqâshid al-syarî'ah* ini ia mengatakan :

¹¹ 'Izz Al-Din, *Al-Qawa'id Al-Kubra Al-Mausum Bi Qawa'id Al-Ahkam Fi Ishlah Al-Anam*, (Damaskus : Dar Al-Qalam, t.th.), Juz I, hlm. 39.

¹² Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syarî'ah*, (t.t. : 1395 H./1975 M.), Juz II, hlm. 6.

تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجَعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةً أَقْسَامَ أَحَدَهَا أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً وَالثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً .
وَالشَّارِعُ قَدْ قَصَدَ بِالتَّشْرِيعِ إِقَامَةَ الْمَصَالِحِ الْأُخْرَوِيَّةِ وَالْدُّنْيَوِيَّةِ¹³

Artinya : “Pembebanan syari’ah bertujuan untuk memelihara tujuan syari’ah itu diturunkan kepada sekalian makhluk, yang mana maksud syari’ah tersebut tidak bergeser dari tiga kepentingan dasar, yaitu dhariyyah, hâjiyyah dan tahsîniyyah. Dan Allah swt bermaksud mensyari’atkan sesuatu bertujuan untuk menegakkan nilai kemashlahatan yang bersifat ukhrawi dan duniawi.

e. Al-Thahir bin ‘Asyur (w. 1393 H.) mengklasifikasikan *maqâshid al-syarî’ah* menjadi dua yakni *maqâshid al-tasyri’ al-‘ammah* (مقاصد التشريع العامة) dan *maqâshid al-tasyri’ al-khashshah* (مقاصد التشريع الخاصة). Adapun yang dimaksud

dengan *maqâshid al-tasyri’ al-‘ammah* (مقاصد التشريع العامة) adalah :¹⁴

مَقَاصِدُ التَّشْرِيعِ الْعَامَّةُ هِيَ الْمَعَانِي وَالْحِكَمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مَعْظَمِهَا بَحِثٌ لَا يَخْتَصُّ مِلَاحَظَتَهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

Artinya : “Segala makna dan hikmah yang diawasi karena Allah demi kepentingan semua syari’ah dan kemuliaannya, sehingga tidaklah cukup sekedar pada masalah khusus saja di antara hukum-hukum syari’ah’.

Dan *maqâshid al-tasyri’ al-khashshah* (مقاصد التشريع الخاصة) adalah :

¹³ *Ibid.*, hlm. 8 dan 37. Lihat juga Al-Badawiy, *op.cit.*, hlm. 46.

¹⁴ Al-Qaradhawiy, *Nazhriyah Maqâshid al-syarî’ah Bain al-Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah Wa Jumhur Al-Ushuliyyin Dirasah Muqaranah Min Al-Qarni Al-Khamis Ila Al-Qarni Al-Tsamin Al-Hijriy*, (Kairo : t.t., t.th.), hlm. 13. Lihat Al-Yubiy, *op.cit.*, hlm. 34-35. Lihat juga ‘Alauddin Husain Rahhal, *Ma’alim Wa Dhawabith Al-Ijtihad ‘Inda Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah*, (Yordan : Dar Al-Nafais, 1422 H./2002 M.), Cet. ke-1, hlm. 121-122.

مَقَاصِدُ التَّشْرِيعِ الْخَاصَّةِ وَهِيَ الْكَيْفِيَّاتُ الْمَقْصُودَةُ لِلشَّارِعِ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ
أَوْ لِحِفْظِ مَصَالِحِهِمُ الْعَامَّةِ فِي تَصَرُّفَاتِهِمُ الْخَاصَّةِ

Artinya : “Segala cara yang diinginkan oleh Allah swt untuk mewujudkan keinginan manusia yang bernilai manfaat atau untuk memelihara kemaslahatan mereka secara umum dalam segala tindakan mereka yang khusus”.

- f. Menurut ‘Ilal Al-Fasiy (w. 1394 H.), ia menggabungkan makna *maqâshid al-‘ammah* dan *maqâshid al-khashshah* yang diklasifikasikan oleh Ibnu ‘Asyur, yang mana definisi *maqashid al-syarî’ah* pada hakikatnya mencakup semua kandungan *maqâshid* baik *maqâshid al-‘ammah* maupun *maqâshid al-khashshah*, yaitu :

الْمُرَادُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ : الْغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ
أَحْكَامِهَا¹⁵

Artinya : “Tujuan akhir dan rahasia yang terkandung dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah”.

- g. Menurut Muhammad Sa’ad Bin Ahmad Bin Mas’ud Al-Yubiy, *maqâshid al-syarî’ah* adalah :

الْمَعَانِي وَالْحُكْمُ وَنُحُومُهَا الَّتِي رَاعَاهَا الشَّارِعُ فِي التَّشْرِيعِ عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ
مَصَالِحِ الْعِبَادِ¹⁶

Artinya : “Makna-makna (alasan-alasan), hikmah-hikmah dan lain sebagainya yang senantiasa dipelihara oleh syari’ (Allah swt) dalam menetapkan

¹⁵ Al-Khadimiyy, *‘Ilm Maqâshid Al-Syar’iyyah*, (Riyad : Maktabah Al-‘Abikan, 1421 H./2001 M), Cet. ke-1, hlm. 16. Al-Yubiy, *op.cit.*, hlm. 35. Lihat Al-Badawiy, *op.cit.*,. Lihat Al-Qaradhawiy, *op.cit.*, Lihat juga ‘Alauddin Husain Rahhal, *op.cit.*, hlm. 122.

¹⁶ Al-Yubiy, *op.cit.*

suatu hukum (syari'ah) baik secara umum maupun secara khusus dalam upaya mewujudkan kemaslahatan para hamba (manusia)".

- h. Wahbah Al-Zuhailiy, merumuskan istilah *maqâshid al-syari'ah* lebih kompleks dengan menggabungkan pemaknaan *maqâshid* yang dikemukakan oleh Al-Thahir bin Asyur dan Al-Fasiy, yaitu :

هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّرْعِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مَعْظَمِهَا أَوْ هِيَ الْغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا وَمَعْرِفَتُهَا أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ عَلَى الدَّوَامِ وَلِكُلِّ النَّاسِ لِلْمُجْتَهِدِ عِنْدَ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ وَفَهْمِ النُّصُوصِ وَلِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ لِلتَّعَرُّفِ عَلَى أَسْرَارِ التَّشْرِيعِ¹⁷

Artinya : "Makna (nilai-nilai) dan sasaran-sasaran syara' yang tersirat dalam seluruh atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan akhir dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh syari' dalam setiap ketentuan hukumnya. Bagi seorang mujtahid, mengetahuinya merupakan perkara yang sangat penting (dharûriyyah) demi keberlangsungan kehidupan manusia, sedangkan bagi selain mujtahid, bermanfaat untuk mengetahui rahasia syari'at (yang disyari'atkan oleh Allah)".

- i. Menurut Mushthafa Bin Karamatullah Makhdum, *maqâshid al-syari'ah* adalah :

الْمَصَالِحُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ بِتَشْرِيعِ الْأَحْكَامِ¹⁸

Artinya : "Semua kemaslahatan yang dimaksudkan oleh Allah (syari') dalam menetapkan hukum-hukum (ketentuanNya)".

- j. Menurut Al-Qaradhawiy, *al-maqâshid* pemaknaannya tidak menyimpang dari pengertian *al-mashlahah*, sehingga ia mengatakan bahwa :

¹⁷ Al-Zuhailiy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1986), Juz I, Cet. ke-1, hlm. 1017. Lihat juga dalam kitabnya *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1419 H/1999 M.), Cet. ke-1, hlm. 217. Lihat Al-Yubiy, *op.cit.*, hlm. 36.

¹⁸ Mushthafa Bin Karamatullah Makhdum, *Qawa'id Al-Wasa'il Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah; Dirasah Ushuliyyah Fi Dhu'i Al-Maqâshid al-syari'ah*, (Riyad : Dar Isybiliyya, 1420 H/1999 M.), Cet. ke-1, hlm. 34.

أَنَّ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ أَقَامَتْ أَحْكَامَهَا عَلَى رِعَايَةِ مَصَالِحِ الْمُكَلَّفِينَ وَ دَرءِ الْمَفَاسِدِ عَنْهُمْ وَتَحْقِيقِ أَفْضَى الْخَيْرِ لَهُمْ¹⁹

Artinya : “Bahwa syari’ah islamiyah dalam pelaksanaan hukum-hukumnya senantiasa memelihara kepentingan kemaslahatan para mukallaf, menghindari kerusakan dan memastikan bahwa kebaikan yang paling mulia senantiasa memihak pada mukallaf”.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *maqâshid al-syari’ah* mestilah mencakup pemeliharaan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (عاجلا وآجلا) secara sekaligus. Karena sesungguhnya seluruh ajaran agama (*syari’ah samawiyah* ; yang diajarkan dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil) secara umum dan *syari’ah Islam* yang dibawa oleh Rasulullah saw secara khusus, tujuannya adalah untuk menghilangkan kesulitan bagi manusia, mengangkat kemudharatan, mewujudkan nilai kemaslahatan, memperkenankan atau membolehkan yang baik-baik, dan mencegah semua yang buruk, merealisasikan ikatan dan janjinya dengan Allah swt yang pernah dibuat serta untuk memperbaiki urusan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁰

Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa semua maksud dan tujuan *khitaab* Allah swt terhadap hambaNya adalah dalam rangka merealisasikan pengabdian dan peng’imarah kehidupan. Sebagaimana Allah swt berfirman :



¹⁹ Jasir ‘Audah, *Multaqa Al-Imam Al-Qurthubiy Ma’a Al-Ashhab Wa Al-Talimidz ; Maqâshid al-syari’ah ‘Inda Al-Syaikh Al-Qurthubiy*, (Qatar : , 1428 H./2007 M.), hlm. 43.

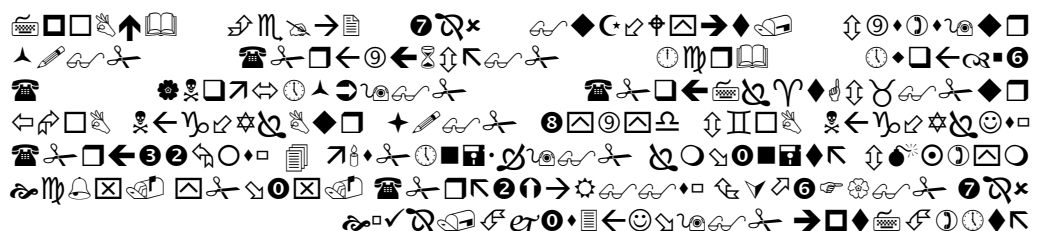
²⁰ Yusuf Hamid Al-‘Alim, *Al-Maqâshid Al-‘Aammah Li Al-Syari’ah Al-Islamiyah*, (Riyadh : Al-Ma’had Al-‘Alamiy Li Al-Fikr Al-Islamiy, 1415 H./1994 M.), Cet. ke-2, hlm. 2.



 (سورة هود: 11\61)

Artinya : “Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepadaNya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Dan, segala nilai kemaslahatan itu ditujukan untuk mewujudkan dan merealisasikan pengabdian kepada Allah swt, mewujudkan kebaikan bagi semua makhluk serta bertujuan membahagiakannya di dunia dan akhirat dengan meninggalkan segala bentuk *kemudharatan*. Dengan kata lain bahwa segala ajaran dan aturan Allah swt dari awal hingga akhir zaman adalah untuk merealisasikan pengabdian dan meninggalkan keburukan (*thaghut*), seperti yang disebutkan Allah swt dalam al-Qur'an :



 (سورة النحل: 16\36)

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan) sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)”.

B. Sejarah dan Perkembangan Ilmu *Maqâshid al-syarî'ah*

Memempelajari teori *maqâshid*, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *mashlahah*. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *maqâshid al-syarî'ah* adalah mencakup nilai-nilai kemaslahatan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa teori

mashlahat menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting dalam kajian ilmu *ushul al-fiqh* dan *fiqh*.

Sejarah *maqâshid* dapat dibagi menjadi tiga periode. *Pertama*; periode permulaan Islam atau periode kenabian Muhammad saw. Periode ini merupakan periode pengenalan *maqâshid al-syarî'ah* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk *isyarat-isyarat dilalah* yang belum tercairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang belum diteorikan. *Kedua*; periode *shahabat* dan *tabi'in*. Pada masa ini mulai diletakkanlah batu pertama perkembangan pesat sejarah *maqâshid*. Dan periode *ketiga* atau yang terakhir adalah periode pasca *shahabat* dan *tabi'in*, sehingga menjadi disiplin kajian ilmu tersendiri oleh para ulama *ushuliyyin* dan *fuqaha'*.

1. *Maqâshid al-syarî'ah* pada Masa Permulaan Islam

Dalam periode awal, *syarî'ah* merupakan *al-nushush al-muqaddasah* dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syarî'ah* disebut *al-thariqah al-mustaqimah*.²¹ Muatan *syarî'ah* dalam arti ini mencakup antara lain bidang *aqidah*, *'ibadah*, *mu'amalah*, *hukum keluarga*, *berkaitan dengan sanksi hukum*, *etika*, dan *lain-lain*, maka dapat dilihat bahwa *syarî'ah* Islam tidak bergeser dari prinsip-prinsip *dharûriyyah*, *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah*.

Pada prinsipnya, *syarî'ah* Islam senantiasa mementingkan keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk lebih jelasnya prinsip-prinsip pokok tujuan *syarî'ah* Islam ini (*maqâshid al-syarî'ah*) ini akan dijelaskan pada bab pembagian *maqâshid al-syarî'ah*. Berkaitan dengan prinsip-prinsip pokok tujuan

²¹ Ali Al-Sayis, *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Athwaruha*, (Kairo : Majma' Al-Buhuts Al-Islamiy, 1970), hlm. 8.

syari'ah ini, banyak ayat yang menjelaskan hal ini, di antaranya adalah apa yang dimaksudkan oleh firman Allah swt :

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِّ ذُرِّيَّتِهِ لَبِيبًا ذَا فَهْمٍ ذِكْرًا وَفِيًّا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ يُمْسِكُونَ بِآيَاتِنَا أَكْثَرَ وَهُمْ أَغْصَنَ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَبِيبٌ ذُو فَهْمٍ ذِكْرًا وَفِيًّا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ يُمْسِكُونَ بِآيَاتِنَا أَكْثَرَ وَهُمْ أَغْصَنَ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَبِيبٌ ذُو فَهْمٍ ذِكْرًا وَفِيًّا﴾ (سورة الجاثية: 45\18)

Artinya : "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".

Begitu juga dalam surat al-Syura ayat 13 ditegaskan bahwa :

﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلْعِبَادِ أَنْ يُقَسِّمُوا أَمْ يُرِيدُونَ كِبَارًا فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَبْهَتَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَكَارِدُهُمْ ثُمَّ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهْدً ثُمَّ يَرْجِعُونَ وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ يُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّبِعُوكَ سَاعَةً ثُمَّ نَسُوا إِذْ كُنْتَ تَخْرُجُ أَصْفَدًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّبِعُوكَ سَاعَةً ثُمَّ نَسُوا إِذْ كُنْتَ تَخْرُجُ أَصْفَدًا﴾ (سورة الشورى: 42\13)

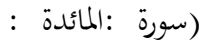
Artinya : "Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)".

Kemudian, alasan berikutnya adalah sebagai mana firman Allah swt :

﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلْعِبَادِ أَنْ يُقَسِّمُوا أَمْ يُرِيدُونَ كِبَارًا فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَبْهَتَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَكَارِدُهُمْ ثُمَّ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهْدً ثُمَّ يَرْجِعُونَ وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ يُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّبِعُوكَ سَاعَةً ثُمَّ نَسُوا إِذْ كُنْتَ تَخْرُجُ أَصْفَدًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّبِعُوكَ سَاعَةً ثُمَّ نَسُوا إِذْ كُنْتَ تَخْرُجُ أَصْفَدًا﴾ (سورة البقرة: 2\185)

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

Pada ayat yang lain juga dikatakan :



dan menyempurnakan nikmatNya bagimu agar kamu bersyukur”.

Di masa Rasulullah saw, pernah terjadi suatu kasus peristiwa, seorang Arab badui terkencing di dalam masjid, disebabkan karena ketidaktahuannya waktu itu, dan Rasulullah saw tidak memarahinya dan bahkan melarang para sahabat ketika itu memarahinya. Rasulullah saw bahkan memberikan pandangan yang luar biasa (bijak), seperti disebutkan dalam satu riwayat sebagai berikut :

Artinya : “Bahwa Abu Hurairah berkata, Seorang Arab badui berdiri dan kencing di Masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya. Maka Nabi saw bersabda kepada mereka: “Biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan air, sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan”.

114

Sebagai contoh lain, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu untuk bekal tiga hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan Nabi dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan ini dikemukakan oleh Nabi, pada waktu itu Nabi membenarkan tindakan para sahabat sembari menjelaskan bahwa hukum pelarangan menyimpan daging kurban itu didasarkan atas kepentingan *al-daffah* (tamu yang terdiri dari orang miskin yang datang dari perkampungan Badawi ke Kota Madinah). Sebagai mana diriwayatkan dalam hadits Nabi saw, sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّخِرُوا لثَلَاثَ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ وَيَجْمَلُونَ مِنْهَا الْوَدَكُ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَلِكَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالُوا نَهَيْتَ عَنْ لَحْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا يَعْنِي بِالْدَّافَةِ قَوْمًا مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ²³

Artinya : “Dari Abdullah bin Waqid ia berkata; “Rasulullah saw melarang memakan daging kurban setelah tiga hari”. Abdulah bin Abu Bakar berkata; “Kemudian hal itu aku sampaikan kepada ‘Amrah binti Abdurrahman, lalu ia berkata; “Benar, aku telah mendengar ‘Aisyah, isteri Nabi saw berkata; “Pada masa Rasulullah saw sekelompok orang-orang Badui memukul rebana menyambut kehadiran hari ‘Idul Adhha”, lalu Rasulullah saw bersabda: “Simpanlah daging kurban untuk tiga hari dan sedekahkanlah sisanya !”. ‘Aisyah berkata; “Setelah itu ada yang bertanya kepada Rasulullah saw ; “Orang-orang telah memanfaatkan binatang kurban tersebut dengan menghilangkan lemaknya dan menjadikan (kulit-kulitnya) sebagai tempat air”. Lalu Rasulullah saw bersabda : “Kenapa begitu atau yang semisal itu ?. Mereka pun menjawab,

²³ Al-Muwaththa’ Imam Malik Hadits Nomor 1057, dalam Abd Al-Sanad Hasan Yamamah, *Mausu’ah Syuruh Al-Muwaththa’ Li Al-Imam Malik Bin Anas*, (Kairo : Markaz Hajar Li Al-Buhuts Wa Al-Dirasat Al-‘Arabiyyah Wa Al-Islamiyah, 1426 H./2005 M.), Cet. ke-1, Juz XIII, hlm. 53-54.

"Anda telah melarang daging kurban setelah tiga hari". Maka Rasulullah saw bersabda : "Saya melarang kalian karena adanya kepentingan al-daffah ketika itu. Sekarang makanlah daging tersebut, sedekahkanlah dan simpanlah sisanya. Makna al-daffah yaitu tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah".

Dari ketetapan tersebut terlihat bahwa sejak masa Nabi saw, prinsip-prinsip *maqâshid al-syarî'ah* telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Maqâshid al-syarî'ah* yang terdapat dalam hadits larangan menyimpan daging qurban pada awalnya yakni memberi kelapangan kaum miskin yang berdatangan dari dusun ke kota Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itu sendiri tidak diberlakukan lagi oleh Nabi saw.

Dalam riwayat lain juga ditegaskan :

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ²⁴
Artinya : *"Dari 'Amru bin Yahya Al-Mazini dari bapaknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain".*

Berkaitan dengan keadaan darurat (*dharuriy*) yakni keadaan yang sulit yang sangat menentukan eksistensi manusia karena jika ia tidak diselesaikan maka akan dapat mengancam eksistensi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

Dalam satu *qa'idah fiqhiyah* misalnya dikatakan bahwa *الضرر لا يزال بالضرر* .

Karena pada dasarnya kemudharatan mesti dihilangkan dengan sesuatu yang tidak

²⁴ Malik Bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Jilid III, hlm. 572-573.

mengandung kemudharatan, tidak mungkin kemudharatan dihilangkan dengan kemudharatan lainnya.²⁵

Namun, andai kata kemudharatan itu menghilangkannya harus dengan kemudharatan juga, maka mesti seimbang dan sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah*, bahwa sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan kemudharatan itu apabila harus (juga) dengan kemudharatan lain, kemudharatannya harus lebih ringan dari kemudharatan asal (yang akan dihilangkan). Ini berkaitan dengan bahwa segala sesuatu yang dapat membahayakan harus dihilangkan (dilenyapkan).

Dengan adanya kondisi darurat ini maka ketentuan yang pada mulanya adalah terlarang menjadi dibolehkan seukuran terpenuhinya kebutuhan darurat tadi (hilangnya kondisi kritis). Sebagai mana firman Allah swt :

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (سورة الطلاق: 6\65)

Artinya : *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka).*

Dan dalam surat yang lain dikatakan :

لَا تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (سورة البقرة: 2\233)

Artinya : *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya".*

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (سورة الأعراف: 7\56)

Artinya : *"Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah (Allah) memperbaiki (penciptaan)nya".*

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (سورة القصص: 27\77)

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Kairo : Dar Al-Hadits, 1426 H./2005 M), hlm. 126.

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Hadits di atas (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) kemudian dijadikan *qa'idah* oleh ulama fiqh untuk

sebagai dasar menegakkan dan memelihara kemaslahatan bagi umat dalam menjalankan agamanya. Perbedaan makna antara *dharar*²⁶ dengan *dhirar*²⁷ adalah bahwa makna *dharar* itu : إلحاق مفسدة بالغير مطلقا . Sedangkan makna *dhirar* adalah :

إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة . Sehingga layak dikatakan bahwa makna *lafazh*

dhirar menunjukkan makna *musyarakah*.²⁸

Pemahaman *qaidah fiqhiyah* di atas didukung oleh dalil al-Qur'an, yaitu

: وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا (سورة البقرة: 231\2) Artinya : “dan janganlah kamu

tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka).²⁹

2. *Maqâshid al-syarî'ah* pada Periode *Shahabat* dan *Tabi'in*

Para shahabat dalam menyikapi hukum-hukum Islam (berijtihad) secara ideal tidak terlepas dari konteks sosial, tetapi dimensi sosial itu telah menyadarkan mereka

²⁶ لا ضرر أى لا يضر الرجل أخاه وهو ضد النفع . Lihat Ibnu Manzhur, *Lisan Al-'Arabi*, (t.tp. : Dar Al-Ma'arif, t.t.) hlm. 2573.

²⁷ *ibid.*, لا ضرار أى لا يضار كل واحد منهما صاحبه

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit.*,

²⁹ QS. Al-Baqarah (2) : 231. Demikian juga seperti yang digambarkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 ; QS. Al-Thalaq (65): 6 dan QS. Al-Nisa (4): 12. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa haram hukumnya mendatangkan kemudharatan. Pengertian mudharat yang dimaksud al-Quran bukan sekedar yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadits saja, tetapi semua bentuk kesulitan yang dapat menghalangi terlaksananya *maqâshid al-syarî'ah*, maka itu adalah *mudharat*.

untuk mencari jawaban-jawaban ideal Islam terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Interpretasi sahabat terhadap *syari'ah* adalah dengan memahami *maqâshid al-syari'ah* (*tujuan-tujuan syari'ah*).

Dalam ijtihadnya, tipologi penalaran para sahabat cukup variatif; ada yang berijtihad dengan metode analogi (*qiyas*), pertimbangan kemaslahatan (*mashlahah*), *istihsan*, tindakan preventif (*sadd al-dzari'ah*) dan pertimbangan adat-istiadat (*al-'urf*).

Bersamaan dengan itu juga para sahabat sadar bahwa teks-teks keagamaan (*al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*) sangat terbatas ketika harus berhadapan dengan kompleksitas permasalahan (*al-nushush mutanahiyyah, wa al-waqai' ghayr mutanahiyyah*). Sehingga, peran ijtihad guna menggali makna tersirat dari teks (wahyu) tersurat merupakan solusi yang harus ditempuh, namun tetap mengacu pada *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*.

Upaya mempertimbangkan hukum dengan cara mengkaji sisi *maqashi al-syari'ah* seterusnya dilakukan pula oleh para sahabat. Mereka merupakan orang yang paling mengerti *maqâshid al-syari'ah* (tujuan serta sasaran kandungan *al-Qur'an* dan *Sunnah*), karena mereka menyaksikan dan terlibat langsung dalam proses pembentukan dasar-dasar *syari'ah* karena mereka hidup satu masa dengan Rasulullah saw.

Satu contoh pada masa sahabat dalam beberapa ketetapan hukum, misalnya yang dilakukan oleh Umar bin Khatab antara lain : Umar tidak memberikan bagian zakat untuk kelompok non muslim, karena semula pemberian zakat kepada mereka adalah agar mereka memeluk Islam. Akan tetapi setelah Islam kuat dan keadaan telah berubah, maka Umar tidak memberikan bagian zakat untuk mereka.

Kasus ini bermula ketika 'Uyainah Bin Hushain Al-Fazzariy dan Al-Aqra' Bin Habis dari kalangan muallaf (yang semula mendapat pembagian zakat), mendatangi Abu Bakar dan meminta bagian harta (lahan garapan), karena di masa Rasulullah saw mereka dapat bagian dipandang sebagai *muallafat qulubuhum* (orang yang dijinakkan hatinya). Maka Abu Bakar menulis surat (nota) kepada Umar agar memberi mereka bagian dari zakat. Tetapi Umar marah dan merobek surat Abu Bakar tersebut, sembari berkata ; *"Kalian dulu diberi harta zakat karena waktu itu hati kalian sedang dijinakkan. Sekarang kalian tidak lagi dijinakkan dan umat Islam sudah kuat. Jika kalian masih menginginkan Islam, tetapi kalau tidak, maka antara kami dan kalian ada pedang (perang)"*. Mendengar jawaban Umar demikian, keduanya pulang mendatangi Abu Bakar dan berkata ; *"Apakah Anda yang khalifah atau Umar?, engkau memberi kami peluang lewat surat, namun Umar merobeknya"*. Abu Bakar menjawab, *"Itulah Umar bin Khatab"*.³⁰

Di antara contoh pandangan atau pemikiran yang terjadi pada masa tabi'in berkenaan dengan teori melestarikan nilai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (*fi maqâshid al-syarî'ah*) dalam menetapkan hukum adalah :

- a. Sai'id Bin Musayyab, membolehkan pematokan harga barang apabila dibutuhkan demi kepentingan kemaslahatan bersama. Alasannya, karena pemimpin (*imam*) wajib memelihara kemaslahatan seluruh umat Islam, dan memelihara kemaslahatan bersama lebih utama dari pada mementingkan kemaslahatan

³⁰ Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuh*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1414 H/1994 M), Juz I, hlm. 123. Lihat Ibrahim Usman Al-Sya'lan, *Nizham Masharif Al-Zakah Wa Tauzi' Al-Ghanami*, (Riyadh : t.pn., 1402 H.), hlm. 803. Dalam Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 42.

pribadi. Hal ini berdasarkan pada peristiwa ketika ada sekelompok orang mengadu kepada Rasulullah perihal mahalnya suatu harga :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ³¹

Artinya : "Dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harga telah melonjak, maka tetapkanlah harga untuk kami!. Maka ia berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizki. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah, sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta."

- b. Bilal Bin Abdullah Bin Umar Bin Al-Khatab pernah bersumpah bahwa ia tidak akan memberikan izin kepada wanita untuk pergi ke masjid dengan alasan adanya unsur *mafsadah*, pertimbangannya adalah karena perubahan zaman, hal ini bertujuan untuk melindungi sekalian wanita dari para musuh dan pengganggu, sebagai mana dinyatakan dalam suatu riwayat sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعَهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعَهُنَّ³²

Artinya : "Dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, "Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian ke masjid apabila mereka meminta izin kepadanya." Perawi berkata, "Bilal bin Abdullah berkata, "Demi Allah, sungguh kami akan melarang mereka." Perawi berkata, "Maka Abdullah menghadapnya,

³¹ Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Riyad : Maktabah Al-Ma'arif, t.th.), Bab *Ma Ja'a Fi Al-Mukhabarah wa Al-Mu'awanah*, hlm. 311. Lihat Abu Abdullah Muhammad Yazid Al-Qazwainiy, *Sunan Ibn Majah*, (t.t. : Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th.), Juz I, hlm. 741-742. Lihat Al-Badawiy, *op.cit.*, hlm. 70-71.

³² *Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawiy*, (Mesir : Al-Mathba'ah Al-Mishriyah Al-Azhar, 1347 H/1929 M), Cet. ke-1, Juz IV, hlm. 161. Lihat Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawiy, *op.cit.*

lalu mencelanya dengan celaan yang jelek yang aku tidak pernah mendengarnya mencelanya seperti itu sama sekali, seraya dia berkata, "Aku mengabarkan kepadamu dari Rasulullah saw, tetapi kamu malah (menentang) dengan berkata, "Demi Allah, kami akan menghalangi mereka".

3. *Maqâshid al-syarî'ah* Pasca *Shahabat* dan *Tabi'in*

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam lebih lanjut, walau pada mulanya masih tidak menyebut istilah *maqâshid al-syarî'ah*, dapat dikatakan bahwa teori *maqâshid al-syarî'ah* sebenarnya merupakan pengembangan dari penerapan konsep *qiyas* yakni dalam kaitan *masalik al-'illah* dan teori *mashlahah*.³³

Pertimbangan pemikiran di atas, dapat dilihat pada masing-masing karya para ulama secara terperinci, berikut ini penulis paparkan secara berurutan :

- a. Diawali pada masa Imam Al-Syafi'iy (150-204 H.). Imam Al-Syafi'iy terkenal dan diakui sebagai ulama yang pertama kali menyusun *ilmu ushul al-fiqh*, dan secara otomatis juga ia merupakan pendiri dasar dari ilmu *maqâshid al-syarî'ah*. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Al-Risalah*,³⁴ *Al-Um*, dan lain-lain.

³³ Di kalangan ulama *ushul al-fiqh*, dalam kaitan penta'ilan yang mereka bahas dalam pembahasan *qiyas* dan konsep kemaslahatan menjadi cikal bakal dari teori *maqâshid al-syarî'ah*. *Al-Mashlahah*, pada dasarnya terbagi kepada tiga macam :

Pertama, *al-mashlahah al-mu'tabarah syar'an*; nilai kemaslahatan yang *syar'iy* (*al-mashlahah al-syar'iyyah*) yang diperintahkan berdasarkan *al-Qur'an*, *sunnah*, *ijma'* atau *qiyas* dan mesti dilaksanakan, seperti perintah shalat.

Kedua, *al-mashlahah al-mulghah syar'an*; nilai kemaslahatan yang bernilai sia-sia dan mesti ditinggalkan (dilarang) berdasarkan *al-Qur'an*, *sunnah*, *ijma'* atau *qiyas*, seperti kemaslahatan yang terdapat pada larangan *khamar*.

Ketiga, *al-mashlahah al-maskut* atau *al-mashlahah al-mursalah*; nilai kemaslahatan yang tidak ada terungkap secara jelas oleh dalil tertentu (khusus) baik berdasarkan *al-Qur'an*, *sunnah*, *ijma'* atau *qiyas*, tetapi bukan berarti tidak ada petunjuk dalil secara umum padanya, karena ia bersandar pada *maqâshid al-syarî'ah* dan keumumannya. Lihat Muhammad Bin Husain Bin Hasan Al-Jaizaniy, *Ma'alim Ushul Al-Fiqh 'Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*, (Riyad : Dar Ibn Al-Jauziy, 1416 H./1996 M.), Cet. ke-1, hlm. 242-243. Lihat Abdulkarim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jam' Li Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tathbiqih 'Ala Al-Madzahib Al-Rajih*, (Riyad : Maktabah Al-Rusydi, 1420 H./2000 M.), Cet. ke-1, hlm. 388-389.

³⁴ Kitab *Al-Risalah* menurut Ahmad Muhammad Syakir, dalam sejarahnya ditulis dua kali dengan metode dikte (*imlak*) oleh al-Syafi'i di hadapan murid-muridnya. Penulisan pertama di Baghdad dan penulisan kedua ketika di Mesir. Tetapi penulisan yang pertama itu kemudian hilang, sementara kitab itu sudah dikenal luas di kalangan ulama. Akhirnya ketika di Mesir al-Syafi'i diminta lagi menulis kitabnya itu

- b. Setelah Al-Syafi'i, muncul Imam Al-Juwainiy (419-478 H.). Imam Al-Juwainiy terkenal dengan julukan Imam Haramain memiliki karya yang terkenal di antaranya adalah *Al-Syamil Fi Ushul Al-Diin*, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, *Al-Waraqat Fi Ushul Al-Fiqh*, *Al-Ghiyatsiy*, *Mughits Al-Khuluq* dan *Al-'Aqidah Al-Nizhamiyah*.

Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ulama *ushul al-fiqh* pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid al-syarī'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.³⁵

Kemudian al-Juwainiy mengelaborasi lebih jauh *maqasid al-syarī'ah* itu dalam hubungannya dengan *'illat* dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: yang masuk kategori *dharuriyyat* (primer), *al-hajat al-ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *dharuriyyat* dan *hajjiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.³⁶ Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwainiy membagi tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *makramat* (*tahsiniyyah*).

dihadapan muridnya sekaligus periwat kitab ini, yaitu Rabi' Ibn Sulaiman, atas permintaan seorang ahli hadits kenamaan Hijaz, 'Abd al-Rahman Ibn al-Mahdi (135-198 H). Hasil penulisannya ini kemudian disampaikan kepada al-Mahdi dengan cara dikirim, sehingga kitab yang sebelumnya disebut *al-Kitab* ini dikenal dengan nama *al-Risalah* yang berarti "surat" yang dikirimkan (*epistle*). lihat Ahmad Muhammad Syakir, "*Muqaddimah al-Risalah*" dalam al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut : Mathba'ah Islamiyah, tt), hlm. 11-12.

³⁵ Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo : Dar al-Anshar, 1400 H.), Juz I, hlm. 295.

³⁶ *Ibid.*, Juz II, hlm. 923- 930.

- c. Selanjutnya Imam Al-Ghazaliy (450-505 H.). Imam Al-Ghazaliy adalah seorang yang terkenal *faqih*, ahli di bidang *ushul fiqh* dan ilmu kalam. Ia termasuk ulama yang banyak menghasilkan karya tulisan di antaranya kitab *Al-Mustashfa*, *Al-Wajiz*, *Ihya Ulum Al-Din* dan masih banyak lagi yang lainnya.
- d. Selanjutnya muncul Al-Razi (544-606 H.),³⁷ Al-Amidiy (w. 631 H.)³⁸, setelah itu ada Al-'Iz Bin Abd Al-Salam (577-660 H.)³⁹ beserta muridnya Al-Qarrafiy (626 H.-684 H.).⁴⁰ Al-'Iz ibn Abd al-Salam lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: daruriyat, hajiyat, dan takmilat atau tatimmat. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa *taklif* harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
- e. Setelah itu muncul Ibnu Taimiyah (661-728 H.)⁴¹, Ibnu Qayyim (w 751 H.)⁴² dan Al-Thufiy⁴³

³⁷ Nama lengkapnya adalah Muhammad Bin Umar Bin Al-Husain Bin Ali Al-Tamimiyy Al-Bakriyy Al-Thabrastaniyy Al-Raziyy. Di antara karyanya adalah kitab *Al-Tafsir Al-Kubra* dan *Al-Mahshul Fi Al-Ushul*.

³⁸ Nama lengkapnya adalah Ali Bin Abi Ali Bin Muhammad Bin Salim Al-Ts'alabiyy, terkenal dengan gelar Saifuddin. Di antara kitabnya yang terkenal adalah *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*.

³⁹ Nama lengkapnya adalah Abdul Aziz Bin Abdussalam Bin Abi Al-Qasim Al-Salami, terkenal dengan sebutan Sulthan Al-Ulama. Karyanya yang terkenal adalah kitab *Al-Qawaid Al-Kubra* atau dikenal dengan *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*.

⁴⁰ Nama lengkapnya adalah Al-Imam Syihabuddin Abu Al-'Abbas Ahmad Bin Idris Bin Abdurrahman Al-Shihnajiy Al-Qarrafiy Al-Malikiyy. Ia adalah ulama yang ahli fiqh dan ushul fiqh, dan juga seorang ahli tafsir (*mufasssir*). Karyanya yang terkenal di antaranya adalah *Nafais Al-Ushul Syarh Al-Mahshul*, *Tanqih Al-Fushul Wa Syarhuhu*, *Al-Furuq* dan *Al-Ihkam Fi Tamyiz Al-Fatawa 'An Al-Ahkam Watasharuf Al-Qadhi Wa Al-Imam*.

⁴¹ Nama lengkapnya adalah Muhammad Bin Al-Khadhar Bin Taimiyah Al-Haraniyy, terkenal juga dengan julukan (*kunniyah*)nya Abu Al-'Abbas. Ia juga termasuk ulama yang fenomenal dan banyak menghasilkan karya ilmu dan terkenal dengan ulama yang ahli di bidang ilmu fiqh, seorang mujtahid kontemporer dan ahli tafsir.

⁴² Nama lengkapnya adalah Muhammad Bin Abi Bakar Bin Ayyub Bin Sa'ad Bin Hariz Al-Zur'iyy Al-Damasqiyy, terkenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyy. Ia adalah seorang yang *faqih* dan ahli di bidang

- f. Selanjutnya muncul Imam Al-Syathibiy (720-790 H.). Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lakhmiy Al-Syathibiy. Hasil karyanya yang terkenal adalah kitab *Al-Muwafaqat* dan *Al-I'tisham*. Pada abad ke- 8 H *maqâshid al-syarî'ah* dikembangkan oleh al-Syatibiy melalui karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarî'ah*. Kajian Sejak itu, kajian *maqâshid al-syarî'ah* mencapai titik puncaknya dan berhasil membahasnya secara sistematis, dan sejak itu itu pulalah al-Syatibi dikenal dan diakui sebagai Bapak *maqâshid syarî'ah*.
- g. Setelah Al-Syathibiy, ada beberapa ulama kontemporer lain yang fokus mengkaji ilmu *maqâshid al-syarî'ah*, di antaranya ada Al-Thahir bin 'Asyur (w. 1393 H.).⁴⁴ Ia adalah ulama yang pertama kali yang mencoba merumuskan definisi dan mengklasifikasikan *maqâshid*. Sehingga ia membagi *maqâshid* menjadi *maqâshid al-am* dan *maqâshid al-khash*. Kemudian 'Ilal Al-Fasiy (w. 1394 H.)⁴⁵ yang kemudian menggabungkan makna *maqâshid al-am* dan *maqâshid al-khas* menjadi satu.⁴⁶

ilmu ushul. Di antara karyanya yang terkenal adalah kitab *l'lam Al-Muwaqî'in*, *Zad Al-Ma'ad*, *Syifa' Al-'Alil*, *Miftah Dar Al-Sa'adah*, *Ighatsah Al-Lahafan* dan lain-lain.

⁴³ Nama lengkapnya adalah Sulaiman Bin Abdul Qawiy Bin Sa'id Al-Thufiy Al-Sharshariy dan ia termasuk seorang yang terkenal *faqih* dan ahli *ilmu ushul fiqh*. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Mukhtashar Al-Raudhah Wa Syarhu*, *Mukhtashar Al-Mahshul*, *Miraj Al-Wushul* *Ila 'Ilm Al-Ushul* dan lain-lain.

⁴⁴ Nama lengkapnya adalah Muhammad Al-Thahir Bin 'Asyur, terkenal dengan karyanya *Maqâshid al-syarî'ah Al-Islamiyah*, *Ushul Al-Nizham Al-Ijtima'iy* dan *Al-Wâqfu Wa Atsaruhu Fi Al-Islam*.

⁴⁵ Nama lengkapnya adalah Muhammad 'Ilal Bin Abdul Wahid Bin Abdussalam Al-Fasiy Al-Fahriy, dengan karyanya yang terkenal *Maqâshid al-syarî'ah Al-Islamiyah Wa Makarimiha*, dan *Difa' 'An Al-Syarî'ah*.

⁴⁶ 'Ala Al-Din Husain Rahhal, *a'alim Wa Dhawabith Al-Ijtihad 'Inda Syaikh Al-islam Ibn Taimiyyah*, (Yordan : Dar Al-Nafais, 1422 H./2002 M.), Cet. ke-1, hlm. 121-122.

h. Setelah itu ada Wahbah Al-Zuhailiy dan Yusuf Al-Qaradhawiy⁴⁷ yang keduanya juga membahas teori *maqâshid al-syarî'ah* ini yang secara substansial sebenarnya masih dalam wacana menghindari dari segala yang dapat merusak dan merealisasikan nilai kemaslahatan atau kebaikan baik di dunia maupun untuk di akhirat (*tahqiq al-mashalih wa ibthal al-mafasid fi al-dunya wa al-dîn*).

C. Landasan *Maqâshid al-syarî'ah*

Setiap proses pembentukan hukum (*al-tasyri' fi al-islam*) memiliki tujuan yang mesti direalisasikan oleh hamba Allah dalam kehidupan ini. Allah swt menciptakan alam semesta ini bukan tidak mempunyai tujuan, akan tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang mengandung hikmah, baik yang dapat secara mudah diketahui karena disebutkan secara jelas dalam *nash*, maupun yang hanya dapat diketahui melalui analisa dan pemikiran para *mujtahid*.

Maksud dan tujuan Allah swt menciptakan alam semesta masing-masing penciptaannya mengandung manfaat yang luar biasa. Firman Allah swt :

◆ ↖ 🔍 ⑥ 🌀 ✂️ ◆ ◻ ◆ ↗ 🖋️ 📷 ☺️ ○ ○ 🌊 ✂️ ✂️ ◻ ☆ 🕒 ⬇️ ■ 📱 ✂️ ✂️ ◆ 🙏 ◆ ◻
 (سورة الأنبياء : 21\16) ◆ ✎ ✓ ❌ 📞 ➡️ ⌚ 🌊 📷 ☺️ ⤵️ & ⚙️ 🛠️ ④ ◆ 📱 ✂️ ✂️ ◆ 🙏 ◆ ◻

Artinya : “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main”.

Demikian juga disebutkan dalam ayat yang lain, seperti :

⁴⁷ Nama lengkapnya adalah Yusuf Bin Abdullah Bin Ali Bin Yusuf, terkenal dengan sebutan Al-Qardhawi (diambil dari nama tempat asalnya, yaitu Qardhah). Ia lahir di Mesir pada tanggal 9 September tahun 1926. Di antara karyanya adalah *Madkhal Li Dirasah Al-Syarī'ah Al-Islamiyah*.



 (سورة المؤمنون: 23\115)

Artinya : “Maka apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”.

Manusia diciptakan oleh Allah swt adalah untuk menjadi pengabdian dan mentaati segala perintahNya (beribadah) melalui ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan RasulNya. Dan mereka merupakan pembawa berita gembira dan peringatan bagi ummatnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. Firman Allah swt :



 (سورة الزاریات: 51\56)

Artinya : “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.



 (سورة الأعراف: 7\172)

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku Ini Tuhanmu?”, mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini”.



 (سورة النساء: 4\165)

Artinya : “Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.

۞ ﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لِمَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ عِلْمٌ ۚ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۚ يَتَوَخَّاهُ الْغِيَاثُ وَالْغَرِيبُ ۚ ذُو الْعَرْشِ الْمُبَارَكُ ۚ يَتَجَسَّوْنَ فِي سُبْحَانَكَ وَالْاَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا مُدَوَّنَةٌ ۚ يُجِيبُ الْمُضْطَرِّضِينَ ۚ يُخَفِّضُ الْغَمَمَ ۚ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ هُوَ الْمَغْنِيُّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۚ﴾
 (سورة البقرة: 150-151)

Artinya : “Dan dari mana saja engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar Aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Kitab (al-Qur’an) dan Hikmah (sunnah), serta mengajarkan yang belum kamu ketahui”.

﴿وَلَا يَخَافُ الْعَذَابَ ۚ﴾ (سورة الأنبياء : 21\107)

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

Demikian juga dalam proses penciptaan manusia dan sekalian makhlukNya, Allah swt menjadikan langit dan bumi untuk ditempati oleh makhluk-Nya serta tempat berusaha dan beramal. Allah swt juga menyediakan semua yang ada di langit dan di bumi untuk dimanfaatkan oleh manusia,⁴⁸ agar nyata di antara mereka siapa yang taat dan patuh kepada Allah swt dan yang tidak patuh, seperti yang Allah swt firmankan dalam ayatnya :

⁴⁸ Inti pokok dari penciptaan alam ini adalah disediakan oleh Allah swt untuk menjadi media pengabdian oleh hambaNya, seperti disebutkan dalam al-Qur’an berikut ini :

﴿وَمَا يَكْفُرُ الْاِنْسَانُ لِمَ لَقِيَٰهُ ۚ﴾ (سورة الفجر: 1-4)
 ﴿وَمَا يَكْفُرُ الْاِنْسَانُ لِمَ لَقِيَٰهُ ۚ﴾ (سورة الفجر: 1-4)

Artinya : “Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan ‘Arasy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau Berkata (kepada penduduk Mekah), “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati”, niscaya orang kafir itu akan berkata, “Ini hanyalah sihir yang nyata”.

Beberapa contoh ayat yang membicarakan tujuan *syari'ah* dalam ibadah tertentu, misalnya dalam masalah ibadah shalat antara lain :

Artinya : “Dialah (Allah) yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu”.
(QS. Al-Baqarah {2} : 29)

Artinya: "Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan Telah menundukkan malam dan siang bagimu. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadaNya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)". (QS. Ibrahim {14} : 32-34)

(45\29

Perihal ibadah puasa misalnya Allah swt berfirman :

(سورة : البقرة : 2\183)

diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

سورة المائدة : (5\6)

130

Perihal perintah *qishash*, Allah swt berfirman :

𐤀𐤁𐤂𐤃𐤄𐤅𐤆𐤇𐤈𐤉𐤊𐤋𐤌𐤍𐤎𐤏𐤐𐤑𐤒𐤓𐤔𐤕𐤖𐤗𐤘𐤙𐤚𐤛𐤜𐤝𐤞𐤟𐤠𐤡𐤢𐤣𐤤𐤥𐤦𐤧𐤨𐤩𐤪𐤫𐤬𐤭𐤮𐤯𐤰𐤱𐤲𐤳𐤴𐤵𐤶𐤷𐤸𐤹𐤺𐤻𐤼𐤽𐤾𐤿𐥀𐥁𐥂𐥃𐥄𐥅𐥆𐥇𐥈𐥉𐥊𐥋𐥌𐥍𐥎𐥏𐥐𐥑𐥒𐥓𐥔𐥕𐥖𐥗𐥘𐥙𐥚𐥛𐥜𐥝𐥞𐥟𐥠𐥡𐥢𐥣𐥤𐥥𐥦𐥧𐥨𐥩𐥪𐥫𐥬𐥭𐥮𐥯𐥰𐥱𐥲𐥳𐥴𐥵𐥶𐥷𐥸𐥹𐥺𐥻𐥼𐥽𐥾𐥿𐧀𐧁𐧂𐧃𐧄𐧅𐧆𐧇𐧈𐧉𐧊𐧋𐧌𐧍𐧎𐧏𐧐𐧑𐧒𐧓𐧔𐧕𐧖𐧗𐧘𐧙𐧚𐧛𐧜𐧝𐧞𐧟𐧠𐧡𐧢𐧣𐧤𐧥𐧦𐧧𐧨𐧩𐧪𐧫𐧬𐧭𐧮𐧯𐧰𐧱𐧲𐧳𐧴𐧵𐧶𐧷𐧸𐧹𐧺𐧻𐧼𐧽𐧾𐧿𐨀𐨁𐨂𐨃𐨄𐨅𐨆𐨇𐨈𐨉𐨊𐨋𐨌𐨍𐨎𐨏𐨐𐨑𐨒𐨓𐨔𐨕𐨖𐨗𐨘𐨙𐨚𐨛𐨜𐨝𐨞𐨟𐨠𐨡𐨢𐨣𐨤𐨥𐨦𐨧𐨨𐨩𐨪𐨫𐨬𐨭𐨮𐨯𐨰𐨱𐨲𐨳𐨴𐨵𐨶𐨷𐨹𐨺𐨸𐨻𐨼𐨽𐨾𐨿𐩀𐩁𐩂𐩃𐩄𐩅𐩆𐩇𐩈𐩉𐩊𐩋𐩌𐩍𐩎𐩏𐩐𐩑𐩒𐩓𐩔𐩕𐩖𐩗𐩘𐩙𐩚𐩛𐩜𐩝𐩞𐩟𐩠𐩡𐩢𐩣𐩤𐩥𐩦𐩧𐩨𐩩𐩪𐩫𐩬𐩭𐩮𐩯𐩰𐩱𐩲𐩳𐩴𐩵𐩶𐩷𐩸𐩹𐩺𐩻𐩼𐩽𐩾𐩿𐪀𐪁𐪂𐪃𐪄𐪅𐪆𐪇𐪈𐪉𐪊𐪋𐪌𐪍𐪎𐪏𐪐𐪑𐪒𐪓𐪔𐪕𐪖𐪗𐪘𐪙𐪚𐪛𐪜𐪝𐪞𐪟𐪠𐪡𐪢𐪣𐪤𐪥𐪦𐪧𐪨𐪩𐪪𐪫𐪬𐪭𐪮𐪯𐪰𐪱𐪲𐪳𐪴𐪵𐪶𐪷𐪸𐪹𐪺𐪻𐪼𐪽𐪾𐪿𐫀𐫁𐫂𐫃𐫄𐫅𐫆𐫇𐫈𐫉𐫊𐫋𐫌𐫍𐫎𐫏𐫐𐫑𐫒𐫓𐫔𐫕𐫖𐫗𐫘𐫙𐫚𐫛𐫜𐫝𐫞𐫟𐫠𐫡𐫢𐫣𐫤𐫦𐫥𐫧𐫨𐫩𐫪𐫫𐫬𐫭𐫮𐫯𐫰𐫱𐫲𐫳𐫴𐫵𐫶𐫷𐫸𐫹𐫺𐫻𐫼𐫽𐫾𐫿𐬀𐬁𐬂𐬃𐬄𐬅𐬆𐬇𐬈𐬉𐬊𐬋𐬌𐬍𐬎𐬏𐬐𐬑𐬒𐬓𐬔𐬕𐬖𐬗𐬘𐬙𐬚𐬛𐬜𐬝𐬞𐬟𐬠𐬡𐬢𐬣𐬤𐬥𐬦𐬧𐬨𐬩𐬪𐬫𐬬𐬭𐬮𐬯𐬰𐬱𐬲𐬳𐬴𐬵𐬶𐬷𐬸𐬹𐬺𐬻𐬼𐬽𐬾𐬿𐭀𐭁𐭂𐭃𐭄𐭅𐭆𐭇𐭈𐭉𐭊𐭋𐭌𐭍𐭎𐭏𐭐𐭑𐭒𐭓𐭔𐭕𐭖𐭗𐭘𐭙𐭚𐭛𐭜𐭝𐭞𐭟𐭠𐭡𐭢𐭣𐭤𐭥𐭦𐭧𐭨𐭩𐭪𐭫𐭬𐭭𐭮𐭯𐭰𐭱𐭲𐭳𐭴𐭵𐭶𐭷𐭸𐭹𐭺𐭻𐭼𐭽𐭾𐭿𐮀𐮁𐮂𐮃𐮄𐮅𐮆𐮇𐮈𐮉𐮊𐮋𐮌𐮍𐮎𐮏𐮐𐮑𐮒𐮓𐮔𐮕𐮖𐮗𐮘𐮙𐮚𐮛𐮜𐮝𐮞𐮟𐮠𐮡𐮢𐮣𐮤𐮥𐮦𐮧𐮨𐮩𐮪𐮫𐮬𐮭𐮮𐮯𐮰𐮱𐮲𐮳𐮴𐮵𐮶𐮷𐮸𐮹𐮺𐮻𐮼𐮽𐮾𐮿𐯀𐯁𐯂𐯃𐯄𐯅𐯆𐯇𐯈𐯉𐯊𐯋𐯌𐯍𐯎𐯏𐯐𐯑𐯒𐯓𐯔𐯕𐯖𐯗𐯘𐯙𐯚𐯛𐯜𐯝𐯞𐯟𐯠𐯡𐯢𐯣𐯤𐯥𐯦𐯧𐯨𐯩𐯪𐯫𐯬𐯭𐯮𐯯𐯰𐯱𐯲𐯳𐯴𐯵𐯶𐯷𐯸𐯹𐯺𐯻𐯼𐯽𐯾𐯿𐰀𐰁𐰂𐰃𐰄𐰅𐰆𐰇𐰈𐰉𐰊𐰋𐰌𐰍𐰎𐰏𐰐𐰑𐰒𐰓𐰔𐰕𐰖𐰗𐰘𐰙𐰚𐰛𐰜𐰝𐰞𐰟𐰠𐰡𐰢𐰣𐰤𐰥𐰦𐰧𐰨𐰩𐰪𐰫𐰬𐰭𐰮𐰯𐰰𐰱𐰲𐰳𐰴𐰵𐰶𐰷𐰸𐰹𐰺𐰻𐰼𐰽𐰾𐰿𐱀𐱁𐱂𐱃𐱄𐱅𐱆𐱇𐱈𐱉𐱊𐱋𐱌𐱍𐱎𐱏𐱐𐱑𐱒𐱓𐱔𐱕𐱖𐱗𐱘𐱙𐱚𐱛𐱜𐱝𐱞𐱟𐱠𐱡𐱢𐱣𐱤𐱥𐱦𐱧𐱨𐱩𐱪𐱫𐱬𐱭𐱮𐱯𐱰𐱱𐱲𐱳𐱴𐱵𐱶𐱷𐱸𐱹𐱺𐱻𐱼𐱽𐱾𐱿𐲀𐲁𐲂𐲃𐲄𐲅𐲆𐲇𐲈𐲉𐲊𐲋𐲌𐲍𐲎𐲏𐲐𐲑𐲒𐲓𐲔𐲕𐲖𐲗𐲘𐲙𐲚𐲛𐲜𐲝𐲞𐲟𐲠𐲡𐲢𐲣𐲤𐲥𐲦𐲧𐲨𐲩𐲪𐲫𐲬𐲭𐲮𐲯𐲰𐲱𐲲𐲳𐲴𐲵𐲶𐲷𐲸𐲹𐲺𐲻𐲼𐲽𐲾𐲿𐳀𐳁𐳂𐳃𐳄𐳅𐳆𐳇𐳈𐳉𐳊𐳋𐳌𐳍𐳎𐳏𐳐𐳑𐳒𐳓𐳔𐳕𐳖𐳗𐳘𐳙𐳚𐳛𐳜𐳝𐳞𐳟𐳠𐳡𐳢𐳣𐳤𐳥𐳦𐳧𐳨𐳩𐳪𐳫𐳬𐳭𐳮𐳯𐳰𐳱𐳲𐳳𐳴𐳵𐳶𐳷𐳸𐳹𐳺𐳻𐳼𐳽𐳾𐳿𐴀𐴁𐴂𐴃𐴄𐴅𐴆𐴇𐴈𐴉𐴊𐴋𐴌𐴍𐴎𐴏𐴐𐴑𐴒𐴓𐴔𐴕𐴖𐴗𐴘𐴙𐴚𐴛𐴜𐴝𐴞𐴟𐴠𐴡𐴢𐴣𐴤𐴥𐴦𐴧𐴨𐴩𐴪𐴫𐴬𐴭𐴮𐴯𐴰𐴱𐴲𐴳𐴴𐴵𐴶𐴷𐴸𐴹𐴺𐴻𐴼𐴽

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa yang memperoleh ma'af dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”.

Perihal mempertahankan diri, sebagaimana firman Allah swt :

[illegible]

Artinya : “Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. dan Sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah”. Seandainya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti

akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa'.

D. Pembagian *Maqasyid Al-Syari'ah*

1. *Maqâshid al-syarî'ah* Ditinjau dari Sumbernya

Menurut Al-Syathibiy, pada tujuan hukum yang bermuara pada nilai kemaslahatan itu, pada garis besarnya motif *maqâshid al-syarî'ah* itu ditinjau dari sumbernya ada dua macam yaitu *qashd al-syari'* dan *qashd al-mukallaf*.⁴⁹

a. Maksud Allah (*qashd al-syari'*)

Kemaslahatan yang dimaksud *Syari'* (*qashd al-syari'*) adalah kemaslahatan berupa ketentuan *syari'ah* secara global yang diinginkan oleh Allah swt dalam upaya mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemungkinan terjadinya keburukan (*mafasid*) di dunia dan di akhirat.⁵⁰

Qashd al-syari', memiliki empat aspek tujuan ; *pertama*, tujuan dasar (*ibtida'iy*); *kedua*, tujuan kognitif (*ifhamiy*); *ketiga*, tujuan beban kewajiban (*taklifiy*), dan *keempat*, tujuan dogmatif (*imtitsaliy*).⁵¹ Dari sudut pandang ini, *syari'at* bertujuan agar setiap *mukallaf* memenuhi keempat tujuan *syari'ah* yang digariskan oleh *syari'* (Allah swt) di atas, sehingga tercapai tujuan utama *syari'ah* yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

⁴⁹ Al-Syathibiy, Juz II, *op.cit* hlm. 5.

⁵⁰ Nuruddin Bin Mukhtar Al-Khadimi, *'Ilm Al-Maqâshid al-syarî'ah* , (Riyad : Maktabah Al-'Abikan, 1421 H./2001 M.), Cet. ke-1, hlm. 71.

⁵¹ Al-Syathibiy, Juz II, *op.cit*.

1) Tujuan dasar (*ibtida'iy*)

Tujuan dasar (*ibtida'iy*) ini diarahkan agar manusia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya yang mempunyai tiga skala prioritas sifat kepentingan yaitu *al-dharûriyyah*, *al-hâjiyyah* dan *al-tahsîniyyah*.⁵²

Dalam upaya mempertahankan (*al-hifzh*) kelangsungan hidup ini ada dua cara : *pertama*, dengan cara mengokohkan dan memperkuat pilar-pilar dan dasar-dasar prinsip kehidupan, selagi ia masih ada; *kedua*, dengan cara menolak kerusakan/kekacauan yang terjadi atau potensial terjadi, dengan upaya antisipatif agar kerusakan itu tidak terjadi.⁵³

Pengkategorian *maqâshid* didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi suatu *mashlahah* bagi kehidupan makhluk. Jika suatu bentuk *mashlahah* memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk *mashlahah* tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil (*lam tajri mashalih al-dunya 'ala istiqamah*). Dampaknya adalah dapat terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambuknya tatanan sosial (*ikhtilal al-nizham fi al-ummah*) dan kemaslahatan di akhirat –yakni keselamatan dari siksa neraka– tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori *maqâshid al-dharûriyyah*.

2) Tujuan kognitif (*ifhamiy*)

Tujuan kognitif (*ifhamiy*) ini dimaksudkan agar para hamba (*mukallafun*) yang berbeda tempat, bahasa dan *uslubnya* memahami al-Qur'an yang

⁵² *Ibid.*, hlm. 8.

⁵³ *Ibid.*

berbahasa Arab sehingga dapat membedakan mana makna asal (*al-dalalah al-ashliyyah*) dan mana yang tambahan (*al-dalalah al-tabi'ah*).⁵⁴

Seorang mukallaf adakalanya ia berstatus awam terhadap *maqâshid al-syarî'ah* (*muqallid*) dan ada yang sudah mencapai level *mujtahid*. Maka bagi mukallaf yang masih awam yang hanya bisa mengikuti saja ketentuan yang ada (karena ia tidak memiliki kemampuan menganalisa dasar *istinbath* hukumnya), maka ia tidak mesti sampai pada derajat mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* secara terperinci, karena untuk mengetahuinya membutuhkan pengetahuan yang mendalam yang hanya mampu dilakukan oleh orang yang mencapai derajat ilmu tertentu.

Sedangkan bagi seorang *mujtahid*, ia mesti berupaya mengistinbathkan hukum berdasarkan *nash-nash* yang ada, prinsip-prinsip (*qawa'id*) *syarî'ah*. Sehingga ia mesti mampu mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* secara terperinci berdasarkan analisa dalil-dalil yang ada.

3) Tujuan pembebanan kewajiban (*taklifiy*)

Tujuan *taklifiy* ini dimaksudkan agar para hamba mampu menerima kewajiban-kewajiban (*taklif*) yang ditetapkan syara' sesuai dengan kelayakan dan kemampuan subyek hukum (*ahliyah al-wujub wa ahliyah al-ada*).⁵⁵

Hukum *taklifiy* tidak akan dapat dilaksanakan oleh seorang *mukallaf* melainkan dengan memahami aspek yang kedua di atas (*ifhamiy*) yaitu memahami dimensi lafaz maupun makna dari teks hukum.

4) Tujuan *dogmatis* (*imtitsaliy*)

⁵⁴ Abu Abu Ishaq Al-Syathibi, Juz II, *Ibid.*, hlm. 66.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

Tujuan dogmatis (*imtitsaliy*) ini diarahkan agar para hamba mematuhi hukum syara', bukan mengikuti hawa nafsunya.⁵⁶ Oleh karena itu, perbuatan (*'amaliyah*) seorang *mukallaf* apabila ia bermaksud melakukannya dengan tujuan bertentangan dengan keinginan Allah swt maka perbuatannya tersebut menjadi *bathil* (rusak).

Pada dasarnya *syari'at* (aturan yang diturunkan oleh Allah swt) itu tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (hamba-Nya) dan menghilangkan segala kemungkinan yang dapat merusak mereka. Dan semua ketentuan itu mesti berpedoman kepada keinginan Allah (*syari'*), dengan tujuan supaya manusia menjadi hambaNya yang taat dan tunduk terhadap segala aturan (perintah dan larangan Allah) bukan memperturukkan keinginan manusia, yang termotifasi oleh keinginan hawa nafsu belaka.⁵⁷

b. Maksud Manusia (*qashd al-mukallaf*)

Yang dimaksud dengan *qashd al-mukallaf* adalah maksud atau tujuan manusia ketika melakukan aktifitasnya di dunia sebagai persiapan kehidupannya di akhirat. Dengannya, maka seseorang dapat membedakan antara perilaku ibadah, muamalah, agama atau hukum. Dengan *maqâshid* ini seorang *mukallaf* dapat membedakan perkara yang berhubungan dengan keyakinan (*i'tiqadiyah*), ucapan (*qauliyyah*) maupun perbuatan (*'amaliyah*), sehingga dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 207.

⁵⁷ Yusuf Hamid Al-'Alim, *Al-Maqâshid Al-'Ammah Li Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Riyad : Al-Dar Al-'Alamiyyah Li Al-Kitab Al-Islamiy, 1415 H/1994 M.), Cet. ke-2, hlm. 106.

⁵⁸ Nuruddin Mukhtar Al-Khadimiy, *op.cit.*, hlm.71.

Adapun tujuan yang kembali kepada mukallaf (*qashd al-mukallaf*) tefokus kepada 12 pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1) Niat si mukallaf
- 2) Kesesuaian tujuan mukallaf dengan tujuan syari'
- 3) Batalnya setiap tujuan yang tidak sejalan dengan syara'
- 4) Titik temu atau titik beda antara maksud dengan perbuatan (amal)
- 5) Sifat perbuatan (amal) yang maslahat untuk pribadi sendiri tetapi bermudharat bagi yang lain
- 6) Amal yang bersifat kepentingan pribadi seseorang (*'ainiyah*) hanya dipenuhi ketika sangat dibutuhkan (*dharurah*)
- 7) Kewajiban kaum muslimin menjamin kemaslahatan seseorang yang menjalankan kepentingan umum
- 8) Pilihan memprioritaskan hak Allah daripada hak hamba
- 9) Mengetahui masalah *hailah* (rekayasa hukum)
- 10) *Hailah* dalam agama dilarang oleh al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'
- 11) Dan *hailah* dapat melenyapkan kemaslahatan yang ditetapkan syara' dan hal ini dilarang atau tidak dibenarkan.⁵⁹

Nilai kemaslahatan yang terkandung dalam *taklif* yang datang dari Allah swt dapat berwujud pada dua bentuk, *pertama*, secara hakiki, yakni manfaat yang secara langsung dapat dirasakan, *kedua*, berupa sebab yang dapat membawa pada manfaat.⁶⁰

⁵⁹ Lihat Al-Syathibiy, Juz I, *op.cit.*, hlm. 323-409.

⁶⁰ Husein Hamid Hasan, *Nazhriyah Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Mesir : Dar Al-Nahdhah Al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 5.

Adapun substansi dari nilai kemaslahatan yang dikehendaki oleh syari'at Islam untuk ditegakkan dan dipelihara itu adalah mencakup perpaduan (secara komprehensif) antara :

- 1) antara *al-mashlahah al-dunyawiyyah* dengan *al-mashlahah al-ukhrawiyyah*
- 2) antara *al-mashlahah al-maddiyyah* dengan *al-mashlahah al-ruhiyyah*
- 3) antara *al-mashlahah al-fardiyyah (al-thabaqah)* dengan *al-mashlahah al-mujtama'iyyah (al-ummah)*
- 4) antara *al-mashlahah al-qaumiyyah al-khashshah* dengan *al-mashlahah al-insaniyyah al-'ammah*
- 5) antara *al-mashlahah al-hadhirah* dengan *al-mashlahah al-mustaqbalah*⁶¹

2. *Maqâshid al-syarî'ah* Ditinjau dari Skala Prioritasnya

Dilihat melalui skala prioritasnya, maka *maqâshid al-syarî'ah* terbagi kepada tiga, yaitu *dharûriyyah*, *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah*. *Al-maqâshid al-dharûriyyah* berada pada peringkat yang pertama, lalu diikuti oleh *al-maqâshid al-hajjiyyah* dan berikutnya *al-maqâshid al-tahsîniyyah*. Oleh karena itu, apabila terjadi kontradiksi antara *maqâshid* yang bersifat *dharûriyyah* dengan *maqâshid* yang bersifat *hâjiyyah* atau *tahsîniyyah* maka *maqâshid* yang bersifat *dharûriyyah* harus didahulukan.

a. *Al-Maqâshid Al-Dharûriyyah* (المقاصد الضرورية)

Al-maqâshid al-dharûriyyah maksudnya adalah :

الضروريات هي المصالح التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا وصيانة مقاصد الشريعة بحيث إذا فقدت لم تخر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد⁶²

⁶¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal Li Dirasah Al-Syarî'ah Al-Islamiyyah*, (Kairo : Maktabah Wahbiyyah, 1421 H./2001 M.), Cet. ke-4, hlm. 62.

Artinya : “Al-dharuriyyat adalah segala nilai kemaslahatan (kebaikan) yang mesti direalisasikan demi kepentingan dunia dan akhirat, dan memelihara tujuan syari’ah yang mana jika bentuk kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil atau terjadi ketimpangan atau kerusakan”.

Perkara *dharûriyyah* ini yang dimaksud adalah bahwa segala apa saja yang harus dilaksanakan demi kehidupan dan kemaslahatan manusia. Sebab apabila sesuatu yang pokok (*dharuriy*) itu hilang maka kehidupannya menjadi tidak teratur, akan terjadi kekacauan (*anarchi*) dan kerusakan akan merajalela.

Maqâshid al-dharuriyah ini wajib hukumnya untuk dipelihara, dilindungi dan dijaga supaya tetap ada (eksis). Sesuatu yang pokok (*dharûriyyah*) ini, meliputi lima hal yang terangkum dalam *al-kulliyât al-khamsah*; memelihara agama (*hifzh al-dîn*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-‘aql*), memelihara keturunan, keluarga dan kehormatan (*hifzh al-nasl wa al-nasab wa al-‘aradh*) dan memelihara harta (*hifzh al-mâl*),⁶³ akan ada penjelasan satu persatu dari *kulliyat* yang lima ini pada bab berikutnya.

⁶² Lihat Al-Syathibiy, *al-Muwafaqat*, Juz I, *ibid.*, hlm. 8. Lihat Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jam’ Li Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tathbiqaha ‘Ala I-Madzahib Al-Rajih*, (Riyad : Maktabah Al-Rusydi, 1420 H./2000 M.), Cet. ke-1, hlm. 386.

⁶³ Semua ulama sepakat bahwa susunan kelima hal pokok (*al-kulliyât al-khamsah*) diatas bersifat *ijtihady* bukan *naqli*, artinya ia disusun berdasarkan *istiqrâ’iy* (induktif). Karenanya dalam merangkai kelima *al-kulliyat* ini (ada juga yang menyebutnya dengan istilah *al-dharuriyyat al-khamsah*). Inilah yang menyebabkan tidak adanya keseragaman di kalangan ulama, tetapi kebanyakan ulama salaf menempatkan agama pada urutan pertama. Dan kebanyakan ulama membatasi pada lima hal seperti halnya menurut Imam Al-Ghazaliy, Al-Amidiy dan Al-Syathibiy, dan yang sependapat dengan mereka, yaitu *hifzh al-dîn*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-‘aql*, *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-mâl*, tanpa menyebutkan *hifzh al-nasb* dan *hifzh al-‘aradh*.

Sementara ulama mutaakhirin, semisal Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi, mengklasifikasikan menjadi lima dengan menggabungkan pada *hifzh al-nasl*, *hifzh al-nasb* dan *hifzh al-‘aradh* sekaligus. Dan penulis memilih alur pengklasifikasian yang digunakan oleh Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi, dengan pertimbangan bahwa yang dimaksud di sini adalah memelihara prinsip-prinsip pokok yang bersifat *dharuriyah* bagi kehidupan manusia. Karena tanpa hal tersebut akan dapat mengacau sistim kehidupan (kemaslahatan manusia), bahkan dapat mengancam terjadinya keburukan dan kerusakan, dan menggabungkan *hifzh al-nasl*, *hifzh al-nasb* dan *hifzh al-‘aradh* sekaligus menurut hemat penulis ada nilai *ashlah* yang terhimpun dalam hal pokok kehidupan manusia.

Maqâshid dharûriyyah yang meliputi pemeliharaan terhadap *al-kulliyyât al-khamsah* di atas, penjagaannya dilakukan dengan dua cara :

- 1) Dengan menegakkan pilar-pilar pendukungnya (*qiyam arkanîha*) dan mengokohkan dasar-dasarnya (*itsbat qawa'idîha*). Cara pertama ini bisa disebut dengan metode konstruktif. Dalam aturan-aturan hukum yang bersifat 'amaliy atau praktis metode ini mewujudkan dalam bentuk kewajiban-kewajiban dan berbagai aktifitas sunnah.
- 2) Dengan menghindarkannya dari ancaman yang dapat merusaknya. Cara kedua ini bisa disebut dengan metode preventif. Hal-hal yang dilarang dalam Islam, baik yang ditetapkan dengan status hukum haram maupun makruh, merupakan ketentuan yang muncul karena metode ini.

Dari sini dapat difahami bahwa persoalan-persoalan yang termasuk dalam kategori *dharûriyyah* adalah asal, sementara kategori *hâjiyyah* sebenarnya merupakan bagian dari upaya pemeliharaan terhadap persoalan-persoalan *dharûriyyah*. Demikian juga halnya dengan persoalan-persoalan *tahsîniyyah* merupakan penyempurna bagi persoalan *hâjiyyah*. Fungsi dari *maqâshid hâjiyyah* adalah penyempurna (*mukammil*) bagi *maqâshid dharûriyyah*. Sesuatu yang menyempurnakan penyempurna maka dapat disebut sebagai penyempurna juga. Sehingga bisa dikatakan bahwa *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah* adalah cabang sementara *dharûriyyah* adalah pokok.

Jika perkara *dharûriyyah* merupakan asal bagi *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah* sehingga karenanya dua kategori yang terakhir berdiri di atas persoalan-persoalan *dharûriyyah*, maka jika *dharûriyyah* mengalami gangguan secara otomatis baik

hâjiyyah maupun *tahsîniyyah* juga akan mengalami hal yang sama. Hal tersebut dikarenakan gangguan pada asal akan berimbas pada cabang. Berbeda kasusnya, jika yang lebih dahulu mendapatkan gangguan adalah cabang maka belum tentu asal, dalam hal ini *dharûniyyah*, mengalami hal gangguan serupa.

Sekalipun *dharûniyyah* sangat menentukan dua kategori *maqâshid* yang lainnya tapi bukan berarti dua kategori tersebut, yakni *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah*, tidak dapat memberikan dampak apapun terhadap *dharûniyyah*.

Gangguan yang terjadi pada *maqâshid hâjiyyah* atau *tahsîniyyah* terkadang bisa saja mengancam *maqâshid dharûniyyah*. Gangguan kecil dan remeh bisa menjadi awal bagi munculnya gangguan yang lebih besar, dan tidak menutup kemungkinan akan mengganggu *maqâshid* yang pokok. Dalam keadaan seperti ini maka gangguan pada penyempurna sejatinya merupakan gangguan juga pada apa yang disempurnakan.

Oleh karena gangguan yang dialami oleh hal yang *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah* terkadang mengakibatkan gangguan juga terhadap hal yang *dharûniyyah*, maka pemeliharaan terhadap dua jenis *maqâshid* tersebut menjadi sesuatu yang wajib pula. Dari sini nampak jelas bahwa yang menjadi fokus utama atau tujuan akhir dalam *maqâshid al-syarî'ah* sebenarnya adalah pemeliharaan terhadap masalah-masalah yang termasuk dalam kategori *dharûniyyah*.

Dengan demikian mesti ada upaya untuk mewujudkannya dan berhati-hati dalam realitas kehidupan. Caranya adalah dengan meninggalkan segala apa saja yang dapat melenyapkan dan menghilangkan eksistensi pokok tersebut. Kelima hal yang bersifat primer (*dharûniyyah*) di atas (*hifzh al-dîn, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql,*

hifzh al-nasl wa al-nasab wa al-'aradh, dan *hifzh al-mâl*) didukung pula oleh hal-hal yang bersifat sekunder (*hâjiyyah*) dan tertier (*tahsîniyyah*).

b. *Al-Maqâshid Al-Hâjiyyah* (المقاصد الحاجية)

Al-maqâshid al-hajiyyat, maksudnya adalah :

الحاجيات هي المصالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقف عليها الحياة واستمرارها بل إن الحياة تستمر بدونها ولكن مع الضيق والحرَج والمشقة⁶⁴

Artinya : “*Al-hajiyyat* adalah segala nilai kemaslahatan, perbuatan atau tingkah laku yang terhambat keberlangsungannya namun tidak sampai pada merusak tatanan kehidupan, hanya saja manusia akan mengalami hambatan, kesulitan dan kesempitan dalam merealisasikannya”.

Maqâshid hâjiyyah merujuk kepada kemaslahatan yang berupa kelapangan dan keluwesan dalam hukum yang ditujukan untuk menghindari kesulitan dan yang dapat memberatkan (*masyaqqah*). Sekalipun *masyaqqah* yang dimaksud tidak sampai menimbulkan kekacauan terhadap kemaslahatan yang lebih penting. Contoh dari mashlahah jenis ini adalah ketentuan *rukhsah* (keringanan) dalam shalat bagi orang yang tengah sakit atau bepergian.

Maksud dari perkara *al-hajiyyah* ini adalah bahwa ia tidak sampai pada kondisi merusak lima pokok penting di atas, akan tetapi merupakan kebutuhan yang dapat mempermudah, meringankan dan menghilangkan kesulitan manusia dalam beraktifitas dan meniti kehidupan.

⁶⁴ Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Ibid.*, hlm. 387.

Contoh dalam kasus *al-hajiyat* adalah diberikannya kelonggaran dalam melaksanakan muamalah seperti praktek transaksi dalam *al-musaqah*, *al-muzara'ah* atau *al-musarakah*. Contoh lain, misalnya dibolehkan meringkas jumlah rakaat shalat (*shalat qashar*) pada keadaan tertentu, boleh melaksanakan sholat sambil duduk pada saat tidak mampu berdiri, dan lain-lain.

Pada prinsip yang bersifat sekunder (*hajiyat*) ini juga mencakup pada lima hal berikut ini, yaitu memelihara agama (*hifzh al-dîn*), nyawa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan, keluarga dan kehormatan (*hifzh al-nasl wa al-nasab wa al-'aradh*), dan harta (*hifzh al-mâl*).

c. *Al-Maqâshid Al-Tahsîniyyah* (المقاصد التحسينية)

Al-maqâshid al-tahsiniyyat, maksudnya adalah :

التحسينيات هي المصالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقف الحياة عليها ولا تفسد ولا تختل فالحياة تتحقق بدون تلك التحسينيات وبدون أي ضيق فهي من قبيل التزيين والتجميل ورعاية أحسن المناهج وأحسن الطرق للحياة فتكون من قبيل استكمال ما يليق⁶⁵

Artinya : “*Al-tahsiniyyat* adalah semua nilai kemaslahatan, perbuatan dan tingkah laku yang tidak sampai pada membahayakan eksistensi dan merusak keberlangsungan kehidupan, hanya saja ia bersifat memperindah, dan merupakan cara dan upaya dalam menjaga kesempurnaan kehidupan”.

Kategori *maqâshid* yang ketiga ini merujuk kepada kemaslahatan suplementer dalam hidup manusia dan berkenaan dengan persoalan etika (*makarim al-akhlaq*) dan estetika (*mahasin al-'adat*). Contoh untuk *maqashid* ini antara lain menutup aurat menggunakan pakaian-pakaian yang berkualitas bagus,

⁶⁵ *Ibid.*

menghilangkan najis, memilih pakaian-pakaian yang paling bagus ketika akan menunaikan shalat, dan lain-lain.

Kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dibangun di atas lima kemaslahatan pokok (*al-kulliyât al-khamsah*) yang sifatnya *dharûriyyah* seperti disebutkan di atas. Jika lima hal tersebut tidak dipelihara maka kemaslahatan yang dibutuhkan manusia, termasuk yang bersifat *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah*, tidak akan terpenuhi.

Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan.

Allah swt telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyyat*, seperti anjuran berhias (memilih pakaian terbaik) ketika hendak ke masjid dan anjuran memperbanyak ibadah sunnah. Firman Allah swt :

Artinya : “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebihani”.

Pada kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) ini juga mencakup pada *al-kulliyât al-khamsah* di atas, sehingga kebutuhan yang tertier (*tahsiniyyat*) ini mesti terealisasi juga pada memelihara agama (*hifzh al-dîn*), nyawa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-*

'aql), keturunan, keluarga dan kehormatan (*hifzh al-nasl wa al-nasab wa al-'aradh*), dan harta (*hifzh al-mâl*).

3. *Muhafazhah Al-kulliyât al-khamsah*

a. Memelihara agama (حفظ الدين)

Secara bahasa (*etimologi*), kata "*al-dîn*" memiliki banyak arti, di antaranya adalah kekuasaan/dominasi (*al-mulk*), pemaksaan (*al-qahr*), kekuasaan (*al-sulthan*), pemuliaan (*al-'iz*), ketaatan (*al-tha'ah*) dan tunduk (*al-khudhu*), dan lain sebagainya.⁶⁶

Sedangkan secara *syara'* (*terminologi*), para ulama memaknai "*al-dîn*" yaitu ketentuan Tuhan yang mengendalikan setiap orang yang mempunyai akal sehat untuk memilih kebaikan yang layak dimanfaatkan dalam keadaan bagaimanapun (di dunia) dan bertujuan untuk kebahagiaan di akhirat.⁶⁷

Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya memelihara agama ini, sebagai bukti ketundukan dan penyerahan diri manusia kepada Allah swt. Agama (*al-dîn*) yang dimaksud bersumber dari wahyu Allah swt yang diturunkan kepada Rasul-Nya, yang mengandung nilai keimanan, tauhid, dan mencakup segala aturan serta hukum-hukum yang disyari'atkan untuk kemaslahatan orang banyak (umum) dan diri sendiri. Firman Allah swt :

⁶⁶ Al-Syairazy, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Mesir : Al-Hai'ah Al-Mishriyyah Al-'Ammah Li Al-Kitab, 1400 H/1980 M), Juz IV, hlm. 221.

⁶⁷ Yusuf Hamid Al-'Alim, *Al-Maqâshid Al-'Ammah Li Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Riyad : Al-Dar Al-'Alamiyyah Li Al-Kitab Al-Islamiy, 1415 H/1994 M), Cet. ke-2, hlm. 205.

Allah swt, seperti upaya menyebarkan kekufuran dan *bid'ah*, kehinaan serta hal-hal yang dapat meremehkan dan mempermainkan kewajiban *taklif*.

Memelihara kemaslahatan agama ini (*al-muhafazhah 'ala mashalih al-din*) ini dapat ditempuh dengan dua cara :

1) Dari aspek keberadaannya (*min janib al-wujud*)

Cara memelihara kemaslahatan agama dari aspek mempertahankan eksistensinya adalah dengan cara melaksanakan segala ketentuannya dan senantiasa memeliharanya dalam kehidupan, baik yang pokok maupun tambahan (*dharuriyah wa mukammalah*). Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting dan utama.

Dalam upaya merealisasikan nilai agama ini maka disyari'atkan kewajiban (*al-'ibadah al-ilzamiyah*), seperti perintah beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, dan segala bentuk perbuatan dan ucapan yang dapat merealisasikan agama dalam jiwa dan kehidupan ini. Termasuk dalam hal ini seperti ibadah zikir yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt, membangun masjid dan madrasah, memuliakan para ulama dan orang shaleh dan lain sebagainya.⁶⁸

2) Dari aspek kemusnahannya (*min janib al-'adam*)

Dari aspek adanya ancaman pada eksistensi agama ini, maka memeliharanya adalah dengan cara mengangkat dan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengahalanginya. Cara ini dapat ditempuh dengan langkah berjihad di jalan Allah swt (*jihad fi sabillillah*), memerangi segala bentuk

⁶⁸ Lihat Yusuf Hamid Al-'Alim, *op.cit.* hlm. 227-246. Lihat juga Nuruddin Bin Mukhtar Al-Khadimi, *op.cit.*, hlm. 81.

Dalam kaitan memelihara jiwa ini (*min janib al-wujud wa min janib al-'adam*) banyak ketentuan yang digariskan oleh Allah swt. Di antaranya adalah memenuhi hak fitrah kemanusiaan seperti hak-hak dalam keluarga, larangan membunuh, ada ketentuan *qishash*, larangan bereking/berpura-pura dan mencemarkan nama baik, memberi sanksi orang yang suka bermusuhan (perang) dan merampok/merampas di jalan (begal).

Demikian juga larangang melenyapkan kehormatan jiwa sebagai manusia, larangan menghilangkan kebahagiaan dan bermain-main dengan mengeksploitasi anggota tubuh tanpa ada alasan yang darurat. Bahkan termasuk juga larangan membakar atau merontokkan tulang dan jasad mayat, sebagaimana diperintahkan juga supaya jiwa senantiasa hidup membutuhkan makanan, minuman dan pengobatan (yang halal lagi baik) apabila menderita sakit.⁷⁰

c. Memelihara akal (حفظ العقل)

Memelihara akal (*hifz al-'aql*) adalah termasuk simpul tujuan *syarī'ah* yang ditegaskan oleh Islam dalam banyak hal dan tempat. Sehingga keberadaan akal dijadikan sebagai syarat penting menerima suatu taklif dalam melaksanakan suatu aturan agama. Oleh karena itulah Allah swt memerintahkan manusia supaya berfikir, menata, meneliti secara cermat serta mengkarakterisasikan segala yang diciptakanNya.

Islam melarang seseorang mabuk-mabukan, mengonsumsi zat yang mengandung alkohol, serta segala yang dapat mempengaruhi akal sehat, seperti

⁷⁰ Lihat Nuruddin Bin Mukhtar Al-Khadimiyy, *op.cit.*, hlm. 81-82. Lihat juga Yusuf Hamid Al-'Alim, *op.cit.* hlm. 271-323.

termasuk juga larangan begadang semalaman dan membuang-buang waktu. Demikian juga halnya larangan membiarkan diri menjadi orang bodoh, tidak mau belajar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan pentingnya menuntut ilmu, menyebarkannya dan pemeratakan hak ilmu. Sebab, membiarkan akal tidak berfungsi karena dibiarkan bodoh, buta huruf, dan lain sebagainya merupakan seburuk-buruk keadaan akal.⁷¹

d. Memelihara keturunan, keluarga dan kehormatan (حفظ النسل والنسب والعرض)

Hifzh al-nasl artinya adalah memelihara sumber kehidupan yang dengan manusia beranak pinak atau bereproduksi dalam upaya mengembangbiakkan keturunan manusia. Dan *hifz al-nasb* artinya adalah melaksanakan sistim reproduksi yang sesuai dengan syari'at Islam, melalui adanya aturan hubungan suami istri yang sah secara *syara'*, bukan dengan cara reproduksi yang kacau (*anarchi*) seperti perilaku hewan, yang tidak jelas asal usul keturunannya. Sedangkan makna *hifz al-'aradh* ialah memelihara fitrah kehormatan, kesucian dan kemuliaan sebagai manusia.

Memelihara ketiga hal pokok yakni keturunan, keluarga dan kehormatan ini (*hifzh al-nasl wa al-nasab wa al-'aradh*) termasuk tujuan *syara'* yang makro (*al-maqâshid al-syar'iy al-kulliy*) yang ditegaskan oleh Islam dalam ketentuan *nash* dan hukum-hukumnya.

⁷¹ Nuruddin Bin Mukhtar Al-Khadimiy, *op.cit.*, hlm. 82-83.

Di antara penetapan dan penegasan hukum yang berkaitan dengan pemeliharaan keturunan, keluarga dan kehormatan ini adalah :

- 1) Anjuran dan motifasi untuk menikah dan meringankan biayanya, dengan tujuan terjaga dari cela dan 'aib, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi saw :


عن عائشة أن رسول الله (ص) قال : إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ⁷²

- 2) Melarang dan menutup cela dan peluang terjadinya zina, seperti berkhawat (berduaan antara dua orang yang berlainan jenis kemalin), memamerkan keindahan tubuh (*al-tabarruj*), memandang dengan syahwat, saling bersentuhan atau menempelkan sebagian anggota tubuh kepada yang lainnya.
- 3) Memberikan sanksi kepada pelaku menyimpang, yang mempraktekkan perzinahan, homoseksual dan lesbian.
- 4) Perintah berpegang teguh terhadap akhlak dan etika yang mulia lagi terhormat serta larangan melakukan perbuatan buruk, keji dan munkar.
- 5) Larangan mengangkat anak, karena manusia itu wajib memanggil dengan sebutan orang tua kandungnya (*nasabiy*) bukan orang tua angkat (*mutabanniy*).⁷³ Sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur'an :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَاذْكُرُوا الْوَصِيَّةَ الَّتِي تُؤْتُونَ أَوْلَادَكُمْ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آبَائِهِمْ وَطَوَلَّتْ أَعْيُنُكُمْ أُولَٰئِكَ ذُكِّرُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ لِلزَّكَوٰةِ كِتَابٌ مُّحْكَمٌ ۖ لَّيْسَ فِيهَا سُنَّ وَلَا مَنَاسِكُ ۚ وَلَكِنْ حَقٌّ مَّقْضُوعٌ لِّتُزَكَّىٰ بِهِ أَمْوَالُكُمْ لِتَتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ﴾

⁷² Musnad Al-Imam Ahmad bin Handal, pada Kitab hadits Saiyyidah 'Aisyah ra.

⁷³ Nuruddin Bin Mukhtar Al-Khadimiyy, *op.cit.*, hlm. 83-84.



4) Memberi sanksi *had* dan *ta'zir* terhadap orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti *had al-sariq* (sanksi mencuri) dengan potong tangan, demikian juga bagi orang yang suka bermusuhan (perang) dan merampok/merampas di jalan (begal), sebagaimana Allah swt sebutkan dalam al-Qur'an :

[illegible]

5) Mencegah dan menjamin agar tidak terjadi perbuatan royal.

- 6) Melarang menggelapkan dan menimbun harta, sehingga tidak terjadi kemacetan dalam peredaran harta, pemanfaatan dan keuntungannya.⁷⁴

Nilai kemaslahatan yang dimaksud dapat dilihat dari enam sudut pandang. Pertama, *maqâshid al-khalq* (*takwiniy*); kedua, *maqâshid al-syarî'ah al-'aliyah*; ketiga, *maqâshid al-syariah al-kulliyah*; keempat, *maqâshid al-syarî'ah al-khashshah*; kelima, *maqâshid al-syarî'ah al-juziyyah*; dan keenam, *maqâshid al-mukallafin*.⁷⁵

Jadi, hakikat dari masing-masing *maqâshid* (*dharûriyyah*, *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah*) serta relasi antara satu dengan yang lainnya, maka dapat diringkas dalam lima poin berikut :

- 1) *Maqâshid dharûriyyah* adalah pokok (*ashl*) sedangkan *maqâshid hâjiyyah* dan *tahsîniyyah* adalah cabang (*far'*).
- 2) Gangguan pada *maqâshid dharûriyyah* akan menyebabkan pula gangguan pada *maqâshid* yang lainnya.
- 3) Gangguan yang terjadi pada *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah* belum tentu mengancam *maqâshid dharûriyyah*.
- 4) Terkadang gangguan yang terjadi pada *maqâshid hâjiyyah* dan *tahsîniyyah* dapat menyebabkan munculnya gangguan pada *maqâshid dharûriyyah*.
- 5) Wajib memelihara *maqâshid hâjiyyah* dan *tahsîniyyah* (*far'*) dalam rangka memberikan jaminan bagi terwujudnya *maqâshid dharûriyyah* (*ashl*).

⁷⁴ Nuruddin Bin Mukhtar Al-Khadimi, *op.cit.*, hlm. 84-85.

⁷⁵ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Tafîl Maqâshid al-syarî'ah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1424 H./2003 M), hlm. 106-138.

E. Metode dalam Mengungkapkan *Maqâshid al-syarî'ah*

Para ulama *ushul* memiliki cara berbeda-beda untuk mengetahui *maqâshid*. Dalam hal ini, penulis mengutip pemaparan Al-Yubiy dalam mengetahui *maqashdi al-syarî'ah* ada lima langkah :

1. Dengan cara *istiqrâ'iy*
2. Mengetahui 'ilat (alasan hukum) perintah dan larangan
3. Menganalisa *lafazh* perintah dan larangan
4. Mengungkapkan kesimpulan dari pengetahuan *maqâshid*⁷⁶

Imam al-Syathibiy. Ia memaparkan teorinya sebagai berikut : Untuk mengetahui *maqâshid*, maka terlebih dahulu harus diketahui 'illat hukum tersebut. Setelah 'illatnya diketahui maka dengan mudah akan diketahui pula hikmahnya dan setelah diketahui hikmahnya maka tidaklah sulit untuk mengetahui *maqâshid*nya.

Contohnya : kebolehan melakukan *shalat qashar* ditetapkan dalam kitabullah dan al-Sunnah. Safar atau bepergian adalah 'illat hukumnya, sedangkan menghindari *masyaqqat* (kesulitan) adalah hikmah dibolehkannya melakukan *qashar*.

Dari contoh di atas diketahui bahwa 'illatnya adalah safar (perjalanan) dan dalam safar kemungkinan besar adanya *masyaqqat*. Jadi hikmahnya untuk menghindari kesulitan (*masyaqqat*) telah dijelaskan di muka bahwa tujuan umum disyari'atkannya hukum dalam Islam adalah untuk kemashlahatan manusia. Mashlahat tersebut bisa berupa mendatangkan manfaat atau menghindari mudharat (kesulitan). Dan jika dikaitkan dengan lima hal yang *dharunyah*, maka dengan mudah kita dapat menjawab bahwa hal itu adalah untuk memelihara agama.

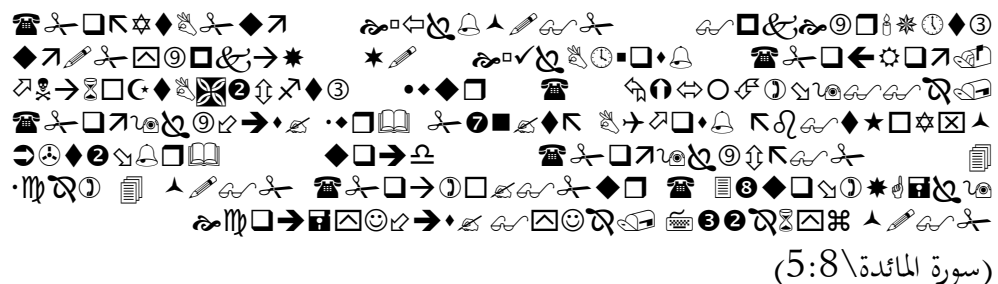
⁷⁶ Al-Yubiy, *op.cit.*, hlm. 125-175.

Dalam bukunya Ushul Fiqh, Abu Zahra berpendapat bahwa hukum Islam ditunjukkan kepada tiga perkara, yakni :⁷⁷

1. *Tahdzib al-fard*, yaitu mensucikan jiwa setiap muslim agar dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi diri, masyarakat dan lingkungannya. Hal ini ditempuh melalui berbagai macam ibadah yang disyari'atkan, yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial, sehingga setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi lingkungannya.

Contohnya : disyari'atkannya zakat adalah untuk membersihkan diri dan harta orang lain yang mengeluarkannya serta untuk memperkuat persaudaraan antara si kaya dan si miskin.

2. *lqamah al-'adli fi al-jama'ah al-islamiyah*, yaitu menegakkan keadilan dalam bermasyarakat Islam, adil baik menyangkut urusan sesama kaum muslimin maupun dengan pihak lain (non muslim) sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan *syari'ah* Islam. Firman Allah



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan kerna Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (t.tp. : Dar Al-Fikr Al-'Arabiyy, t.t), hlm. 364-366.

3. *Al-mashlahah*, yaitu untuk memelihara kemashlahatan dan merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai dalam setiap penetapan hukum Islam. Tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan dalam islam melainkan di situ terkandung mashlahah yang hakiki, walaupun kadang *mashlahah* itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.

F. Status *Maqâshid al-syarî'ah* dalam Berhujjah

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *maqasid al-syarî'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan adalah untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahat umat manusia di dunia dan di akhirat. Karena, ketentuan yang ditetapkan oleh Syâri' erat sekali kaitannya dengan perlindungan terhadap tujuan-tujuan syari'at (*maqâshid al-syarî'ah*), dan tujuan syari'at yang dimaksud tidak lain adalah pemeliharaan terhadap kemaslahatan makhluk secara keseluruhan.

Konsep *maqasid al-syarî'ah* telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer yang menyatakan bahwa hukum adalah mashlahah itu sendiri :

فَحَيْثُمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَشَرِّعُ اللَّهُ⁷⁸

Artinya : "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah".

⁷⁸ Ramadhan al-Buthi, *Dawabit al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islamiyah*, (Beirut : Mu'assasah ar-Risalah, 1965), hlm. 12.

Hampir semua ulama *Ushul* menyepakati kehujjahan *maqâshid syarî'ah* dan mereka menggunakannya dalam berijtihad sesuai dengan metode ijtihadnya masing-masing. Dalam konteks ini seseorang dikatakan belum dapat atau mampu menetapkan hukum Islam sebelum ia mampu memahami benar *maqâshid al-syarî'ah*.

Awal mula diturunkannya al-Qur'an merupakan sebuah respon terhadap suatu masyarakat saat itu yang kemudian dalam perkembangannya menjadi luas. Seiring dengan lajunya perkembangan Islam ke berbagai penjuru, maka muncullah persoalan-persoalan baru yang saat itu belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw, padahal *al-Qur'an* sendiri hanya memuat sebagian hukum yang terinci. Sementara *al-Sunnah* hanya sebatas pada persoalan-persoalan yang berkembang pada masa Rasulullah saw. Maka dari itu dalam menyelesaikan persoalan baru dibutuhkanlah konsep *ijtihad*.

Hingga pada akhirnya konsep *ijtihad* muncul sebagai produk pemikiran yang baru guna menjawab perkembangan zaman. Salah satunya adalah kajian tentang fiqh, selain dari ilmu kalam, ilmu tasawuf dan falsafah (*al-hikmah*). Dari segi disiplin ilmu keislaman tradisional yang mapan, salah satunya adalah ilmu fiqh yang paling kuat mendominasi pemahaman orang-orang muslim akan agama mereka. Sehingga paling tidak banyak membentuk bagian terpenting cara berfikir mereka. Kenyataan seperti ini dapat dikembalikan kepada berbagai proses sejarah pertumbuhan masyarakat muslim masa lalu, juga kepada sebagai dari inti semangat ajaran agama Islam.

Paling tidak, pertumbuhan dan perkembangan fiqh menunjukkan pada dinamika pemikiran keagamaan yang komprehensif. *Mashlahah* dalam bingkai pengertian yang membatasinya bukanlah dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil *syara'* sebagaimana Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Dengan demikian tidaklah mungkin menentukan hukum

parsial (*juz'iy/far'iy*) dengan berdasar kemashlahatan saja. Sesungguhnya *mashlahah* adalah makna yang universal yang mencakup keseluruhan bagian-bagian hukum *far'iy* yang diambil dari dalil-dalil atau dasar *syar'i'ah*. Kesendirian *mashlahah* sebagai dalil hukum, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna *mashlahah* dalam masalah-masalah *juz'i*.

Maqasid al-syariah adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan al-Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak terdapat secara jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Sehingga dapat dikatakan bahwa *maqasid al-syari'ah* merupakan dasar bagi penetapan hukum melalui beberapa metode pengambilan hukum.

BAB IV

TINJAUAN *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH*

TERHADAP PENGOLAHAN HARTA ZAKAT SECARA PRODUKTIF

A. *Maqâshid Al-Syarî'ah* pada Zakat

Keberadaan al-Qur'an adalah kebenaran abadi, namun penafsirannya tidak abadi, karena penafsiran itu selalu bersifat relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab fiqih merupakan bukti positif kerelatifan tafsir.

Fiqh yang kita kenal sekarang merupakan rekayasa (nalar) cerdas pemikiran ulama abad pertengahan yang isinya mencakup empat komponen dasar, yaitu masalah *ubûdiyyah* (membahas hubungan transendental manusia dengan Tuhan), *mu'âmalah* (membahas hubungan manusia dengan sesamanya, makhluk lain dan alam semesta), *munâkahah* (membahas hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan keluarga), dan *jinâyah* (membahas berbagai masalah pidana).

Hukum Islam ada yang diperoleh melalui ketentuan *nash* al-Qur'an atau Sunnah dan ada pula yang diperoleh melalui *ijtihâd*. *Nash* al-Qur'an dan Sunnah dalam menunjuk ketentuan hukum ada yang bersifat rinci (*tafshîliyy*) dan garis besar (*mujmal*), ada yang pasti (*qath'iy*) dan ada yang tidak pasti (*zhanniy*).¹

¹ Dalam bentuk konsep lain, ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok ajaran. *Pertama*, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadits *mutawatir* yang penunjukannya telah jelas (*qath'iy al-dalalah*). *Kedua*, ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak permanen, dapat berubah dan diubah. Termasuk kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad. Lihat Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ijtihad Fi Al-syarî'ah Al-Islamiyah Ma'a Nazhariyah Fi Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, (Kuwait : dar Al-Qalam, 1985), hlm. 205.

Terhadap *nash* hukum yang *qath'iy* tidak terdapat perbedaan pemahaman di kalangan *fuqaha'*, sedangkan terhadap *nash* hukum yang *zhanniy* terdapat perbedaan pemahaman di kalangan *fuqaha'*. *Nash* hukum yang menunjuk ketentuan hukum secara rinci bernilai *qath'iy*, sedangkan *nash* hukum yang menunjukkan ketentuan hukum secara garis besar berupa kaidah-kaidah pokok, memungkinkan penggunaan akal untuk melakukan rincian (*zhanniy*).

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum, sehingga mampu menjawab segala persoalan hukum kontemporer yang kasusnya secara eksplisit tidak diatur dalam al-Qur'an dan hadits. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqâshid al-syarî'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Tentunya yang dimaksud dengan persoalan hukum di sini adalah hukum-hukum yang menyangkut bidang *mu'amalah* yang *ma'qûlah al-ma'na*, bukan bidang yang menyangkut akidah dan ibadah (*ghair ma'qûlah al-ma'na*).

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer terlebih dahulu perlu diteliti hakikat dari persoalan tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya.

Menggunakan akal untuk melakukan rincian terhadap *nash-nash* hukum yang menunjuk ketentuan hukum secara garis besar menjadi ruang gerak ijtihad (*majâl li al-ijtihâd*). Ruang gerak ijtihad akan semakin luas dalam menentukan hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam *nash*. Hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam *nash* dan harus

ditetapkan dengan jalan ijtihad harus memperhatikan jiwa dan tujuan ketentuan *nash* khususnya, dan jiwa serta tujuan ajaran Islam pada umumnya yang sering disebut *rûh* dan *maqâshid al-syarî'ah*.

Sebenarnya, segala sesuatu yang dikehendaki *syari'* (mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan) tidaklah mungkin tercapai kecuali melalui *washîlah* atau mediator yang membawa seseorang kepada apa yang dimaksud oleh *syari'* tersebut. Oleh sebab itu seseorang dituntut mengerjakan *washîlah* atau mediator apabila tujuan perbuatan itu baik dan meninggalkan *washîlah* atau mediator itu apabila tujuan perbuatan itu tidak baik. Oleh karena itu maka *washîlah* atau mediator untuk sampai kepada suatu tujuan yang baik maka hal itu dibenarkan, begitu juga sebaliknya, *washîlah* atau mediator untuk sampai kepada suatu tujuan yang buruk maka hal itu dilarang.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan yang membawa seseorang kepada kemaslahatan, maka orang tersebut dituntut untuk mengerjakannya. Begitu juga dengan tindakan yang membawa seseorang kepada kerusakan, maka seseorang dilarang mengerjakannya. Logikanya adalah tidak mungkin agama mengharamkan sesuatu perbuatan, tetapi seseorang dibolehkan melakukan *washîlah* atau menempuh jalan yang membawa kepada perbuatan yang diharamkan. Begitu pula sebaliknya, tidak logis kalau agama membolehkan sesuatu perbuatan, tetapi seseorang tidak dibenarkan mengerjakan *washîlah* atau melewati jalan yang membawa seseorang kepada perbuatan yang dibolehkan.

Pada sisi lain, agama mencegah kerusakan, tidak membatasi larangannya pada perbuatan atau tindakan yang dengan sendirinya dapat membawa seseorang pada kerusakan itu, bahkan melarang segala *wasilah* yang mungkin membawa seseorang

kepada kerusakan tersebut secara langsung. Oleh karena itu agama menutup atau menyumbat segala *washīlah* yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Pada hakikatnya menutup segala *washīlah* atau mediator tersebut sesuai dengan *maqâshid al-syarī'ah* Islam yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahat tersebut bukan atas pemikiran manusia belaka, tetapi atas prinsip-prinsip ajaran Islam untuk kebaikan di dunia dan di akhirat sekaligus.

Prinsip-prinsip yang harus dijaga untuk pencapaian kemaslahatan dunia dan akhirat itu adalah kemaslahatan pada agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), psikologi (*al-'aql*), keturunan, keluarga dan kehormatan (*al-nasl wa la-nasb wa al-'ardh*) serta ekonomi (*al-mal*). Kelima prinsip pokok ini wajib dipelihara dan untuk itu pulalah agama menetapkan *hukum taklifiy*; perintah kewajiban dan keharusan (*al-amr li al-wujub wa al-sunnah*), larangan keharaman dan kejelekan (*al-nahi li al-haram wa al-kirahah*) dan kebolehan (*al-mubah*).

Memahami konsep *maqâshid*, yaitu tujuan disyariatkannya suatu ibadah dalam Islam, merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, agar dapat memahami hakekat ibadah dengan benar.

Paling tidak, berdasarkan ayat dan hadits yang ada, *maqâshid al-syarī'ah* pada zakat dapat dibagi ke dalam tiga dimensi. Yaitu, dimensi spiritual personal, sosial, dan ekonomi.

1. Dimensi akidah (إعتقادية)

Secara *ijma'*, seluruh ulama menyatakan sepakat bahwa ibadah zakat hukumnya wajib. Bahkan para sahabat ra, sepakat menyatakan bahwa orang yang

Artinya : “Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agamamu yang lurus (benar)”.

Apabila dikaitkan dengan praktek sahabat, diketahui bahwa mereka memerangi orang yang enggan membayar zakat, dan tidak menginginkan ada di antara umat membeda-bedakan suatu aturan agama, atau mencoba untuk membangkang dari syari’at Islam yang telah mereka akui sebelumnya, karena hal itu dapat mengakibatkan seseorang menjadi murtad, dan murtad adalah perbuatan dosa besar kepada Allah swt.

Ibnu Qudamah, mengutip dalam kitab *Al-Mughniy ‘Ala Mukhtashar Al-Kharqiy* suatu riwayat dari Bukhari yang isnadnya berasal dari Abu Hurairah ra sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا تَوَفَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ , وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ , فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ , وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا . قَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ صَدْرُ أَبِي بَكْرٍ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ³

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, *tatkala Nabi saw wafat, kemudia kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar ra. Ketika itu banyak orang kembali kepada kekafirannya. Maka berkata Umar ra kepada Abu Bakar ra: bagaimana engkau memerangi mereka? Karena Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan Laa Ilaaha Illallaah (tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah), apabila mereka mengucapkannya, maka harta jiwa terlindungi, kecuali atas dasar haq dan perhitungannya kepada Allah Ta'la. Lalu Abu Bakar ra berkata : "Demi Allah, Pasti akan aku perang orang yang membedaakan antara perintah shalat dan zakat, karena zakat itu adalah hak kehartaabendaan. Dan demi Allah, jika mereka menolak memberikan zakat padahal dulu di masa Rasul saw mereka menyerahkannya kepada Rasulullah saw, maka mereka layak diperangi. Dan saya akan perang siapa saja yang enggan membayarnya."* Kemudian Umar ra berkata; “Maka demi Allah, "Sungguh Allah telah menerangkan dada Abu

³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy ‘Ala Mukhtashar Al-Kharqiy*, op.cit., Juz II, hlm. 359. Lihat Musa Syahin Lasyin, *Al-Manhal Al-Hadits Fi Syarh Al-Hadits*, (Kairo : Dar Al-Syuruq, 1424 H./2003 M.), Cet. ke-3, Juz II, hlm. 107.

Bakar ra. Dan saya melihat yang demikian (memerangi orang yang enggan menunaikan zakat) itulah yang benar”.

2. Dimensi spiritual personal (عبودية)

Ditinjau dari dimensi spritual personal (عبودية), maka *maqâshid al-syarî'ah*

pada zakat merupakan :

- a. Sebagai perwujudan penghambaan diri dan keimanan kepada Allah SWT sekaligus sebagai perantara (*washîlah*) untuk pembersihan harta dan penyucian jiwa dari segala penyakit ruhani, seperti bakhil, tamak dan tidak peduli terhadap sesama.

Pada prinsipnya juga, bahwa dari harta yang bersumber dari Yang Maha Suci kemudian hasilnya menjadi suci bersih (dinikmati dengan *keridhaan* Allah swt), setelah itu dibersihkan dengan cara yang suci pula. Dengan demikian yang akan menerima harta itu nanti juga akan menjadi suci dan bersih pada dirinya dan hasilnya, dan secara berkelanjutan ia akan menjadi bersih dan berkah.

Tujuan inilah yang diisyaratkan dan dikehendaki oleh Allah swt :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة التوبة : 103\9)

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

- b. Syari'at zakat juga akan menumbuhkembangkan etika bekerja dan berusaha yang benar, yang berorientasi pada pemenuhan rezeki yang halal.

Rasulullah saw menegaskan dalam sebuah haditsnya bahwa Allah swt tidak akan menerima zakat, infak dan sedekah dari harta yang didapatkan dengan jalan tipu daya. Sehingga, mendorong orang untuk berzakat sesungguhnya sama dengan mendorong gerakan anti korupsi, kolusi, nepotisme dan manipulasi. Karena dengan zakat itu orang akan termotivasi untuk hanya mencari harta yang halal dengan cara yang diridhai oleh Allah swt.

Dengan berzakat juga, produktivitas individual pun akan meningkat, karena zakat mendorong seseorang untuk memiliki etos kerja yang tinggi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بَعْدَ تَمَرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرِي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ تَابِعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ وَقَالَ وَرَقَاءُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁴

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, berkata,: Rasulullah saw telah bersabda: “Barangsiapa yang bersedekah dengan sebutir kuma hasil dari usahanya sendiri yang baik (halal), sedangkan Allah swt tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah swt akan menerimanya dengan tangan kananNya lalu mengasuhnya untuk pemiliknya sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar seperti gunung”. Hadits ini juga dikuatkan oleh Sulaiman dari Ibnu Dinar dan berkata, Warqa’ dari Ibnu Dinar dari Sa’id bin Yasar dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw. Dan diriwayatkan juga oleh Muslim bin Abu Maryam dan Zaid bin Aslam dan Suhail dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw”.

⁴ Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *op.cit.*, hlm. 435-436.

kemusyrikan dan kafir kepada Allah swt, sebagaimana Allah swt berfirman :

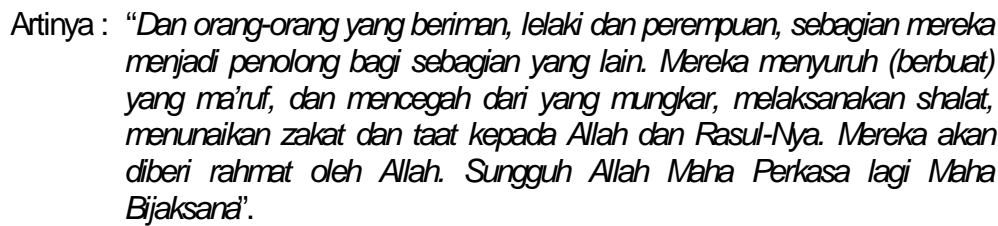
(7-6\41:

Artinya : “Katakanlah (Muhammad): “Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepadaNya dan mohonlah ampun kepadaNya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka inkar terhadap kehidupan akhirat”.

Padahal, jika dosa syirik ini terbawa sampai ajal (mati), ia tidak akan diampuni oleh Allah swt. Selain itu, merajalelanya syirik juga berdampak pada ketidakberkahan dan kesemrawutan pengolahan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

a. Zakat adalah termasuk salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam.

Pada dimensi ini, zakat berorientasi pada upaya untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Solidaritas dan persaudaraan akan tumbuh dengan baik, akan muncul perasaan saling mencintai dan senasib sepenanggungan. Keamanan dan ketenteraman sosial akan tercipta di tengah-tengah masyarakat, sehingga mampu mereduksi potensi konflik. Sebagaimana Allah swt berfirman :



Sifat-sifat buruk ini, apabila dibiarkan akan dapat menghancurkan keseimbangan pokok (*al-dharuriyyat al-khamsah*; agama, jiwa, akal, keturunan/keluarga/kehormatan dan harta benda) kemanusiaan sebagiannya atau sekaligus.

Pada dimensi ekonomi ini mestilah tercermin pada dua konsep utama, yaitu :

Islam sangat menentang akumulasi harta kekayaan oleh kelompok tertentu masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an :



Artinya : “... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilaranya bagimu maka tinggalkanlah.

Berfariasinya perolehan rizki dan keseimbangan dalam kesempatan mendapatkan peluang adalah citra dari keadilan, karena adil itu bukan berarti sama rata. Peluang untuk menyamaratakan sesuatu hanya berlaku apabila dua hal tersebut memiliki kesamaan.

Allah swt juga memaksudkan bahwa segala apa yang dilakukan oleh manusia sebagai wujud ketaatan dan mengharapakan *ridha*Nya, akan diberikan balasan pahala yang berlipat ganda, sebagai motivasi bahwa apa yang diberikan (zakat yang diberikan) itu bukanlah hal yang sia-sia, sebagaimana dinyatakan dalam firmanNya :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ لَكُمْ شَيْئًا سَوَّاهُ وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ لَكُمْ شَيْئًا سَوَّاهُ﴾
(سورة الروم: 39\30) ﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ لَكُمْ شَيْئًا سَوَّاهُ وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ لَكُمْ شَيْئًا سَوَّاهُ﴾

Artinya : “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

Di antaranya juga bahwa harta yang diberikan untuk kepentingan Allah swt, maka ada balasan pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. Ayat lain Allah swt :

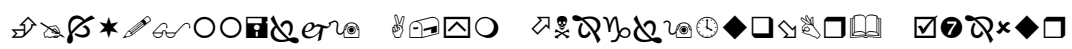
﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ لَكُمْ شَيْئًا سَوَّاهُ وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ لَكُمْ شَيْئًا سَوَّاهُ﴾
﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ لَكُمْ شَيْئًا سَوَّاهُ وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ لَكُمْ شَيْئًا سَوَّاهُ﴾


 (سورة البقرة \ 2 : 261)

Artinya : “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, seperti yang menumbuhkan tagkai pada setiap tangkai ada seratus bulir. Allah melipatgandakan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui”.

b. mekanisme *sharing* dalam perekonomian, yang mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan golongan fakir dan miskin.

Golongan ini memiliki dua tipologi, pertama, *al-sa'il* yaitu orang yang terang-terangan meminta dan mengemukakan kekurangannya. Kedua, *al-mahrum*, yaitu orang yang enggan meminta atau yang menjaga harga dirinya dengan tidak mau meminta-minta, padahal sebenarnya ia sangat membutuhkannya, sebagaimana yang dinyatakan Allah swt dalam firmanNya :


 (سورة الذاريات : 19\51)

Artinya : “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.

Orientasinya adalah, untuk jangka pendek, kebutuhan primer mustahik dapat terpenuhi. Sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka harus ditingkatkan, sehingga menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Namun kondisi di atas hanya akan terjadi manakala zakat dikelola oleh pemerintah atau institusi amil yang amanah dan profesional. Zakat pun akan menumbuhkembangkan etika

bekerja dan berusaha yang benar, yang berorientasi pada pemenuhan rezeki yang halal.

Zakat, walaupun secara lahiriyah merupakan aturan pada bidang materi (*al-mal*), akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari sisi eksistensi akidah dan ibadah (*al-din*) sebagai fitrah kemanusiaan, sumber kehidupan (*al-nafs*), stabilitas psikologi (*al-'aql*), eksistensi keturunan, keluarga dan kehormatan (*al-nasl wa al-nasb wa al-'aradh*).

B. Prinsip-prinsip Pengolahan Harta Zakat

Ibadah zakat merupakan *syari'at* yang diturunkan oleh Allah swt bersifat *ta'abbudiyy*, artinya pelaksanaannya telah dijelaskan secara khusus syarat dan batasannya oleh Allah swt. Nilai ibadah yang terkandung dalam zakat ini membawa misi memperbaiki dan memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah (*habl min Allah*), karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa. Selain itu zakat juga mampu memperbaiki tata hubungan horizontal antara sesama manusia (*habl min al-nas*) yang pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup manusia.

Berdasarkan *nash-nash* yang ada (al-Qur'an, Sunnah, maupun praktek para sahabat dan ulama mujtahid) apabila dianalisa, maka dapat diklasifikasikan beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam mengelola harta zakat :

1. Standar *nishab* dan masa panen (حد النصاب والحصاد)

*Nishab*⁵ zakat adalah suatu ukuran yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokok (*al-hajah al-dharuriyyah*) yang tidak sampai pada ukuran seseorang itu menjadi kaya dalam ukuran yang berlebihan. Kebutuhan pokok yang mesti dipenuhi adalah seperti kebutuhan asupan gizi (makan dan minum), pakaian (menutup aurat), alat/sarana transportasi dan alat kerja untuk mencari nafkah.⁶

Ukuran *nishab* akan membatasi seseorang apakah ia tergolong kaya atau fakir pada batas minimal. Sehingga harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak ada kewajiban berzakat baginya karena pemiliknya tidak tergolong orang kaya. Firman Allah swt :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ يُغْنِي عَنْهُمْ كِتَابُ اللَّهِ وَكَرَّمٌ رَءِيفٌ ۖ أَوْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْوَسْطِيَّةِ ۖ قُلْ هِيَ الْفَيْءُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَنَىٰ ۚ﴾
 (سورة البقرة: 219\2)

Artinya : “Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah ; kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu agar kamu memikirkan’.

Makna “﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْوَسْطِيَّةِ ۖ قُلْ هِيَ الْفَيْءُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَنَىٰ ۚ﴾” pada ayat ini adalah keharusan memberikan harta itu ketika nilai harta yang dimiliki melebihi dari kebutuhan pokok pemiliknya. Sehingga ketika ia memberikan mengeluarkan sebagian hartanya itu, tidak mengakibatkan ia berkekurangan (عالة). Alasan ini sesuai dengan pendapat di

⁵ Secara bahasa “نصاب” bermakna asal/sumber “أصل” atau pegangan/pedoman “مرجع”.

⁶ Al-Kasaniy, *Badai’ Al-Shanai’ Fi Tartib Al-Syarai’*, Juz II, hlm. 11. Lihat *Al-Qamus Al-Islamiy Bab Zakat*, Juz IV, hlm. 69.

antaranya al-Hasan, Qatadah, 'Atha', al-Suddiy, al-Qurzhay, Muhammad bin Ka'ab, Ibn Abi Laila dan lain-lain.⁷

Pendapat ini juga didukung oleh hadits Nabi yang menyatakan bahwa beban kewajiban membayar zakat ini adalah bagi orang yang kaya, yang telah memiliki harta melebihi kebutuhan pokok seseorang (*al-hajah al-dharuriyyah*) :

أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ⁸

Artinya : "Telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Al-Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra dari Nabi saw berkata : "Shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu".

Al-Kasaniy mengungkapkan dalam kitabnya bahwa "tidak ada kewajiban zakat kecuali kepada orang yang kaya, dan nilai kekayaan seseorang tidak akan tercapai melainkan setelah melebihi kebutuhan pokoknya (الفاصل عن الحاجة الأصلية), dan harta yang tidak mencukupi *nishab* lagi tidak melebihi kebutuhan pokoknya, maka ia belum tergolong orang kaya.⁹

Ketentuan *nishab* ini masing-masing jenis harta ada yang ditunaikan zakatnya dengan ukuran masa *haul* (mengalami ulang tahun) dan ada yang ditentukan berdasarkan masa panen (*hashad*). Salah satu contoh, misalnya pada harta yang disyaratkan mengalami masa *haul*, adalah seperti dinyatakan dalam hadits berikut ini :

عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم... قال: "فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك

⁷ Al-Qurthubiy, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz III, hlm. 447.

⁸ Imam Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*, Juz I, hlm. 441.

⁹ Al-Kasaniy, *op.cit.*, Juz II, hlm. 15.

عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينارٍ فما زاد فبحساب ذلك" ... "وليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول"¹⁰

Artinya : "Dari Ali ra, dari Nabi saw,... Belia bersabda : Apabila kamu memiliki dua ratus dirham, dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib zakat atasnya sebanyak lima dirham. Kamu tidak ada kewajiban membayar zakat emas sehingga mencapai nilai dua puluh dinar dan telah berlalu masa satu tahun, dan kadar zakatnya adalah sebesar setengah dinar. Dan jika lebih maka hitunglah berdasarkan kelebihanannya.... Dan tidak pula ada pada harta kewajiban zakat sehingga berlalu masa satu tahun".

2. Bersih, berkembang dan berdayaguna (الطهارة والنماء والربح)

Syarī'ah mālīyah disebut dengan istilah zakat (الزكاة), sebagai mana telah penulis jelaskan pada Bab II tesis ini,¹¹ karena di antara maknanya adalah bahwa harta yang dizakatkan itu hanya dapat diambil dari sumber yang bersih (الطهارة) untuk dibersihkan (dikeluarkan zakatnya). Tujuan yang hendak dicapai adalah agar harta zakat dan sisa harta yang dizakatkan itu dapat mengalami pertumbuhan, perkembangan dan pertambahan nilai (النماء والربح والزيادة) bagi *mustahiq* dan *muzakkiy*, baik karena didayagunakan oleh usaha manusia maupun berkembang dengan sendirinya (secara alami).

Apabila dikatakan bahwa harta yang dizakatkan itu harus harta yang produktif (الأموال النامية), bisa dikembangkan atau berpotensi untuk dikembangkan

¹⁰ Sunan Abu Daud, Juz II, hlm. 157-158.

¹¹ Lihat Bab II, pada pembahasan *Pengertian Zakat secara Bahasa*, hlm. 29-30.

(diproduktifitaskan), maka berarti, bahwa perkembangan harta ini diharapkan dapat berlaku bagi *muzakkiy* dan *mustahiq* sekaligus.

Dengan demikian, berarti zakat tidak dapat diambil dari jenis harta atau barang-barang konsumtif yang tidak bisa bertahan lama dan tidak berpotensi untuk diproduktifitaskan. Oleh karena itu maka makna zakat secara bahasa disebut tumbuh, berkembang dan bertambah, karena ia berkaitan dengan pengembangan harta baik dengan dikelola oleh manusia maupun berkembang dengan sendirinya, baik bermanfaat bagi *muzakkiy* maupun bermanfaat bagi *mustahiqnya*.

Harta yang berkembang karena didayagunakan oleh usaha manusia (baik oleh pemiliknya atau orang yang ditugaskannya)¹² adalah dengan cara diusahakan, diperdagangkan atau disewakan. Jenis harta ini seperti hasil perkebunan, perdagangan, investasi uang dan lain-lain.

Adapun harta yang berkembang secara alami¹³ yaitu perkembangan harta karena potensi dari harta itu sendiri yang telah diciptakan oleh Allah swt mengalami penambahan nilai seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, seperti emas, perak, tanah, hewan ternak dan yang sejenis dengannya.

Inilah kiranya pesan dari al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103 yang menjelaskan tentang perintah mengambil harta zakat “ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ”, yang mana dengan mengambil zakat dari orang kaya diharapkan dapat membersihkan sekaligus menyucikan harta mereka dari hak orang lain.

¹² Zaidan, *Al-Mufashshal Fi Ahkam Al-Mar'ah*, Juz I, hlm. 355.

¹³ *Ibid.*

Menumbuhkembangkan harta yang dizakatkan adalah salah satu dari tujuan syar'iat zakat. Dengan demikian, ketika harta itu dikeluarkan sebagai kewajiban *muzakkiy* melalui amil, maka harta yang diserahkan itu dengan sendirinya berdampak memberikan manfaat luar biasa bagi penerimanya (*mustahiq al-zakâh*).

a. Bagi *muzakkiy*

Bagi *muzakkiy*, sisa harta dari yang telah dibagikan itu, untuk selanjutnya dikembangkan lagi dengan harapan pokok harta tidak habis begitu saja oleh zakat. Pembiaran atau memendam harta tanpa diusahakan untuk dikembangkan adalah bagian dari perilaku pemubaziran harta yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam.

Ada beberapa alasan (*nash al-Qur'an dan Sunnah*), yang menunjukkan bahwa Allah swt menyuburkan harta yang disedekahkan dengan melipatgandakan keberkahan (pertumbuhan aset) dari sisa harta yang disedekahkan oleh *muzakkiy* di dunia dan di akhirat, di antaranya adalah :

﴿وَمَا يَمْسُرُهَا إِلَّا اللَّهُ﴾ (سورة البقرة \ 2:276) ﴿وَمَا يَمْسُرُهَا إِلَّا اللَّهُ﴾

Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”.

Imam Al-Qurthubiy menyatakan bahwa balasan bagi yang bersedekah yang dimaksud pada ayat ini adalah bahwa Allah swt akan mengganti apa yang disedekahkan dengan mendapat tambahan keberkahan pada hartanya (bertambah banyak) di dunia, dan di akhirat memperoleh pahala yang berlipat ganda.¹⁴

Dan firman Allah swt :

¹⁴ Al-Qurthubiy, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz IV, hlm. 402.



Artinya : “Dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik”.

Demikian juga, dalam hadits Qudsi diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Allah swt memberikan jaminan pengganti dari yang diberikan (diinfakkan) oleh hamba-Nya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِينُ اللَّهُ مَلَأَى وَقَالَ ابْنُ مُخْمِرٍ مَلَأْنُ سَحَاءٌ لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ¹⁵

Artinya : “Dari Abu Hurairah hingga sampai kepada Nabi saw, beliau bersabda: “Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: “Wahai anak Adam, berinfaklah kamu niscaya Aku akan memberikan ganti kepadamu”. Beliau juga bersabda: “Pemberian Allah selalu melimpah”. Ibnu Numair berkata, “Suatu pemberian yang tidak pernah berkurang meskipun mengalir siang dan malam”.

Bahkan Rasulullah saw menyatakan bahwa akan ada dua Malaikat yang ikut serta mengiringinya dengan do’a. Dalam satu riwayat dinyatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسْكًا تَلَفًا¹⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma’il, ia berkata; telah menceritakan kepada saya saudaraku dari Sulaiman dari Mu’awiyah bin Abu Muzarid dari Abu Al-Hubab dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi saw bersabda: “Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun (datang) dua malaikat kepadanya lalu salah satunya berkata; “Ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya”,

¹⁵ Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawi, Juz VII, hlm. 79-80.

¹⁶ Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami’ Al-Shahih*, (Kairo : Al-Mathba’ah Al-Salafiyah, 1403 H.), Cet. ke-1, Juz I, hlm. 445.

sedangkan yang satunya lagi berkata: “Ya Allah berikanlah kehancuran (kebinasaan) kepada orang yang menahan hartanya (bakhil)”.

Di samping itu juga, harus ada dorongan dari dalam berupa kerendahan hati seseorang bahwa sekalipun Allah swt memberinya kelebihan di bidang harta akan tetapi ia harus sadar bahwa semua itu adalah amanah dari Allah swt. Sebagai mana dinyatakan dalam hadits Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ¹⁷

Artinya : “Dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw bersabda : “Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.”

Satu alasan lagi, adalah berdasarkan *qiyas* pada pengelolaan harta anak yatim, tidak dibenarkan bagi wali harta anak yatim (*waliy amwâl al-yâtamâ*) menghabiskan harta anak yatim dengan cara zalim. Termasuk membiarkan tanpa mengembangkan harta anak yatim yang potensial produktif tetapi dibiarkan begitu saja habis dimakan oleh pengurangan kadar zakat pada hartanya itu.

Berdasarkan hadits ini maka pada prinsipnya harta yang dizakatkan itu secara hakiki tidak akan mengurangi harta dan menyebabkan *muzakkiy* menjadi miskin, akan tetapi hartanya justru dijamin oleh Allah swt akan semakin tumbuh, berkembang dan bertambah. Jaminan ini hanya dapat dirasakan dan diyakini

¹⁷ *Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawiy*, (Kairo : Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah, 1349 H./1930 M.), Juz XVI, Cet. ke-1, hlm. 141.

manakala pelaksanaan ibadah zakat ini didorong oleh rasa keimanan dan keyakinan serta keikhlasan kepada Allah swt.

b. Bagi *mustahiq*

Bahwa harta yang dizakatkan itu berpotensi untuk dikembangkan oleh para *mustahiqnya* atau dapat memberikan kecukupan dalam kehidupannya. Sehingga tujuan zakat itu adalah untuk mensejahterakan para *mustahiq* zakat dengan mudah dapat tercapai. Artinya, bahwa harta yang diberikan itu dijadikan sebagai aset penjamin keberlangsungan hidup mereka, sehingga dengan harta zakat mereka yang pada awalnya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, maka dengan aset zakat ini diharapkan dapat menjadikan mereka mencapai standar kecukupan hidup yang layak.¹⁸

3. Pelaksanaan zakat merupakan tugas pemerintah (رعاية الراعى فى التوزيع)

Mengacu pada konsep *nushush al-syari'ah*, Allah swt (*al-syari'*) melalui *nash* al-Qur'an memberikan tugas kepada amil untuk melaksanakan tugas keadilan mulai dari mendata para *muzakkiy* dan *mustahiq*, mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat, sampai pada tugas memantau perkembangan pelaksanaan zakat tersebut.

Sejak awal Islam, Rasulullah saw. telah memberi contoh tentang pentingnya amil zakat. Beliau mengangkat orang-orang tertentu untuk pengurusan zakat. Begitu

¹⁸ Standar minimal pencapai kecukupan hidup yang layak bagi mustahik, apabila dikaitkan dengan teori *maqashid al-syari'ah* pada zakat adalah terpenuhinya kebutuhan pokok mustahik berupa tempat tinggal yang layak huni, mempunyai pakaian yang layak dan mencukupi dalam menutup kehormatan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya, asupan gizi (makan dan minum) yang mencukupi bagi dirinya dan bagi orang yang menjadi tanggungan hidupnya, serta memiliki akses pekerjaan dan alat kerja yang memadai untuk mampu bertahan hidup dalam memelihara diri dan keluarganya dari segala ancaman yang mungkin mengganggu *al-kulliyât al-khamsah* (*hifzh al-dîn, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, hifzh al-nasl wa al-nasb wa al-'ardh* serta *hifzh al-mâl*). Lihat Abdul 'Aziz Janjum, *Al-Zakah Fi Al-Mizan*, hlm. 286 dan 291-292. Bandingkan pada teori *maqashid al-syari'ah* Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi, *'Ilm Al-Maqashid Al-Syari'ah*, (Riyad : Maktabah Al-'Abikan, 1421 H./2001 M.), Cet. ke-1, hlm. 81-85.

juga dengan *Khulafa al-Rasyidin* dan pemimpin-pemimpin sesudahnya. Keberadaan lembaga amil zakat adalah sebuah keharusan, karena zakat sebagai sarana pemberdayaan umat harus diorganisir secara profesional dan modern. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok amil zakat yaitu mengumpulkan zakat, mengelola zakat, dan mendistribusikan zakat demi tercapainya tugas keamilan yang benar-benar dilakukan dengan amanah dan profesional.

Kewajiban membayar zakat melalui pemerintah telah dijelaskan oleh Abu Ubaid dalam *kitab Al-Amwal*, bahwa :

"Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Ayub, dari Ibnu Sirin, dia mengatakan; "Dulu zakat diajukan (dibayarkan) kepada Nabi saw atau kepada petugas yang ia tunjuk (perintahkan), dan kepada Abu Bakar ra atau kepada petugas yang ia tunjuk, dan kepada Umar ra atau kepada petugas yang ia tunjuk, dan kepada Utsman ra atau kepada petugas yang ia tunjuk. Akan tetapi setelah Utsman ra terbunuh mereka berselisih pendapat. Di antaranya ada yang tetap membayar zakat kepada pemerintah, dan ada juga yang membaginya sendiri. Dan di antaranya yang tetap membayar zakat kepada pemerintah adalah Ibnu Umar".¹⁹

Selanjutnya, Abu Ubaid menjelaskan bahwa :

"Abdullah bin Shaleh menceritakan kepada kami, dari Al-Laith, dari Yahya bin Sa'id, dari Ali bin Abdullah bin Rifa'ah, dari Al-Rabi' bin Ma'bad, bahwa dia pernah bertanya kepada Ibnu Umar ketika terjadi fitnah tentang zakat harta dari beberapa anak yatim, apakah boleh dia bayarkan langsung kepada anak-anak dari salah seorang paman mereka yang membutuhkan?. Jawaban Ibnu Umar; "Jangan !, bayarlah zakat itu kepada pemerintah. Selanjutnya Abu Ubaidah menjelaskan bahwa; "Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan, dari Imran bin Muslim, dari Khaitamah, dari Ibnu Umar bahwa dia berkata ; "Selagi pemerintah itu masih mendirikan shalat maka bayarkanlah zakat kepada mereka".²⁰

Perintah kepada penguasa atau pemerintah seperti ditegaskan dalam ayat al-Qur'an dengan redaksi "*khudz min amwalihim*", atau redaksi hadits dengan kalimat

¹⁹ Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal*, (Mesir : Dar Al-Hadiy Al-Nabawiy dan Dar Al-Fadhilah {Saudi Arabiyah}, 1428 H./2007 M.), Cet. ke-1, Juz II, hlm. 243.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 245.

“*tu'khadzu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim*” adalah bermakna bahwa zakat itu terlebih dahulu diambil oleh amil (pemerintah yang diberikan kewenangan yang sah), setelah itu harta yang telah dikumpulkan tersebut diberikan kepada para mustahiq zakat (*al-ashnaf al-tsamaniyah*) sesuai dengan haknya masing-masing secara berimbang dan adil.²¹

Dengan demikian, maka pada dasarnya zakat itu sebaiknya tidak diberikan langsung oleh orang yang berkewajiban mengeluarkannya (*muzakkiy*) kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Hal ini dimaksudkan agar zakat tidak diartikan sebagai kebaikan si pemberi semata, sehingga dapat menimbulkan perasaan hina dan rendah diri pada si penerima.

Akan berbeda apabila zakat itu dikelola dan diserahkan oleh pemerintah, maka pemberian negara/pemerintah kepada kaum yang lemah, tanpa diminta oleh mereka tidak akan berkesan merendahkan dan menimbulkan rasa hina. Karena ia akan menjadi bersifat bantuan terhormat, di samping merupakan pemenuhan kebutuhan, pencegahan kesengsaraan, penanggulangan atas perpecahan umat dan pembelaan terhadap kaum yang lemah agar mereka tidak meminta belaskasihan kepada orang lain dengan cara mengemis atau meminta dengan muka memelas, yang semuanya itu merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara/pemerintah.

Inilah prinsip yang dimaksud oleh hadits Nabi saw bahwa tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah, sebagaimana dinyatakan dalam satu riwayat :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعْقَهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ

²¹ Lihat Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram*, (Makkah : Maktabah Al-Asadiy, 1423 H./2003 M.), Cet. ke-5, Juz III, him. 284.

اللَّهُ وَعَنْ وَهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا²²

Artinya : “Dari Hakim bin Hizam ra dari Nabi saw berkata,”Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya”. Dan dari Wuhaib berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi saw seperti ini”.

Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa apabila zakat dikelola oleh pemerintah maka akan semakin mudah tercapai efisiensi dan efektifitas pengolahan zakat. Sehingga pendistribusian zakat tersebut lebih tepat sasaran, berkeadilan menurut skala prioritasnya dan memperoleh jaminan yang pasti.

Langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah membentuk unsur-unsur organisasi keamilan, secara garis besar adalah melalui unsur :²³

a. Pendataan *muzakkiy* dan Pengumpulan zakat

Di zaman modern ini sistem pengumpulan zakat juga harus menggunakan cara-cara modern. Salah satunya adalah dengan mengusahakan sistem *fundraising*.²⁴ Lembaga amil zakat jangan hanya menunggu orang yang mau membayar zakatnya, tetapi harus proaktif (jemput bola). Karena dengan fungsinya

²² Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*, Juz I, hlm. 441.

²³ Baca Abdul 'Azizi Jamjum, *Al-Zakah Fi Al-Mizan*, hlm. 295-296.

²⁴ *Fundraising* adalah salah satu langkah jemput bola. *Fundraising* bisa dilakukan dengan cara presentasi secara langsung, bisa juga dengan menggunakan aneka media, seperti surat, barang cetakan (brosur, leaflet, dan poster), penerbitan (buku, bulletin, majalah, dan koran), atau iklan (dalam media cetak atau elektronik). Dengan cara ini diharapkan dana yang didapat bisa lebih besar sehingga langkah-langkah pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan bisa lebih mudah direalisasikan.

itulah Allah swt menyebutkannya dalam al-Qur'an supaya mendapatkan prioritas khusus dalam menerima zakat.

b. Pemeliharaan dan pengolahan harta zakat

Dana zakat yang telah terhimpun harus dikelola dengan baik. Dana zakat yang masuk (*income*) harus bisa diolah dan diberdayakan, sehingga tidak ada kesan segera setelah dana zakat itu terkumpulkan oleh amil, ia langsung keluar lagi dibagikan kepada *mustahiq*. Inovasi yang kreatif harus senantiasa dilakukan sehingga manfaat dari zakat itu benar-benar bisa dirasakan secara optimal oleh umat. Dana zakat yang terkumpul dapat diinvestasikan, dijadikan modal usaha untuk kalangan yang ingin berusaha, dibelikan kepada barang yang menghasilkan dan pengoperasiannya diserahkan kepada para mustahik, misalnya *mustahiq* yang bisa berprofesi menjadi ojek dibelikan sepeda motor.

Bahkan dapat juga menginvestasikan harta zakat untuk usaha mobil rental, taksi yang mana pelaksanaannya direkrut para *mustahiq* yang berkeahlian pada bidangnya, dan banyak lagi contoh yang lainnya, yang penting bisa menghasilkan dan menambah manfaat dengan harta zakat. Dengan cara ini diharapkan dana zakat yang ada bisa mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Kelompok fakir dan miskin akan merasakan kesulitan dalam memberdayakan dirinya sendiri. Pemberdayaan diri akan terjadi kalau ada pemberdayaan awal dari pihak luar, dalam hal ini tugas mulia yang diberikan oleh Allah swt kepada amil zakat (lembaga amil zakat) yang profesional. Pemberdayaan

masyarakat miskin melalui zakat memang tidak semudah dan secepat membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan usaha keras dan waktu yang cukup lama.

Pemberdayaan ini juga membutuhkan beberapa syarat :

- 1) Adanya keberlanjutan.
- 2) Ada batas waktu tertentu dengan menanamkan prinsip “*memberi lebih baik dari menerima*”.
- 3) Faktor-faktor keberhasilan yang dapat diukur, secara kuantitatif maupun kualitatif.
- 4) Dan dapat menjadi jembatan bagi teguhnya iman dalam hati dan ketaatan kepada Allah swt.

Mudah-mudahan dengan melakukan beberapa hal yang diutarakan di atas, pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat ini bisa menjadi kenyataan.

Pemanfaatan dana zakat saat ini dapat ditempuh dengan empat langkah :

- 1) Bersifat *konsumtif-tradisional*, yaitu zakat yang langsung dimanfaatkan oleh mustahik sebagaimana zakat fitrah.
- 2) Bersifat *konsumtif-kreatif*, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti beasiswa.
- 3) Bersifat *produktif-tradisional*, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang atau harta produktif produktif misalnya kambing, sapi, mesin jahit, dan lain-lain.
- 4) Dan bersifat *produktif-kreatif*, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun

suatu proyek sosial maupun untuk menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Dua jenis pemanfaatan dana zakat yang terakhir ini (produktif tradisional dan produktif kreatif) adalah langkah inovatif dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan perekonomian umat.

c. Pendistribusian dana zakat

Secara garis besar model pendistribusian dana zakat ini bisa dibedakan ke dalam dua macam sesuai dengan kelompok penerimanya, *pertama*, kelompok penerima zakat yang masih produktif, namun tidak mampu mencari peluang kerja atau tidak memiliki fasilitas untuk bekerja.²⁵ Kelompok pertama diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah karena mereka masih dapat diperdayakan dengan memotivasi mereka untuk berusaha secara produktif. Dan *kedua*, kelompok mustahiq yang tidak produktif lagi atau tidak ada kemungkinan produktif untuk bekerja disebabkan karena kelemahannya (karena masih kecil, sakit, bodoh, tua dan lain sebagainya).²⁶

Apabila ketiga tugas pokok organisasi keamilan zakat di atas dilakukan dengan baik dan profesional maka zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat akan lebih terasa manfaatnya. Oleh karena itu, lembaga amil zakat yang baik dan profesional adalah bagian dari solusi untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan umat.

4. Memberikan kecukupan (حد الكفاية والغنى)

²⁵ Abdul 'Aziz Muhammad Rasyid Janjum, *Al-Zakah Fi Al-Mizan*, hlm. 289.

²⁶ *Ibid.*

Memberikan kecukupan kepada orang fakir dengan harta zakat, bukan berarti sekedar menutupi kelaparan mereka dengan memberi beberapa suap makanan saja, atau sekedar melepaskan kesusuhan mereka sesaat dengan memberi beberapa dirham saja, tetapi hal itu tidak mampu merubah kondisi ekonominya. Akan tetapi yang menjadi prinsip adalah memberikan jaminan kecukupan kepada mereka bukan sekedar menghilangkan kefakiran sesaat saja akan tetapi harus menjamin hingga taraf kesempurnaan.

Dalam melaksanakan prinsip kebijakannya (*al-siyasah*) berkaitan dengan penjaminan kecukupan ini Umar Bin Khattab ra mengemukakan : إذا أعطيتم فأغنوا (artinya : Apabila kalian membagikan harta zakat, kayakan mereka).²⁷ Bahkan bila perlu pemberian berulang kali sehingga mencapai kecukupan, maka upaya itu harus dilakukan, dan hal itu merupakan kewajiban agama.

Pada masa sahabat, suatu ketika seorang laki-laki sambil menangis mengadukan nasibnya yang tidak beruntung (nasib buruk) kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar memberinya tiga ekor unta. Dan pemberian itu tidaklah sekedar menghilangkan kesusahan sesaat, sebab unta adalah harta yang paling berguna bagi kalangan mereka saat itu. Seketika itu Umar memerintahkan para amil yang mengurus zakat dengan mengatakan :

كروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة ناقة²⁸

²⁷ Jaribah Bin Ahmad Bin Sanyan Al-Haritsiy, *Al-Fiqh Al-Iqtishadiy Li Amir Al-Mukminin Umar Bin Khattab*, (Jedah : Dar Al-Andalus Al-Khazhra', 1424 H./2003 M.), Cet. ke-1, hlm. 257. Lihat Abu Ubaid, *Kitab Al-Ammal*, (Mesir : Dar Al-Hadiy Al-Nabawiy dan Dar Al-Fadhilah {Saudi Arabiyah}, 1428 H./2007 M.), Cet. ke-1, Juz II, hlm. 240-241. Lihat Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah*, hlm. 566-567.

²⁸ Jaribah Bin Ahmad Bin Sanyan Al-Haritsiy, *op.cit.*, hlm. 257. Abu Ubaid Al-Qasim Bin Salam, *op.cit.*, hlm. 241. Lihat Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah*, hlm. 566-567.

Artinya : *“Berikanlah kepada mereka zakat, sekalipun salah seorang dari mereka baru dapat tercukupi jika mendapat seratus ekor unta”*.

Dalam satu riwayat lain, dikatakan bahwa Umar bin Khattab ra juga memperhatikan prinsip kecukupan ini sesuai dengan masanya, yang pada masa mereka hewan ternak merupakan salah satu sektor ekonomi yang produktif di samping perniagaan dan lain-lain, sehingga tolak ukur kecukupan mereka saat itu dapat diukur salah satunya dengan kepemilikan hewan ternak yang dapat atau potensial untuk dikembangkan. Menurut pertimbangannya apabila seseorang tidak memadai mencukupi kehidupannya selama satu tahun maka Umar bin Khattab ra memandang perlu agar mereka diperhatikan. Umar bin Khattab ra pernah menegaskan kepada petugas zakat :

أعطوا من الصدقة من أبقى لهم السنة غنما ولا تعطوا من أبقى لهم السنة غنمين²⁹
Artinya : *“Berikanlah sedekah kepada orang yang bekal selama satu tahun mereka hanya memiliki seekor domba dan jangan berikan kepada mereka yang masih memiliki dua ekor domba untuk bekal satu tahun”*.

Demikian juga halnya pada masa *tabi'in*, salah seorang ulama fiqh kenamaan dari kalangan *tabi'in* yakni 'Athar' bin Abi Rabah pernah berkata : *“Apabila seseorang memberikan harta zakat kepada keluarga kaum muslimin, sehingga sampai mereka menjadi berkecukupan, maka hal itu lebih saya sukai”*.³⁰

Dengan demikian, bagi penerima zakat (*mustahiq al-zakah*), ketika harta zakat itu diserahkan kepada mereka diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan

²⁹ Jaribah Bin Ahmad Bin Sanyan Al-Haritsiy, *op.cit.*, hlm. 256.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 257. Abu Ubaid Al-Qasim Bin Salam, *op.cit.*, hlm. 241-242. Lihat Yusuf Al-Qaradhaviy, *Fiqh Al-Zakah*, hlm. 566-567.

hidupannya secara mencukupi. Berkecukupan inilah yang menjadi sasaran dan tujuan disyariatkannya zakat.

5. Mengajarkan prinsip kemandirian (حد الكفاف)

Ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ajaran yang memotifasi umat agar hidup mandiri. Islam tidak membenarkan umat selamanya berada dalam kondisi meminta-minta. Prinsip Islam mengajarkan agar manusia senantiasa berusaha dan berdoa. Dalam sebuah hadits diriwayatkan, bahwa dalam doa' Rasulullah senantiasa mengulang-ulang doa' :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى³¹

Artinya : “Ya Allah, aku memohon kepadaMu petunjuk, dan ketakwaan, kesucian diri, serta kecukupan”.

Dalam satu riwayat yang panjang, Ibnu Majjah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw ketika ada sahabat yang meminta-minta, Rasulullah saw tidak langsung mengabulkan permintaannya. Akan tetapi, justru menyuruhnya bekerja dengan memberikan solusi modal dan berusaha dengan hasil keringat sendiri, karena Rasulullah saw melihat kondisi yang meminta itu masih kuat dan mampu berusaha :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدْخَ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمَ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دَرَاهِمَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمَ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْزِدْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَاتْنِي بِهِ فَفَعَلَ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَدَّ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ

³¹ Al-Jami' Al-Shahih Sunan Al-Tirmidzi, Juz V, hlm. 522.

وَقَالَ اذْهَبْ فَاحْتَطَبْ وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ بَعْضَهَا طَعَامًا وَبَعْضَهَا ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِدِي فَقَرَّ مُدَقِّعٌ أَوْ لِدِي غُرْمٌ مُنْطَعٍ أَوْ دَمٌ مُوجِعٌ³²

Artinya : "Dari Anas bin Malik berkata, "Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi saw dan bermaksud meminta (sedekah) kepadanya. Maka ia pun bertanya kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?". Ia menjawab, "Ya. Sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan (untuk alas), serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air." Ia bersabda: "Berikanlah keduanya itu untukku." Anas berkata, "Orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah saw mengambilnya dengan tangannya, kemudian bersabda: "Siapa yang mau membeli dua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan satu dirham!. Lalu ia bertanya lagi: "Siapa yang mau menambahnya?". Ia ulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali. Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya akan membelinya dengan dua dirham." Lalu ia memberikan barang tersebut kepadanya, kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada sahabat Anshar tadi. Kemudian Rasulullah bersabda: "Belilah makanan dengan satu dirham untuk keluargamu, dan sisanya belikanlah sebuah kampak. Setelah itu bawalah kampak itu kepadaku." Laki-laki itu pun melakukannya, Rasulullah saw kemudian mengambil kampak dan memasang kayu sebagai gagangnya. Lalu bersabda: "Pergilah dan carilah kayu bakar, dan selama lima belas hari ini aku tidak ingin melihatmu." Setelah itu, laki-laki tersebut pergi mencari kayu bakar dan menjualnya. Kemudian ia datang menemui Nabi setelah menghasilkan sepuluh dirham. Lalu Rasulullah bersabda: "Belilah makanan dengan separuh uangmu dan belilah pakaian dengan separuh yang lain." Kemudian ia bersabda: "Ini lebih baik bagimu daripada kamu datang dan meminta-minta. Pada hari kiamat kelak meminta-minta akan menjadi titik hitam di wajahmu, maka tidak boleh meminta-minta kecuali bagi orang yang sangat fakir, atau orang yang terlilit utang, atau (untuk menebus) denda yang menyakitkan".

Dari riwayat di atas, paling tidak ada delapan pelajaran yang dapat diambil bagi kita bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw mengajarkan prinsip kemandirian.

³² Al-Qazwainiy, Sunan Ibnu Majah, Juz II, hlm. 740-741.

- a. Nabi saw selaku kepala Negara tidak serta merta memperkenankan permintaan orang yang meminta dengan memberikan harta, akan tetapi memberikan solusi usaha yang cerdas (pendekatan secara edukatif).
- b. Islam dari awal telah mengajarkan langkah maju dalam sistim pengolahan ekonomi (inspirasi usaha).
- c. Islam tidak mengatasi kebutuhan si peminta sekedar sementara, tidak juga dengan nasehat agar jangan meminta-minta, akan tetapi (praktek mujarab Rasulullah saw) membimbing tangan si peminta (sahabat anshar) agar tegar dan menyelesaikan kesukaran hidup dengan usaha maju (pendekatan secara produktif).
- d. Mengajarkan supaya tidak mudah menyerah dan menggunakan serta mempertaruhkan segala apa yang dimiliki (pengorbanan) selama masih ada kekuatan.
- e. Mengajarkan supaya menghindari kejatuhan air muka (hina) karena mengemis, dan meyakini bahwa usaha yang halal akan mendatangkan keberkahan, sekalipun hanya mencari kayu bakar.
- f. Pemerintah (yang dipraktekkan oleh Rasulullah saw) memberikan jaminan, menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi kesanggupan seseorang dan keadaan setempat, sehingga tidak membiarkan si peminta dalam keraguan.
- g. Adanya pemantauan dan evaluasi kerja (Rasulullah saw memberikan tegak waktu selama 15 hari, dan mengevaluasi tingkat keberhasilan usahanya).
- h. Adanya pelajaran bahwa seorang pemimpin memiliki tanggungjawab membimbing secara teoritis dan praktis, namun tetap memberikan peluang

solusi, ada kondisi tertentu yang membolehkan meminta-minta yaitu pada saat fakir yang bersangatan, terlilit utang dan denda yang mengancam.

6. Menyelamatkan status *muzakkiy* dan *mustahiq* sekaligus

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat umum (sosial) secara keseluruhan.

Orientasi ibadah zakat harus berdampak positif bagi muzakkiy dan mustahiq, baik secara akidah, psikologi (*ruhiyyah*), ekonomi maupun sosial.

a. Bagi *muzakkiy*

Bagi *muzakkiy*, manfaat yang akan diperoleh dengan melaksanakan ibadah zakat di antaranya adalah sebagai :

- 1) Terwujudnya nilai keimanan dan semakin dekat dengan Allah swt.
- 2) Mensyukuri nikmat-Nya, dengan bersyukur terhadap harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang nikmat yang diberikan oleh Allah swt, sehingga semakin besar peluang untuk beribadah *maliyah* dalam mencari *ridha* Allah swt.
- 3) Di samping itu juga, zakat dapat menumbuhkan akhlak mulia yaitu mau berbagi sebagai bukti adanya rasa kepedulian sosial yang tinggi.
- 4) Menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis.
- 5) Menghindarkan diri dari penyakit terlalu mencintai urusan keduniaan.

- 6) Menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan semakin semangat untuk mengembangkan harta yang dimiliki.³³

b. Bagi *mustahiq*

Bagi *mustahiq*, manfaat yang akan diperoleh di antaranya adalah :

- 1) Dapat memenuhi kebutuhan pokok dan memberikan kecukupan, kesejahteraan dan mampu menghilangkan sifat mengemis (*dzil al-su'â*) supaya mereka hidup terhormat dan mulia dengan berusaha dan bekerja keras.
- 2) Di samping itu juga, dengan memperoleh hak zakat mereka dapat beribadah kepada Allah swt lebih sempurna, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan rasa iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki banyak harta.³⁴

7. Menjaga stabilitas sosial

Dalam menjaga stabilitas sosial, baik ditinjau dari segi hukum positif maupun dari segi hukum Islam, maka nilai-nilai yang harus dipelihara dan dilindungi dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial ini tidak dapat terlepas dari lima unsur pokok kebutuhan manusia (*al-kulliyat al-khamsah*, dalam teori hukum Islam). Maka stabilitas sosial yang akan terbangun, akan berdampak pada :

- a. Menjadi *washîlah* dalam tolong-menolong, saling menyayangi dan saling melindungi di antara anggota masyarakat. Dengan berzakat permasalahan

³³ Lihat Abdul 'Aziz Muhammad Rasyid Jamjum, *Al-Zakah Wa Al-Mizan*, (Damaskus : Muassasah 'Ulum Al-Qur'an, 1429 H.), Cet. ke-3, hlm. 121-127.

³⁴ *Ibid*, hlm. 127-128.

masyarakat yang berbahaya dan mengancam stabilitas agama (*hifzh al-dīn*), jiwa (*hifzh al-nafs*), psikologi (*hifzh al-'aql*), keturunan, keluarga dan kehormatan (*hifzh al-nasl wa la-nasb wa al-'ardh*) dan ekonomi (*hifzh al-mal*) mesti bisa ditanggulangi.

Ancaman terhadap stabilitas *al-kulliyât al-khamsah* di atas apabila ditanggulangi secara bersama-sama maka dapat memungkinkan kaum muslimin satu dengan yang lainnya ikut serta saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, mewujudkan tujuan penciptaannya secara berimbang yaitu beribadah kepada Allah swt.

- b. Di sisi lain, Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi antara orang kaya dengan orang miskin. Menciptakan kesenjangan di bidang ekonomi ini akan menjadi pemicu terganggunya stabilitas lainnya. Orientasi nilai dari stabilitas ini adalah dalam rangka menegakkan keadilan.

Kehidupan yang berkeadilan yang dimaksud dalam Islam adalah nilai keseimbangan dan kesebandingan (العَدَالَةُ وَالْمَسَاوَةِ), bukan kesamaan hak. Maka bagi orang yang memiliki kekayaan melebihi kecukupan untuk kebutuhan dirinya (الْفَضْلُ مِنَ الْمَالِ), maka wajib baginya memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya.

Selanjutnya, apabila ia masih memiliki kelebihan harta maka ia wajib membantu dan memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan dengan memprioritaskan kepada orang terdekat terlebih dahulu apabila mereka

termasuk orang yang sangat membutuhkan bantuan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah saw :

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ³⁵

Artinya : “Shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu”.

C. Pandangan Ulama tentang Pengelolaan Harta Zakat Secara Produktif

Kata produktif yang dimaksud dalam penelitian ini, ditinjau secara makna bahasa berarti berusaha untuk mencari keuntungan (طلب الثمر), banyak mendatangkan hasil dan menjadikan harta itu banyak mendatangkan manfaat, yang dalam istilah ekonomi sering disebut dengan istilah investasi (الاستثمار).

Dalam istilah Arab, asal kata “الاستثمار” adalah “ثمرّة”, dalam satu ungkapan misalnya dikatakan “ثمرّة العلم العمل الصالح”, artinya : buah/hasil dari ilmu adalah amal shaleh/perbuatan baik. Atau dalam contoh lain dikatakan misalnya “ثمر الرجل ماله تثميراً”,

³⁵ Imam Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*, Juz I, hlm. 441.

artinya : orang itu telah mengembangkan harta menjadi banyak.³⁶ Berdasarkan hal ini maka dapat dikatakan bahwa istilah produktif berarti upaya mencari hasil/keuntungan dengan cara mengembangkan harta.

Dalam istilah fiqh, ada beberapa ragam istilah yang biasa digunakan dalam pemahaman produktif (الإستثمار) ini, di antaranya adalah; *pertama*, mengupayakan keuntungan/manfaat (الإنتفاع), *kedua*, mengupayakan kekayaan (الإستغلال), *ketiga*, menumbuhkembangkan harta (الإستمناء)³⁷ dan upaya produktif (الإنتاج).

Memproduktifkan harta zakat dalam hal ini berarti suatu upaya untuk mengembangkan harta zakat dengan cara yang sesuai dengan syari'at untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan mustahiknya.

Berkaitan dengan permasalahan memproduktifkan harta zakat, dalam kajian fiqh zakat kontemporer menjadi suatu permasalahan yang sangat penting dan serius untuk segera dijawab secara tuntas. Nash al-Qur'an, Sunnah maupun ijma', tidak ada menyebutkan secara tegas tentang bagaimana cara mendistribusikan harta zakat, apakah secara konsumtif atau secara produktif.

Dalam al-Qur'an misalnya, Allah swt hanya menyebutkan secara umum kelompok orang (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat tanpa menegaskan bagaimana cara mengelola dan menyerahkan harta zakat itu kepada mereka. Dengan demikian maka wajar jika di kalangan ulama terjadi perbedaan penafsiran dan pendapat tentang cara

³⁶ Al-Raghib Al-Ashfahaniy, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, hlm. 81. Lihat Umar bin Ahmad Al-Zamakhshariy, *Asas al-Balaghah*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1419 H./1998 M.), Juz I, Cet. ke-1, hlm. 115.

³⁷ Wizarat Al-Auqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz III, hlm. 182.

yang berhak menerima zakat, seperti terdapat dalam surat al-Taubah (9) ayat 60 :

Artinya : “Sesungguhnya harta zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

...فَاعْلَمَهُمُ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَوَخَّذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 38

Nabi saw sendiri tidak secara jelas menguraikan bagaimana cara membagikan

harta zakat ini yang menjadi pembahasannya dapat diklasifikasikan pada dua aspek




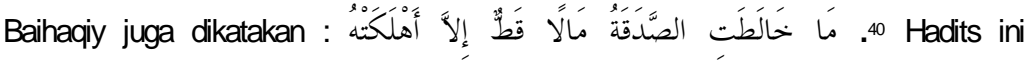
permasalahan :

Jumhur ulama (Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah) dan sebagian kelompok

Hanafiah berpendapat bahwa tidak boleh bagi seorang *muzakkiy* mengulur-ulur

194

pembayaran kewajiban zakatnya, dengan maksud mengelola harta zakatnya terlebih dahulu secara produktif (menginvestasikannya) sebelum harta tersebut diserahkan kepada para mustahik zakat. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kewajiban menyegerakan (اقتضاء الفور) pembagian harta zakat kepada yang berhak.³⁹

Hal ini sangat beralasan, karena berpedoman pada perintah tegas (*fi'l al-amr*) pada ayat    , makna perintah zakat pada ayat ini wajib secara mutlak untuk segera dilaksanakan. Dan dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi juga dikatakan : .⁴⁰ Hadits ini menunjukkan bahwa seorang *muzakkiy* wajib segera menunaikan zakat, karena dengan mengundur atau menunda pembayaran zakat akan mengakibatkan merusak dan menyebabkan kehancuran pada pelakunya.

2. Bagi pemerintah ('amil zakat)

Mengelola harta zakat secara produktif (menginvestasikannya) ini bertujuan agar memperoleh keuntungan dan manfaat lebih besar lagi bagi kepentingan kemaslahatan mustahiknya, baik yang dikelola oleh amil zakat maupun amil zakat menyerahkan harta zakat kepada mustahik tertentu berupa aset produktif. Dalam hal mengelola harta zakat secara produktif ada beberapa pandangan yang dikemukakan oleh ulama :

³⁹ Al-Kassaniy, *Bada'i' Al-Syanai'*, Juz II, hlm. 3. Al-Syarbainiy, *Mughniy Al-Muhtaj*, Juz I, hlm. 413. Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, Juz II, hlm. 684.

⁴⁰ Al-Syaukaniy, *Nail Al-Authar*, Juz IV, hlm. 167.

- a. Ketika harta zakat itu telah sampai ke tangan pemerintah (amil zakat), maka pada prinsipnya amil zakat wajib segera membagikannya kepada mustahik zakat.

Menurut Jumhur Ulama boleh menunda pembagiannya dengan berpedoman pada riwayat :

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ اللَّهِ
بَنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيَحْنِكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمِ يَسْمُ إِبِلِ الصَّدَقَةِ⁴¹

Artinya : “Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: “Aku berangkat di pagi hari bersama ‘Abdullah bin Abu Thalhah menemui Rasulullah saw untuk mentahniknya dan aku dapati di tangan Beliau ada stempel besi yang biasanya untuk memberikan tanda pada unta (dari hasil zakat)”.

Berdasarkan hadits di atas maka diperbolehkan bagi amil menunda pembagian zakat, alasannya adalah jika tidak boleh maka tidak akan terjadi pemberian tanda stempel pada unta seperti yang disebutkan dalam riwayat di atas.

Alasan lainnya bahwa diperbolehkan bagi pemerintah (amil) menunda pembagian zakat apabila menurut hemat (*ijtihad*)nya hal itu penting dan mengandung kemaslahatan. Karena fungsi pemerintah (amil) dalam batas kewenangannya adalah sebagai wakil bagi mustahik zakat, dan ia wajib melaksanakan tugasnya berdasarkan kemaslahatan, sebagaimana dikatakan dalam

⁴¹ Al-Bukhariy, *Al-Jami' Al-Shahih*, Juz I, hlm. 466.

kaidah fiqhiyyah : كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة⁴². Atau dalam

kaidah fiqhiyah lainnya dikatakan : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة⁴³

- b. Kebolehan memproduktifkan harta zakat adalah dengan mengiaskan pada persoalan perwalian terhadap harta anak yatim.

Dalam kitab *Tartib Musnad Al-Syafi'iy* diriwayatkan bahwa Umar ra pernah berkata :

أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة⁴⁴

Berdasarkan riwayat ini, ketika dibolehkan bahkan dianjurkan agar memproduktifitaskan harta anak yatim oleh walinya supaya tidak habis dimakan zakat, maka memproduktifitaskan harta zakat oleh amil sebelum diserahkan dengan tujuan merealisasikan manfaat yang lebih besar untuk kemaslahatannya maka termasuk langkah yang mulia sebagaimana dilakukan dalam hal memelihara dan menjaga harta anak yatim. Karena fungsi amil adalah pemelihara (wali) kemaslahatan mustahik zakat tersebut.

Perlu diperhatikan, bahwa yang menjadi standar nilai kemaslahatan yang terdapat pada mengelola harta zakat secara produktif adalah harus mampu memberikan jaminan terpeliharanya harta mustahik sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan mereka. Berkaitan dengan

⁴² Tajuddin Al-Subkiy, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1411 M/1991 M.), Cet. ke-1, Juz I, hlm. 310.

⁴³ Ali Ahmad Al-Nadwiyy, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus : Dar Al-Qalam, 1412 H/1991 M.), Cet. ke-2, hlm. 280.

⁴⁴ Muhammad Zahid Al-Hasan Al-Kautsariyy, *Tartib Musnad Al-Syafi'iy*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz I, hlm. 224.

hal ini maka menarik untuk dicermati sebagai penopang landasan *nash* di atas, suatu *qaidah fiqhiyyah* berkaitan dengan fungsi kepemimpinan imam dalam melaksanakan kepemimpinannya yang dikemukakan oleh Imam Al-Syafi'i, yaitu :

45 منزلة الإمام من الرعية بمنزلة الولي من اليتيم

Artinya : “Posisi imam dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya sama seperti seorang wali dalam memelihara kewalian terhadap anak yatim”.

D. Tinjauan *Maqâshid al-syarî'ah* terhadap Pengelolaan Zakat Secara Produktif

Sejak awal, syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Syari'ah Islam diturunkan oleh Allah swt adalah demi kebahagiaan manusia secara lahir dan batin baik di dunia maupun akhirat, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan. Prinsip suatu hukum haruslah didasarkan pada sebuah sistem nilai sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan yaitu kemaslahatan. Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat secara universal.

Teori *ijtihad* apapun dan bagaimanapun, baik didukung dengan *nash* atau tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dan hasilnya sesuai dengan kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran *ijtihad* apapun dan yang bagaimanapun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya nilai kemaslahatan, namun justru membuka peluang kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kacamata Islam adalah *fasid*, dan umat Islam secara perorangan atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.

⁴⁵ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, hlm. 283.

Apabila jalan fikiran di atas disepakati, secara mendasar kita pun perlu meninjau kembali pemahaman kita terhadap konsep *ushul al-fiqh* tentang apa yang disebut dengan *qath'iy al-dalalah* (yang pasti dan tidak bisa diubah-ubah oleh ijihad) dan *zhanniy al-dalalah* (yang tidak/kurang pasti dan bisa diubah-ubah oleh ijihad) dalam hukum Islam.

Selama ini teori fiqh mengatakan bahwa yang *qath'iy al-dalalah* adalah tunjukan dalil hukum yang secara *sharih* dan pasti ditunjuk oleh *nash* al-Quran maupun hadits Nabi Muhammad saw. Sedangkan yang *zhanniy* adalah hukum-hukum yang petunjuk nasnya kurang/tidak *sharih* dan mengandung pengertian yang bisa berbeda.

Sesungguhnya, yang *qath'iy* dalam hukum Islam sesuai dengan makna harfiahnya sebagai sesuatu yang bersifat pasti, tidak berubah-ubah dan karena itu bersifat fundamental- adalah nilai maslahat atau keadilan itu sendiri, yang merupakan jiwanya hukum.

Sedang yang termasuk dalam kategori *zhanniy* (tidak pasti dan bisa diubah-ubah) adalah seluruh ketentuan normatif, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk diterjemahkan yaitu dalil yang dapat diraba dengan akal (berkaitan dengan nilai maslahat atau keadilan) dalam kehidupan nyata (وهو معقول المعنى للإجتihad). Sehingga dikatakan bahwa peluang ijihad tidak berlaku pada wilayah dalil *qath'iy*, dan hanya bisa dilakukan pada wilayah dalil yang *zhanniy*, itu memang benar adanya. Yang harus dilakukan upaya *ijihad* dengan seluruh kemampuan mujtahid adalah hal-hal yang *zhanniy*, yang belum pasti, yang memang harus diperbaharui terus-menerus sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu yang juga terus bergerak.

1. Tinjauan terhadap *al-ammal al-zakawiy* (jenis harta yang wajib dizakatkan)

Tujuan disyariatkan zakat adalah untuk terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dengan prinsip bahwa yang mampu (*al-aghniya*) membantu yang lemah (*dhu'afa*). Di sini tidak ada keperluan untuk melakukan ijtihad guna menentukan hukumnya. Yang perlu dilakukan ijtihad adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta yang wajib dizakatkan.

Misalnya dalam konteks bangsa Indonesia masa kini dan masa mendatang, berkaitan tentang *muzakkiy* dalam menunaikan kewajiban zakatnya pada *al-ammal al-zakawiy* mereka. Maka sangat perlu mendefinisikan tentang jenis-jenis harta yang diakomodir oleh *nash-nash syara'* (yang menjadi sumber harta kekayaan yang wajib dizakatkan) supaya ditunaikan kewajibannya dalam konteks ruang dan waktu sesuai dengan keberadaannya.

Dalam konteks zaman sekarang, tidaklah menjiwai prinsip keadilan secara Islami apabila hanya mengenakan pungutan sedekah wajib (zakat) atas komoditas buah-buahan (*زكاة الزروع والثمار*) tertentu seperti gandum, beras, kurma atau anggur, sementara kelapa sawit, karet, apel, kopi, tembakau, dan segala jenis tanaman dan biji-bijian lainnya yang tidak kalah ekonomisnya, dibebaskan begitu saja dari kewajiban zakat. Kendatipun cara analisa keuangan zakatnya (*محاسب الزكاة*) berbeda satu sama lainnya, ada yang termasuk pada kelompok zakat komoditas itu sendiri yang menjadi objek perhitungan dan pembayaran zakatnya (*النصاب عند الحصاد*), dan ada yang menjadi objek perhitungannya pada hasil (nilai uangnya) setelah diperjualbelikan (*التجارية*), yang secara terperinci tidak disinggung dalam kajian fiqh klasik. Maka peran

teori *qiyas* pada permasalahan ini menjadi logis dan sangat dibutuhkan. Sehingga jiwa '*ubudiyah* pada harta seorang mukallaf menjadi dapat terealisasi dalam kehidupan nyata (المحافظة في الدين والمال معاً).

Juga, tidak adil apabila dikenakan beban sedekah wajib (zakat) atas pendapatan sektor pertanian dan perdagangan tertentu pada zaman klasik, sementara pada zaman modern dari sektor industri dan jasa justru dibiarkan dan diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, maka para ulama berupaya mengakomodir permasalahan ini dengan metode *qiyas* atas penentuan jenis harta zakat pada konteks ekonomi/bisnis modern saat ini.

2. Tinjauan terhadap *mustahiq al-zakah* (yang berhak menerima zakat)

Nabi Muhammad saw tidak ada menerangkan cara pembagian zakat kepada *mustahiqnya*, beliau hanya memberikan zakat kepada mereka sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan (stok) harta zakat yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat, dalam penerapannya, membuka keluasan pintu ijtihad bagi mujtahid. Bagi pemerintah (*imam*) dan Badan atau Lembaga Amil Zakat, dibutuhkan kemampuan analisa yang tajam ketika hendak mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat agar sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi (روح التشريع في مصارف الزكاة).

Dalam salah satu *qaidah fiqhiyah* dikatakan bahwa :

كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة⁴⁶

⁴⁶ Tajuddin Al-Subkiy, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*, Juz I, hlm. 310.

Artinya : “Setiap kebijakan yang dilakukan untuk orang lain maka wajib berorientasi kepada kemaslahatan”.

Sebagaimana dimaklumi konsep maslahat senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, bisa dilakukan dengan cara adanya skala prioritas kebutuhan *dharûriyyah*, *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah* bagi masing-masing kondisi mustahik zakat.

Metode skala prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokatif dan distributif dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat. Misalnya, penafsiran kata *fî sabîlillah* , secara periodik dan kondisional selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zakaman. Pada waktu perang, *fî sabîlillah* yang secara harfiah berarti “*jalan Allah*”, adalah berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir. Pada kondisi saat ini, makna *fî sabîlillah* berjuang dalam arti berperang mengangkat senjata melawan musuh-musuh Allah swt sudah tidak ada lagi, maka mengkategorikan kelompok orang yang berjuang dalam mempertahankan dan membela kemurnian syari’at Islam, adalah termasuk makna dari *fî sabîlillah* . Termasuk juga dalam kategori ini para guru agama yang mengajarkan al-Qur’an dan al-Sunnah, sehingga ajaran Islam sampai kepada ummat secara merata, atau para relawan yang senantiasa memperjuangkan nasib ummat yang terabaikan di pelosok negeri diorbitkan sebagai bagian perjuangan di jalan Allah (*fî sabîlillah*).

Misalnya lagi, *fî al-riqâb* yang difahami sebagai budak muslim yang telah dijanjikan untuk merdeka kalau ia telah menebus dirinya. Begitu juga dengan *al-fuqarâ’*, *al-masâkîn*, dan *al-ghârimîn*. Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan zakat dan hikmah pewajiban zakat, maka diperlukan pemahaman kontekstual dan komprehensif

terhadap delapan *ashnâf* penerima zakat. Sehingga kelompok yang berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya.

3. Tinjauan terhadap keamīlan (pengelola harta zakat)

Seiring dengan perintah Allah swt kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengolahan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dalam mengelola harta zakat sebagai dana umat Islam. Pengolahan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah kewenangan Rasulullah saw dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh pemerintah.

Dalam operasional zakat, Rasulullah saw telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk amil zakat. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir. Amil yang mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

Pada masa Rasulullah saw, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat. Aturan dalam Al-Taubah ayat 103 dan tindakan Rasulullah saw tersebut mengandung makna bahwa harta zakat harus dikelola oleh pemerintah. Apalagi dalam Surat Al-Taubah ayat 60, terdapat kata “*âmil*” sebagai salah satu penerima zakat.

Pelaksanaan tugas keamīlan yang diembankan kepada pemerintah menurut syari’at Islam adalah bagian dari tanggungjawab yang melekat pada pemerintah

(Imam). Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi kepemimpinan ini Rasulullah menegaskan :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رِعِيَةً فَلَمْ يَحْطَهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ⁴⁷

Artinya : “Nabi saw bersabda : “Tidaklah ada seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, melainkan dia tidak akan mendapat bau surga”.

Berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah, dalam konteks kekinian, maka *amil* tersebut dapat berbentuk Lembaga, Yayasan atau Badan Amil Zakat yang mendapatkan legalisasi dari pemerintah. Legalitas kepemimpinannya ini dalam kaidah fiqhiyah yang telah disinggung di atas, harus senantiasa mempertimbangkan segala nilai kemaslahatan umat (كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة).

Akhir-akhir ini di Indonesia, selain ada Badan Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah berupa BAZ mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan, juga ada Lembaga atau Yayasan lain seperti Dompot Dhuafa Republika di Jakarta, Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Surabaya, Yayasan Daarut Tauhid di Bandung, Yayasan Amil Zakat di Lampung dan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah di Riau.

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengolahan Zakat, pada Bab I pasal 1 dinyatakan bahwa “Pengolahan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan

⁴⁷ Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*, (Kairo : Maktabah Salafiyah, 1400 H.), Cet. ke-1, Juz IV, hlm. 331.

pendistribusian serta pendayagunaan zakat'.⁴⁸ Agar Badan atau Lembaga pengelola zakat dapat berdaya guna, maka pengolahan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya.

a. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun.

b. Sikap profesional

Sifat amanah belum cukup, maka harus diimbangi dengan profesionalitas pengolahannya.

c. Transparan

Dengan transparannya pengolahan zakat, maka dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi badan atau Lembaga pengelola zakat harus melihat beberapa aspek, antara lain :

a. Aspek kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah Badan atau Lembaga pengelola zakat harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengolahan Zakat, Bab I ayat 1, hlm. 2.

lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis dalam melaksanakan tugas pengolahan.

b. Aspek sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati (selektif). Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus untuk menjalankan misi penting dari agama (*'ibadah*).

c. Aspek manajemen pengolahan

Badan atau Lembaga pengelola zakat harus memiliki sistem atau manajemen pengolahan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah bahwa Badan atau Lembaga pengelola zakat harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai rencana kerja, mempunyai komitmen yang kuat, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang modern yang senantiasa diaudit, dipublikasikan dan diperbaiki terus menerus.

Setelah prinsip-prinsip operasional ini difahami, maka upaya melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengolahan zakat dapat berjalan optimal, diperlukan sinergi dengan berbagai *stakeholder*.

1) Para pembayar zakat (*muzakkiy*)

Jika Badan atau Lembaga pengelola zakat ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para *muzakkiy*. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapainya, antara lain; memberikan *progress report*

berkala, mengundang *muzakkiy* ke tempat *mustahik*, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain.

2) Para *amil*

Amil adalah faktor kunci keberhasilan Badan atau Lembaga pengelola zakat. Untuk itu, Badan atau Lembaga pengelola zakat harus mampu merekrut para *amil* yang memiliki etos kerja yang tinggi, amanah, profesional dan proporsional.

Kelembagaan apa saja yang seharusnya tersedia dalam realitas sosial politik di suatu daerah tertentu yang bisa mendukung terwujudnya keadilan sosial dengan zakat tersebut, bagaimana mekanisme pembentukannya, mekanisme kerjanya dan pengawasannya. Namun harus ada kerangka normatif yang memadai sebagai pengejawantahan dari cita maslahat dan keadilan dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Kerangka kelembagaan yang memadai bagi sarana aktualisasi norma-norma maslahat dan keadilan merupakan syarat mutlak demi tercapainya *maqâshid syari'at* zakat.

Berkaitan dengan pengolahan harta zakat secara produktif, maka harus ada ketentuan aturan (ضوابط) yang mendasari diperbolehkannya memproduksi harta zakat. Abdullah bin Manshur Al-Ghafiliy, dalam kitabnya *Nawazil Al-Zakah* mengemukakan ada enam aturan (ضوابط) dalam

mengelola harta zakat menjadi aset produktif sebelum harta itu dibagikan kepada mustahiknya, yaitu :⁴⁹

- (a) Tidak ada unsur mendesak untuk segera membagikan harta zakat tersebut

Yang dimaksud dengan kebutuhan mendesak di sini adalah harus ada dipastikan bahwa kebutuhan pokok (*al-hajat al-dharuriyah*) bagi mustahik zakat telah terpenuhi. Kebutuhan pokok (*al-hajat al-dharuriyah*) yang dimaksud adalah seperti keharusan memenuhi kebutuhan pangan (makan, minum dan termasuk kebutuhan kesehatan), sandang (pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi auratnya) atau papan (tempat tinggal agar dapat berlindung dari panas, hujan dan kedinginan) dan sarana dan prasarana pekerjaannya.

Adapun apabila masih ada kebutuhan mendesak yang pokok ini yang harus ditunaikan, maka tidak boleh menunda pembagian harta zakat kepada mustahiknya, sekalipun dengan alasan ingin memproduktifitaskannya. Sehingga, apabila harta zakat tersebut telah menjadi aset tetap seperti pabrik atau harta tidak bergerak (seperti perabotan rumah, lahan, bangunan rumah dan lain-lain) maka aset itu harus segera dijual dan hasil penjualannya diserahkan untuk menutupi kebutuhan yang dimaksud.

- (b) Memproduktifitaskan harta zakat itu harus kepada usaha yang legal secara syara' (*masyru'iyah*)

⁴⁹ Abdullah bin Manshur Al-Ghafiliy, *Nawazil Al-Zakah*, *op.cit.*, hlm. 495-496.

Usaha produktif yang *syari'y*, artinya adalah bahwa dari hasil zakat yang telah dikumpulkan tersebut dipergunakan untuk mengelola usaha produktif yang terbebas dari unsur riba, gharar dan perkara yang dilarang lainnya. Seperti membuat usaha perdagangan, perindustrian, peternakan atau perkebunan yang halal, dengan harapan hasil dari usaha tersebut menjadi aset protektif bagi kebutuhan mustahik untuk jangka panjang.

Rasulullah saw, dalam satu riwayat tidak langsung segera membagikan harta zakat kepada mustahiknya, akan tetapi dikumpulkan terlebih dahulu dan diberi tanda pada masing-masing hewan ternak dari hasil zakat, sehingga ada kemungkinan hewan ternak itu berkembang dan bertambah banyak, sebagai mana disebutkan dalam riwayat hadits sebagai berikut :

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمِ يَسْمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ⁵⁰

Artinya : “Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: “Aku berangkat di pagi hari bersama ‘Abdullah bin Abu Thalhah menemui Rasulullah saw untuk mentahniknya dan aku dapati di tangan Beliau ada stempel besi yang biasanya untuk memberikan tanda pada unta (dari hasil zakat)”.

Praktek Rasulullah saw yang disebutkan dalam hadits di atas mengisyaratkan bahwa zakat yang telah diserahkan kepada Rasul tidak langsung diberikan kepada mustahiknya (*la yaqtadhi al-faur*).

- (c) Menjadikan semua hasil yang terkandung dalam usaha tersebut sebagai modal harta zakat, yang semuanya itu dijadikan untuk keperluan

⁵⁰ Al-Bukhariy, *Al-Jami' Al-Shahih*, Juz I, him. 466.

mustahik zakat. Dan apabila ada kebutuhan mendesak untuk menjual aset usaha dari harta zakat tersebut, maka hasil penjualannya juga harus dikembalikan untuk keperluan mustahik.

- (d) Harus memprioritaskan pada usaha yang sudah dianalisa secara cermat oleh tim ahli, sehingga dapat menghasilkan stabilitas produksi yang ekonomis secara *syari'y*.
- (e) Pelaksanaannya harus ditopang oleh penataan usaha, pengawasan dan bimbingan tenaga ahli yang berpengalaman dan amanah.
- (f) Harus disahkan oleh orang-orang yang berwenang, terpercaya, berpengetahuan yang luas, diikuti dan dipercaya oleh umat, dapat diterima oleh semua pihak dengan hati ikhlas, penuh *istiqamah*, bertakwa, adil, bijaksana serta memiliki semangat untuk bekerja demi kepentingan umum.

Di samping enam aturan (ضوابط) yang dikemukakan oleh al-Ghafily

di atas, menurut hemat penulis ada satu lagi aturan yang harus terpenuhi dalam memproduksi harta zakat, yaitu :

- (g) Adanya kepastian bahwa harta yang diproduksi itu mengandung nilai kemaslahatan.

Nilai kemaslahatan di sini adalah segala nilai kemaslahatan yang layak untuk keperluan mustahik zakat. Artinya dari harta yang diberikan itu dapat memberikan jaminan bahwa yang menerimanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk jangka panjang. Prinsip ini

berdasarkan suatu riwayat tentang praktek sedekah (zakat) yang diterapkan oleh Rasulullah saw, yaitu :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ عَرِينَةِ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاهَا فَقَتَلُوا الرَّاغِيَّ وَاسْتَأْفَوْا الدَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَةِ يَعْضُونَ الْحِجَارَةَ تَابِعَهُ أَبُو قَلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ⁵¹

Artinya : “*Dari Anas ra bahwa ada sekelompok orang dari 'Urainah yang sakit terkena udara dingin kota Madinah. Maka Rasulullah saw membantu meringankan beban mereka dengan memberi bagian dari zakat unta, dengannya mereka dapat meminum susu-susunya dan air kencingnya. Namun kemudian orang-orang itu membunuh pengembala unta tersebut dan mencuri unta-untanya sejumlah antara tiga hingga sepuluh. Maka Rasulullah saw mengutus seseorang. Akhirnya mereka dibawa ke hadapan Beliau, lalu kemudian Beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas lalu menjemur mereka dibawah panas dan ditindih dengan bebatuan. Hadits ini dikuatkan juga oleh Abu Qalabah dan Humaid dari Tsabit dari Anas*”.

Berdasarkan riwayat di atas, maka dapat difahami bahwa Rasulullah saw memberikan harta zakat kepada seseorang dari kelompok 'Urainah yang ketika itu sakit terkena udara dingin kota Madinah. Pemberian yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah berupa aset produktif yang manfaatnya di samping untuk kebutuhan hidupnya dapat dimanfaatkan juga sekaligus untuk keperluan pengobatannya.

Maka para amil zakat dalam konteks saat ini dapat melakukan pengolahan zakat dengan cara memfasilitasi mustahik zakat yang tidak

⁵¹ Al-Jami' Al-Shahih, Juz I, hlm. 465-466.

lagi produktif bekerja karena kelemahan yang mereka alami. Bagi mereka disediakan misalnya rumah kontrakan, yang hasil kontrakannya dapat memenuhi kebutuhan pokok (*dharuriyah*) mereka untuk jangka panjang.

Adapaun kepada mereka yang masih mempunyai daya usaha (kekuatan fisik), namun lemah secara financial (tidak memiliki modal usaha atau akses memperoleh modal usaha), maka mereka dapat diberikan modal usaha, misalnya peternakan atau perkebunan tertentu yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan pokok (*dharuriyah*) hidupnya.

Apabila ketujuh prinsip di atas tidak dapat terpenuhi, maka harta zakat tersebut tidak dibenarkan dialihfungsikan menjadi selain dari pengalihan hak kepada mustahik zakat (*al-ashnaf al-tsamaniyah*). Karena menunda memberikan zakat kepada mustahik adalah tidak dibenarkan kecuali dengan syarat-syarat yang telah diuraikan di atas dan dengan mempertimbangkan nilai kemashlahatan (*dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah*) menurut skala prioritas masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sejak awal diturunkannya syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin, dunia-akhirat, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan itu sendiri. Maka cara apaun yang dilakukan oleh seorang mukallaf, menjadi keharusan baginya agar senantiasa berada dalam kerangka nilai kemaslahatan (*maqâshid al-syari'ah*).

Nilai fundamental yang diinginkan oleh bangunan pemikiran hukum Islam adalah bermuara pada segala upaya merealisasikan nilai kemashlahat dan memproteksi kemungkinan yang dapat merusak (جلب المصالح ودرء المفاسد). Kemaslahatan manusia yang dimaksud bersifat universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional "keadilan sosial". Tawaran teoritik (*ijtihâdîy*) apapun dan bagaimanapun, baik didukung dengan *nash* ataupun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya kemashlahatan kemanusiaan dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya.

Sebaliknya, tawaran teoritik apapun dan yang bagaimanapun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya kemaslahatan, apalagi ada peluang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kacamata Islam adalah *fâsid*, dan umat Islam secara perorangan atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.

Zakat memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian suatu Negara. Walaupun zakat termasuk ibadah *mahdhah*, tetapi di dalamnya terkandung nilai ibadah *ghair mahdhah*, karena mengandung dimensi *horizontal* sekaligus dimensi *vertikal*, ketika Allah swt membimbing hambaNya yang ingin dekat denganNya maka mereka juga harus dekat kepada sesama.

Kunci pemerataan ekonomi salah satunya adalah dengan optimalisasi pengelolaan zakat. Oleh karena itu peran badan atau lembaga pengelola zakat bagi pemerataan ekonomi sangat besar, namun bila tidak didukung oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat maka lembaga pengelola zakat ibarat seperti bangunan rumah tanpa tutupan atapnya artinya keberadaannya kurang sempurna.

Harmonisasi antara teks dan ruh syari'ah sebagaimana dikonsepsikan dalam teori *maqâshid al-syarî'ah* perlu dikembangkan oleh para ilmuan dan *mujtahidin* dalam menganalisa dan mengistinbatkan suatu hukum agar senantiasa relevan dan kontekstual dengan semangat zaman dan berpijak pada nilai-nilai kemashlahatan (*maqâshid al-syarî'ah*) yang dimaksud. Karena itu, berkaitan dengan tema pembahasan tesis ini, yakni; "*Pengelolaan Zakat Mal Secara Produktif Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah*" harus memiliki landasan yang jelas. Atas dasar pertimbangan di atas dan didukung oleh argumentasi dan analisa yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan :

1. Perintah zakat kepada amil adalah dengan *shighat amar "khudz"* bermakna bahwa selaku amil zakat wajib berperan aktif dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Berarti, pelaksanaan zakat adalah bersifat *ijbâ'iy*, dengan arti kata bahwa tidak boleh ada yang menentang dan menghambat proses pelaksanaannya setelah diyakini zakat sebagai kewajiban dari Allah swt.

2. Fungsi amil adalah “wakil Allah swt” dalam menyampaikan perimbangan pendapatan harta (menegakkan prinsip *mu’adalah dan musâwah* dalam masyarakat) ; “تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم”. Tugas amil adalah mengupayakan “*fuqara*” mendapatkan haknya sehingga terpenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok mereka, maka dengan sendirinya mereka dapat dengan mudah melaksanakan hak dan kewajibannya terutama dalam upaya memelihara *al-kulliyât al-khamsah* (*hifzh al-dîn, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-nasl wa al-nasb wa al-a’radh* dan *hifzh al-mâl*) terutama yang bersifat *al-dharûniyah*. Bahkan sampai pada level *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah*.
3. Pelaksanaan zakat, tidaklah ditujukan untuk menghentikan kemajuan ekonomi, karena telah mengambil sebagian modal dari orang kaya untuk diberikan kepada orang lain yang kurang beruntung. Sementara, memanjakan “orang-orang malas” agar dapat terus hidup dalam “budaya kemiskinannya”, bukanlah citra keislaman. Karena itu Islam justru memotifasi ummatnya senantiasa beraktifitas dan berproduktifitas lahir dan batin melalui pemberdayaan zakat.
4. Secara umum, syari’at zakat dimaksudkan agar setiap individu mustahik memiliki peluang untuk dapat berpartisipasi dan mengoptimalkan potensinya dalam mengatasi kebutuhan *dharûniyyah*nya. Islam dalam konsep zakat memandang bahwa, kondisi mustahik tidak mampu menyelamatkan statusnya bukanlah disebabkan karena ketidakmampuan individu mereka dalam melakukan proses penyelamatan. Akan tetapi bisa jadi dan dominan disebabkan karena mereka tidak memiliki akses untuk mampu melakukan aktifitasnya, dikarenakan ketiadaan harta

sebagai modal. Karena itu, kran penyumbat akses menuju aktifitas produktif itu harus dibuka dengan redistribusi harta melalui penerapan zakat.

5. Syari'at zakat menjamin kebebasan bagi setiap aktor ekonomi dalam menjalankan aktifitas memperoleh keuntungan yang terbaik dan halal. Di samping itu juga, konsep zakat mengingatkan bahwa dalam capaian kemajuan ekonomi tersebut, terdapat hak-hak orang lain yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung (حق معلوم للسائل والمحروم).
6. Dengan analisis yang sama, pelaksanaan zakat memiliki tujuan objektif untuk meruntuhkan fenomena pembangunan yang terdistorsi. Melalui mekanisme redistribusi harta kekayaan, zakat berupaya meminimalisasikan *gap* di tengah kehidupan manusia, sehingga mampu memproteksi (*muhafadzah*) segala ancaman kemungkinan yang dapat merusak *al-kulliyât al-khamsah* yaitu agama (*al-dîn*), jiwa (*al-nafs*), psikologi (*al-'aql*), keturunan, keluarga dan dan kehormatan (*al-nasl wa al-nasb wa al-a'radh*) serta harta (*al-mâl*), baik yang *dharûriyyah*, *hâjiyyah* maupun *tahsîniyah*.
7. Dari sudut pandang ekonomi, syari'at zakat diarahkan pada tujuan yang lebih spesifik yaitu penyebaran kesejahteraan secara tepat sasaran (produktif). Laju pertumbuhan ekonomi mampu memberikan *sharing* pendapatan bagi masyarakat yang kurang beruntung, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi pada kelompok yang memiliki modal saja. Tetapi juga tersebar merata bagi mereka yang tergolong miskin, karena adanya tambahan distribusi pendapatan melalui zakat. Oleh karenanya, penerapan zakat dalam pembangunan mampu memacu pembangunan kesejahteraan sosial, bersamaan dengan laju pertumbuhan ekonomi.

8. Berkaitan dengan sistim pengelolaan zakat, maka sudah saatnya pengelolaan zakat beralih dari model yang tradisional-konvensional yang dilakukan sambil lalu atau sekedar saja, temporer (jangka pendek dan terbatas), dan dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten yang sekedar berbekal semangat seadanya menuju model pengelolaan zakat yang berkualitas, akuntabel, modern-profesional melalui jejaring kelembagaan dan instrumen perekonomian.
9. Pengelolaan zakat secara produktif baru dapat ditempuh manakala telah terpenuhinya kebutuhan pokok mustahik secara pasti, dan atau memastikan bahwa harta zakat yang diproduktifitaskan itu mampu menjamin memenuhi kebutuhan pokok mustahik. Cara ini hanya dapat ditempuh manakal telah terpenuhinya minimal enam unsur aturan (ضوابط) dalam mengelola harta zakat menjadi aset produktif sebagaimana telah diuraikan dalam BAB IV halaman 203.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyarankan :

1. Agar para amil (Lembaga atau Badan Amil Zakat) menyadari bahwa harta yang dikelola adalah hak mustahik. Maka prinsip pengelolaannya harus menegakkan prinsip amanah, proporsional dan profesional terutama dalam memenuhi hak *dhurûriyah* mustahik.
2. Agar pemerintah mendukung, memfasilitasi dan membantu upaya pengembangan konsep pengelolaan zakat secara produktif sehingga menghasilkan manfaat dari syari'at zakat secara lebih luas (جلب المنافع).

3. Agar Badan dan Lembaga Amil Zakat meningkatkan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan zakat dan optimalisasi pendayagunaannya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Karena di sisi mustahik, banyak di antara mereka yang masih sulit dibina. Ketergantungan mereka terhadap *muzakkiy* menjadikan mereka pasif, dan tentu saja tidak merubah nasib mereka. Oleh karena itu hal ini menjadi pekerjaan amil, yaitu memformulasikan kiat-kiat yang harus dilakukan agar mustahik mudah dibina dan penyalurannya tepat guna sehingga untuk keperluan jangka panjang mereka diupayakan menjadi berkecukupan bahkan menjadi *muzakkiy*.
4. Agar Badan atau Lembaga Amil Zakat betul-betul serius melaksanakan tugasnya. Sehingga BAZ atau LAZ yang telah dibentuk dipastikan memiliki data (hasil sensus) yang akurat berkenaan dengan data *muzakkiyy* dan *mustahiq al-zakah*, dan memahami cara yang paling tepat (maslahat) dalam mendistribusikan zakat kepada mereka secara aktif.
5. Menerapkan model pengelolaan zakat yang modern-profesional, minimal memiliki beberapa ciri yang harus terpenuhi :
 - a. Pengelolaan zakat secara *full time*, atau pengelolaan zakat yang dilakukan dalam jam kerja sehari minimal 9 jam dengan jumlah hari kerja minimal enam hari dalam seminggu, ditambah jam lembur sesuai kebutuhan, karena pekerjaan ini berhubungan dengan pelayanan ummat (رعاية الراعى لمصلحة الأمة).
 - b. Dikelola oleh orang-orang yang mau bekerja dan memiliki kompetensi, kapasitas dan kapabilitas sesuai bidang tugas atau jabatan yang hendak diembannya.

- c. Seluruh pengelola (*'âmil*) dalam tugas mengelola zakat tersebut mendapatkan gaji atau upah yang wajar sesuai standar hidup yang layak menurut situasi dan kondisi lingkungan sekitar keberadaan lembaga pengelola zakat tersebut.
 - d. Orientasi penilaian di dalam lembaga adalah orientasi prestasi. Dengan kata lain para amil zakat diharuskan mereka yang produktif dan memberikan produktifitas kerja bagi kemaslahatan mustahik zakat.
 - e. Menggunakan atau memenuhi standar manajemen zakat yang modern (*syar'iy*), seperti adanya visi dan misi, skala prioritas kerja, perencanaan kerja tahunan pada program yang legal secara syara', pengorganisasian, penyusunan personil, penyusunan anggaran, dan melakukan evaluasi perkembangan secara periodik.
 - f. Mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas badan atau lembaga, yaitu telah melakukan pencatatan setiap kegiatan atau transaksi dengan benar, menyusun laporan dan selanjutnya mempublikasikan laporan kegiatan dan keuangannya kepada publik secara terbuka. Sehingga semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengakses informasi kegiatan dan keuangan lembaga untuk kemudian memberikan apresiasi.
6. Meminta kepada pemerintah, DPR, organisasi zakat dan masyarakat luas mengusahakan dan memperjuangkan agar Undang-undang yang berkaitan dengan zakat dapat diamandemen/direvisi sehingga zakat berperan secara maksimal (peran *ijbâriy*) dan sebagai sumber dana pembangunan umat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- 'Ainiy, Badruddin Abi Muhammad Mahmud Bin Ahmad al-. (1421 H./2001 M). *'Umdah Al-Qariy Syarh Shahih Al-Bukhari*. Cet. ke-1. Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- 'Alim, Yusuf Hamid Al-. (1415 H./1994 M). *Al-Maqashid Al-'Ammah Li Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Cet. ke-2. Riyad : Al-Dar Al-'Alamiyyah Li Al-Kitab Al-Islamiy.
- 'Audah, Jasir. (1428 H./2007 M). *Multaqa Al-Imam Al-Qurthubiy Ma'a Al-Ashhab Wa Al-Talimidz ; Maqashid Al-Syari'ah 'Inda Al-Syaikh Al-Qurthubiy*.
- 'Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (1426 H./2005 M). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Kairo : Dar Al-Hadits,
- 'Id, Taqiuddin Bin Daqiq Al-. (1414 H./1994 M). *Ihkam Al-Ahkam Syarh 'Umdah Al-Ahkam*. Cet. ke-1. Kairo : Al-Maktabah Al-Sunnah.
- 'Izz Al-Din, Abd Al-'Aziz Bin Abd Al-Salam. *Al-Qawa'id Al-Kubra Al-Mausum Bi Qawa'id Al-Ahkam Fi Ishlah Al-Anam*. Damaskus : Dar Al-Qalam.
- Ali, Mohammad Daud. (1998). *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press.
- Al-Khaththabiyy, al-, Abu Sulaiman Hammad Bin Muhammad Al-Bustiy. (1352 H./1933 M). *Ma'alim Al-Sunan ; Sarh Sunan Al-Imam Abu Daud*. Cet. ke-1. Mathba'ah Al-'Ilmiyah.
- Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, (Kuwait : Wizarat Al-Auqaf Wa Al-Syu'un Al-Islamiyah, 1412 H./1992 M.), Cet. ke-2
- Amidiy, Ali Bin Muhammad al-. (1424 H./2003 M). *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*. Cet. ke-1. Riyad : Dar Al-Sham'iyy.
- Anas, Malik Bin. (1424 H./2003 M). *Al-Muwaththa'*. Dubai : Majmu'at Al-Furqan Al-Tijariyah.
- Asqalaniy, Ahmad bin Ali Bin Hajar al-. (1421 H./2001 M). *Fath Al-Bariy*.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (1426 H./2005 M). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Kairo : Dar Al-Hadits.
- Ba'liyy, Abdul Hamid Mahmud Al-. (2006 M). *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*; Terjemahan Muhammad Abqary Abdullah Karim. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Badawiy, Yusuf Ahmad Muhammad Al-. *Maqashid Al-Syari'ah 'Inda Ibni Taimiyah*. Yordan : Dar Al-Nafais.

- Baqiy, Muhammad Fuad Abdul. (1324). *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo : Dar Al-Kutub Al-Mishriyah.
- Bashariy, Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi al-. (1414 H./ 1994 M.). *Al-Hawiy Al-Kabir Min Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i; Syarh Mukhtashar Al-Muzniy*. Cet. ke-1. Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman Al-. (1423 H./2003 M.). *Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram*. Cet. ke-5. Makkah : Maktabah Al-Asadiy.
- Bukhariy, Abu Abdilllah Muhammad bin Ismail al-. (1400 H.). *Al-Jami' Al-Shahih*. Cet. ke-1 . Kairo : Al-Batba'ah Al-Salafiyah.
- Buthi, Muhammad Sa'id Ramdhan al-. (1965 M.). *Dawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut : Mu'assasah ar-Risalah.
- Dahlan, Abdul Aziz, (editor ; et.al). (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeva.
- Ghafiliy, Abdullah Bin Masshur Al-. (1429 H./2008 M.). *Nawazil Al-Zakah; Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah Li Mustajaddat Al-Zakah*. Cet. ke-1. Riyad : Kerjasama Bank Al-Bilad dengan Dar Al-Maiman.
- Ghazali, al-. (1983). *Al-Mustashfa Li 'Ilm al-Ushul*. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Hadri, Sutrisno. *Metode Research*. (1989). Yogyakarta : Andi Offset.
- Haritsiy, Jaribah Bin Ahmad Bin Sanyan Al-. 91424 H./2003 M.). *Al-Fiqh Al-Iqtishadiy Li Amir Al-Mukminin Umar Bin Khattab*. Cet. ke-1. Jedah : Dar Al-Andalus Al-Khazhra'.
- Hasan, Husein Hamid. (1971). *Nazhriyah Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Mesir : Dar Al-Nahdhah Al-'Arabiyyah.
- Jamjum, Abdul 'Aziz Muhammad Rasyid. (1429 H.). *Al-Zakah Fi Al-Mizan*. Jedah : Dar Al-Qiblah Li Al-Tsaqafah Al-Islamiyah.
- Jaziriyy , Abdurrahman al-. (1424 h./2003 M.). *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Cet. ke-2. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Jurjawiyy, Ali Ahmad al-. (1414 H.). *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuh*. Beirut : Dar Al-Fikr.
- Juwainiy, Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-. (1400 H.). *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Kairo : Dar al-Anshar.
- Karmaniyy, al-. (1401 H./1981 M.). *Al-Bukhari Bi Syarh Al-Karmaniyy*. Cet. ke-2. Beirut : Dar Ihya Al-Turats Al-Arabiyy.
- Khadimiyy, Nuruddin Bin Mukhtar Al-. (1421 H./2001 M.). *'Ilm Al-Maqashid Al-Syari'ah*. Cet. ke-1. Riyad : Maktabah Al-'Abikan.

- Khatthabiyy Al-, Abu Sulaiman Hammad Bin Muhammad Al-Bustiy. (1352 H./1933 M.). *Ma'alim Al-Sunan; Sarh Sunan Al-Imam Abu Daud*. Cet. ke-1. t.t. : Mathba'ah Al-'Ilmiyah.
- Lasyin, Musa Syahin. (1424 H./2003 M.). *Al-Manhal Al-Hadits Fi Syarh Al-Hadits*. Cet. ke-3. Kairo : Dar Al-Syuruq.
- Luis Ma'luf. *Al-Munjid Fii Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut : Dar Al-Masyriq.
- Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa Dirasat Li Musykilat Al-Muslim Al-Mu'ashir Fi Hayatih Al-Yaumiyah Wa Al-'Ammah*, (Kairo : Dar Al-Qalam, 1966), cet. ke-3.
- Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah. (1425 H./2004 M.). *Al-Mu'jam Al-Washith*. Cet. ke-4. Mesir : Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah.
- Makhdum, Mushthafa Bin Karamatullah. (1420 H./1999 M.). *Qawa'id Al-Wasa'il Fi Al-Syar'ah Al-Islamiyah; Dirasah Ushuliyyah Fi Dhu'i Al-Maqashid Al-Syar'ah*. Cet. ke-1. Riyad : Dar Isybiliyya.
- Manzhur, Abu Al-Fadhal Jamaluddin Muhammad Bin Makram Ibn-, *Lisan Al-'Arabiyy*, (Beirut : Dar Shadir, 1410 H./1990 M.), Cet. ke-1
- Masyhur, Ni'mat Abdul Latif. (1413 H./1993 M.). *Al-Zakah Al-Asas Al-Syar'iyyah Wa Al-Daur Al-Inma'iy Wa Al-Tauzi*. Beirut : Al-Muassasah Al-Jami'iyah.
- Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Habib al-. (1393 H/1973 M). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wlayat al-Diniyyah*. Cairo : Al-Bab Al-Halabiyy.
- _____. (1414 H./ 1994 M.). *Al-Hawiy Al-Kabir Min Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi'iy; Syarh Mukhtashar Al-Muzniy*. Cet. ke-1. Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Muhammad Sa'id Ramdhan al-Buthi, *Dawabith al-Mashlahah fi al-Syar'ah al-Islamiyyah*, (Beirut : Mu'assasah ar-Risalah, 1965)
- Mujahidin, Akhmad. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Munawar, Said Agil Husin Al-. (2005). *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'an dalam Sistem Pendidikan Islam*. Cet. ke-2. Jakarta : Ciputat Press.
- Nadwiyy, Ali Ahmad al-. (1412 H./1991 M). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Mafhumuha Wa Nasy'atuha Wa Tathawwuruha Wa Dirasatu Muallafatiha Wa Adilatuha Wa Mahammatuha Wa Tathbiqatuha*. Cet. ke-2. Damaskus : Dar Al-Qalam.
- Namlah, Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad al-. (1420 H./2000 M). *Al-Jami' Li Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tathbiquha 'Ala I-Madzahib Al-Rajih*. Cet. ke-1. Riyad : Maktabah Al-Rusydi.
- Nasution, Mustafa Edwin, et.al.. (2007). *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*. Cet. ke-2. Jakarta : Kencana.

- Nata, Abudin et.al. (1999). *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta : BAZIS DKI Jakarta.
- Nawawi, Imam Al-. (1347 H./1929 M.) *Shahih Muslim bi Syarh Al-Nawawi*. Cet. ke-1. Mesir : Al-Mathba'ah Al-Mishriyah Bi Al-Azhar.
- Nawawiy, Abu Zakariya Muhyi Al-Din Bin Syarf al-. *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab Li Al-Syairazy*. Jedah : Maktabah Al-Irsyad.
- Qadir, Abdurrahman. (2001 M.). *Zakat dalam Dimensi Ma'dhah dan Sosial*. Cet. ke-2. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Qahaf, Mundzir. (1995 M./1415 H.). *Al-Nushush Al-Iqtishadiyah Min Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*. Cet. ke-1. Jeddah : Markaz Al-nasyr Al-'Ilmiy.
- Qaradhawiy, Abdurrahman Yusuf Abdullah al-. (1421 H./2001 M.). *Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Cet. ke-4. Kairo : Maktabah Wahbah.
- _____. (1414 H./1994 M.). *Fiqh al-Zakah*. Beirut : Muassasah al-Risalah.
- _____. (1422 H./2001 M.). *Al-'Ibadah Fi Al-Islami*. Cet. ke-2. Beirut : Muassasah Al-Risalah.
- _____. *Nazhriyah Maqashid Al-Syari'ah Baina Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah Wa Jumhur Al-Ushuliyyin Dirasah Muqaranah Min Al-Qomi Al-Khamis Ila Al-Qami Al-Tsamin Al-Hijriy*.
- Qaththan, Manna' Khalil al-. (1417 H./1996 M.). *Tarikh li Tasyri' al-Islamy; al-Tasyri' wa al-Fiqh*. Riyadh : Maktabah Al-Ma'arif.
- Qazwainiy, Abu Abdullah Muhammad Yazid al-. *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah.
- Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Muqaddasiy. (1414 H./1994 M.). *Al-Mughniy 'Ala Mukhtashar Al-Kharqiy*. cet. ke- 1. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Qurthubiy, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-. (2006). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. cet. ke-1. Beirut : Muassasah Al-Risalah.
- Rahhal, 'Ala Al-Din Husain. (1422 H./2002 M.). *Ma'alim Wa Dhawabith Al-Ijtihad 'Inda Syaikh Al-islam Ibn Taimiyyah*. Cet. ke-1. Yordan : Dar Al-Nafais.
- Rahmad Rasyadi, A, dan M. Rais Ahmad. (2006). *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Razi, Fakhrudin Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husain al-. (1988). *al-Mah I fi 'Ilm U I al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ridha, Muhammad Rasyid. (1368 H.). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim Al-Syahir Bi Tafsir Al-Manar*. Cet. ke-2. Mesir : Dar Al-Manar.

- Rifa'iyy, Muhammad Nasib Al-. (1410 H./1989 M.). *Taisir Al-'Aliy Al-Qadir Li Ikhtishar Tafsir Ibn Kasir*. Riyadh : Maktabah Al-Ma'arif.
- Risha'iyy, Abu Abdullah Muhammad Al-Anshariyy al-. (1993 M.). *Syarh Hudud Abi 'Arafah; Al-Mausum; Al-Hidayah Al-Kafiyah Al-Syafiyah Li Bayan Haqaiq Al-Imam Abi 'Arafah Al-Wafiyah*. Cet. ke- 1. Beirut : Dar Al-Gharb Al-Islamiyy.
- Rusli, Nasrun. (1999 M.). *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Logos.
- Rusydi, Ibnu. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*. Semarang : Karya Toha Putra.
- Sabiq, Al-Saiyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo : Al-Fath Li Al-'Alam Al-'Arabiyy.
- Sayis, Ali Al-. (1970). *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Athwaruha*. (Kairo : Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyy.
- Shan'any, Muhammad bin Ismail al-. (1992 M./1411 H.). *Subu Al-Salam Syarakh Bulugh Al-Maram*. Beirut : Dar Al-Fikr.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1999). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UII Press.
- Suyuthiy, Jalaluddin Abdurrahman al-. (1403 H./1983 M.). *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Furu'ih*. Cet. ke- 1. Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- _____. (1419 H./1998 M.). *Al-Tausyih Syarh Al-Jami' Al-Shahih*. Cet. ke-1. Riyad : Maktabah Al-Rusydi.
- Sya'lan, Ibrahim Usman Al-. (1402 H.). *Nizh.am Masharif Al-Zakah Wa Tauzi' Al-Ghanami*
- Syalabiy, Muhammad Mushthafa. (1405 H./1985 M.). *Al-Madkhal Fi Al-Fiqh Al-Islamiyy ; Ta'rifuhu Wa Tarikhuhu Wa Madzahibuhu Nazhriyah Al-Milkiyyah Wa Al-'Aqd*. Cet ke-10. Beirut : Al-Dar Al-Jami'iyyah.
- Syaltut, Mahmud. (1966). *Al-Fatawa Dirasat Li Musykilat Al-Muslim Al-Mu'ashir Fi Hayatih Al-Yaumiyah Wa Al-'Ammah*. Cet. ke-3. Kairo : Dar Al-Qalam.
- Syathibiy, Abu Ishak al-. (1975). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut : Dar al-Ma'arif.
- Syaukaniyy, Muhammad al-. *Nail Al-Authar Syarah Muntaqa Al-Akhbar*. Beirut : Dar Ihya' Al-Turats Al-'Araby.

Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Firuz Abadiy al-. (1426 H./2005 M.). *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi'iy*. Beirut : Dar Al-Fikr.

Tirmidziy, Muhammad Bin 'Isa Bin Saurah Al-. *Sunan Al-Tirmidziy*. Cet. ke-1. Riyadh : Maktabah Al-Ma'arif.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Utsman, Mahmud Hamid. (1423 H./2002 M.). *Al-Qamus Al-Mubin Fi Ishtilahat Al-Ushuliyin*. Cet. ke-1. Riyad : Dar Al-Zahim.

Waluyo, Bambang. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Prektek*. Jakarta : Sinar Grafika.

Washil, Nashir Farid Muhammad. *Al-Madkhal Al-Wasith Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Al-Fiqh Wa Al-Tasyri'*. Mesir : Al-Maktabah Al-Taufiqiyah.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. (Bandung : Mizan, 1995).

Yamamah, Abd Al-Sanad Hasan. (1426 H./2005 M.). *Mausu'ah Syuruh Al-Muwaththa' Li Al-Imam Malik Bin Anas*. Cet. ke-1. Kairo : Markaz Hajar Li Al-Buhuts Wa Al-Dirasat Al-'Arabiyyah Wa Al-Islamiyah.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. (2002 M.). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*. Semarang : Toha Putra.

Yubiy, Muhammad Sa'id Bin Ahmad Bin Mas'ud Al-. (1418 H./1998 M.). *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Cet. ke-1. Riyadh : Dar Al-Hirah.

Zaidan, Abdul Karim. (1413 H./1993 M.). *Al-Mufashshal Ahkam Al-Mar'ah Wa Al-Bait Al-Muslim Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Cet. ke- 1. Beirut : Muassasah Al-Risalah.

Zubaidiy, Al-Husain Bin Al-Mubarak al-. *Al-Tajrid Al-Sharih Li Ahadits Al-Jami' Al-Shahih*, Mesir : Al-Maimaniyyah.

Zuhailiy, Wahbah Al-. (1985 M.). *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*. Cet. ke-2. Damaskus : Dar Al-Fikr.

_____. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'ashir.